

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 62
Februari 2024



9 772655 933008

PEMILU DAMAI

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Helmi Fajar Andrianto

Redaktur Pelaksana:
Fahmie Trihatin J.

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Daoni Diani Hutabarat
Verawati
Annisaa Bonita P.

Reporter:
Agung Windhi Prasetya
Adhi Sakti
Meita Pusparini
Adelia Nabiila Safira
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Desideramus Bitan

Fotografer:
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma
Paulinus Hardi Subiantoro

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi & Distribusi:
Sofia Wahdiati
Ardhia Mafaza

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Pemilu Damai Indonesia Hebat

Salam sehat dan sejahtera para pembaca Majalah Kominfo Next, Semoga hari-hari yang kita lalui senantiasa bahagia dan penuh suka-cita. Pada edisi kedua di tahun 2024, Majalah Kominfo Next menyajikan beragam informasi dan bacaan menarik kepada pembaca setia, khususnya seputar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Apa saja peran Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tahapan penyelenggaraan Pemilu?

Pertanyaan di atas sering kami dengar baik dari masyarakat luas maupun rekan-

rekan media ketika bertanya tentang peran strategis Kementerian Kominfo membantu menyukseskan Pemilu 2024 yang hari pencoblosan telah berlangsung pada 14 Februari 2024.

Sebagai institusi pemerintahan yang salah satu fungsinya menjalankan Government Public Relations (GPR) atau Humas Pemerintah, Kementerian Kominfo berperan penting dengan turut memberikan sosialisasi dan kampanye Pemilu Damai 2024 yang dijadikan dalam program strategis. Program Pemilu Damai masih terus berjalan hingga seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Wamenkominfo Nezar Patria beserta seluruh jajarannya di Kementerian Kominfo telah melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengawal pesta demokrasi dengan damai. Kementerian Kominfo kemudian berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai



Rhina Anita

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat
• **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**

penyelenggara Pemilu, kementerian dan lembaga terkait, komunitas masyarakat, hingga industri media massa di Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dinamika pesta demokrasi diwarnai dan tidak terlepas dari maraknya informasi yang bertebaran di media sosial dan media massa. Termasuk informasi yang mengandung hoaks, disinformasi, misinformasi, malinformasi, fitnah, ujaran kebencian dan jenis penyebaran berita negatif lainnya.

Berdasarkan laporan temuan hoaks periode 1 Juli 2023 hingga 4 Januari 2024, Kementerian Kominfo mengidentifikasi jumlah hoaks Pemilu sebanyak 195 isu yang tersebar di 2.825 konten. Melalui gerak cepat dari tim patroli 24 jam penanganan konten negatif, terdapat 1.546 konten telah ditindaklanjuti dengan melakukan pemblokiran. Sementara konten lainnya terus dalam proses penanganan hingga periode Februari.

Para pembaca Majalah Kominfo Next! ternyata ada kabar baik di tengah temuan konten hoaks pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Secara umum, jumlah hoaks terkait Pemilu menurun signifikan dibanding Pemilu tahun 2019 lalu. Artinya, masyarakat Indonesia makin hebat, cerdas, dan bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan platform media sosial serta cermat menerima informasi dari media massa. Capaian ini menunjukkan sosialisasi dan kampanye Pemilu Damai 2024 oleh Kementerian Kominfo dan *stakeholders* berlangsung sukses.

Sebelum menutup sambutan ini. Tim Majalah Kominfo Next mengajak seluruh pembaca dan masyarakat untuk turut menyukseskan Pemilu 2024 yang tahapan penyelenggaraannya masih berlangsung. Kementerian Kominfo terus berkomitmen untuk mengajak serta masyarakat agar bijak memanfaatkan platform media sosial dengan tidak menyebarkan informasi hoaks dan sejenisnya terkait Pemilu 2024. Karena dengan demikian lah, wajah demokrasi kita semakin diakui dunia karena Indonesia Hebat.

Atas nama pribadi dan Tim Majalah Kominfo Next, saya menyampaikan selamat menikmati beragam informasi yang kami sajikan pada edisi Februari 2024 ini. Tentunya, menjadi suatu kehormatan bagi kami ketika Majalah Kominfo Next dijadikan rujukan dan referensi dalam mengakses berbagai informasi penting lainnya tentang program dan kebijakan pemerintah khususnya di Kementerian Kominfo.

Selamat membaca!

**Kementerian Kominfo
terus berkomitmen
untuk mengajak serta
masyarakat agar bijak
memanfaatkan platform
media sosial dengan
tidak menyebarkan
informasi hoaks dan
sejenisnya terkait Pemilu
2024**



Bagi sivitas yang ingin menyumbangkan tulisannya dapat mengirimkannya ke email :

majalahkominfo.next@kominfo.go.id



0811-563-344



Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu, 7 Februari 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Jokowi Tegaskan Aparat Harus Netral dan Jaga Kedaulatan Rakyat pada Pemilu

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali keharusan seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2024.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Presiden dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu, 7 Februari 2024.

Presiden juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk bertindak profesional dan menjaga integritas pemilu.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," tegasnya.

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," lanjutnya.

Sepekan menjelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024, Kepala Negara mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya.

"Ya saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye.

Presiden juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk bertindak profesional dan menjaga integritas pemilu.

"Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab: Tidak, saya tidak akan berkampanye," tandasnya.



<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tegaskan-apat-harus-netral-dan-jaga-kedaulatan-rakyat-pada-pemilu/>



Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangannya kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat, 2 Februari 2024.

Presiden Jokowi: Bansos untuk Perkuat Daya Beli Masyarakat

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat penerima manfaat merupakan salah

satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara. Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sendiri.

"Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama," ujar Presiden Jokowi kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Jumat, 2 Februari 2024.

Selain itu, bansos juga diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Presiden menyebut bahwa fenomena iklim *El Nino* telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.

"BLT itu karena ada *El Nino*, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," imbuhnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita tidak seperti itu," tandasnya.



<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-bansos-untuk-perkuat-daya-beli-masyarakat/>



Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohammad Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 6 Februari 2024.

Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Presiden Jokowi Bahas Isu Bilateral hingga Internasional

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohammad Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 6 Februari 2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut ia melaporkan kepada Presiden mengenai hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Malaysia.

“Yang pertama menyangkut masalah perbatasan dengan satu komitmen kita akan mencoba menyelesaikan yang belum selesai baik untuk batas darat maupun batas laut untuk segera kita selesaikan. Karena kedua pemimpin pada saat Juni tahun lalu sudah bersepakat untuk segera menyelesaikannya,” ucap Menlu Retno kepada awak media usai pertemuan.

Menlu Retno menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai hak pendidikan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Retno pun mendorong agar *special bilateral mechanism* yang diadakan khusus membahas mengenai pekerja migran dapat segera berjalan.

“Kita juga mengingatkan kembali bahwa kedua pemimpin sudah bersepakat untuk mengadakan *special bilateral mechanism* yang khusus membahas mengenai masalah pekerja migran. Jadi saya ingatkan perlu agar *special bilateral mechanism* ini segera berjalan,” tuturnya.

Selanjutnya, Retno menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Retno menyebut, Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi.

“Hubungan perdagangan dan investasi kita dengan Malaysia cukup besar salah satu di antara yang terbesar dari negara-negara ASEAN,

dan kita juga membahas mengenai bagaimana mengoptimalkan ekonomi-ekonomi yang ada di perbatasan,” ujar Retno.

Selain isu bilateral, Retno mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai mekanisme troika dalam ASEAN dan isu internasional terhadap situasi di Gaza. Retno menyebut, Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan posisi terhadap sejumlah permasalahan.

“Kemarin kita bersama-sama menyuarkan mengenai masalah sawit dan juga masalah Deforestation Regulation yang berasal dari Uni Eropa, plus Gaza yang memang posisi kita selalu sama,” ucapnya.

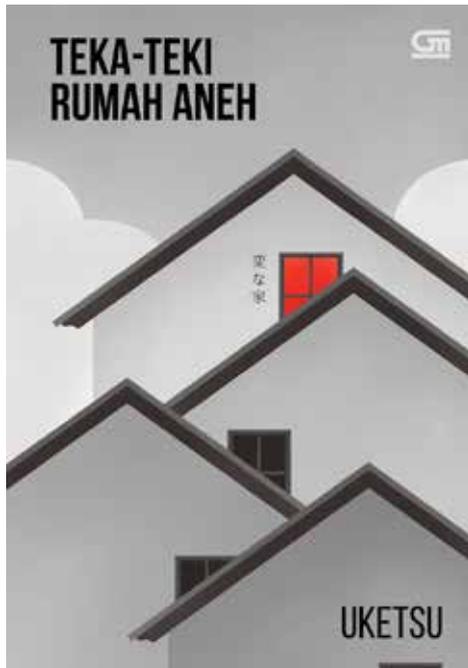
Lebih lanjut, Retno menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus berkomitmen untuk saling memperkuat hubungan kedua negara.

“Dari pihak Bapak Presiden komitmen kita untuk terus memperkuat hubungan antara kedua negara cukup kuat. Sedemikian juga dengan Pak Perdana Menteri Malaysia karena sebagai negara tetangga dekat tidak punya pilihan lain bagi kita untuk merajut kerja sama yang lebih kuat,” tutur Retno.

Menlu Retno menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai hak pendidikan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).



<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/terima-kunjungan-menlu-malaysia-presiden-jokowi-bahas-isu-bilateral-hingga-internasional/>



Teka-Teki Rumah Aneh

Penulis : Uketsu

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Kategori : Mystery, Thriller & Suspense

Seorang kenalan ingin membeli rumah bekas di Tokyo dan memperlihatkan denah rumahnya padaku karena merasa ada yang ganjil. Sekilas, rumah ini kelihatan seperti rumah-rumah lain pada umumnya dengan interior yang luas dan terang. Namun, ketika mencermatinya baik-baik, aku mendapati bahwa memang ada keanehan di sana-sini. Keanehan demi keanehan itu bertumpuk, kemudian terjalin membentuk satu "kenyataan". Kenyataan yang teramat sangat mengerikan, dan sama sekali tidak ingin kupercaya. Buku ini tersedia di Aplikasi Ruang Buku Kominfo (online).

I Want to Die But I Want to Eat Tteokpokki

Penulis : Baik Se Hee

Penerbit : Haru

Kategori : Motivation, & Self-Help

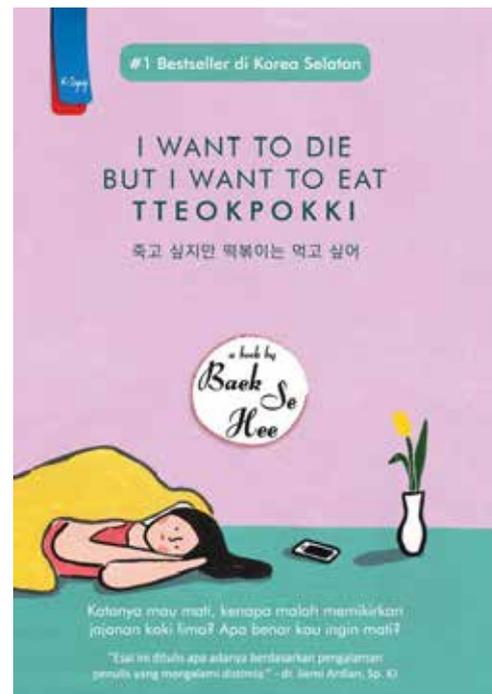
Ketika perasaan stres dan depresi dikalahkan oleh rasa lapar dan keinginan makan tteokpokki atau makanan favorit kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah memilih untuk menyerah atau makan saja dulu?

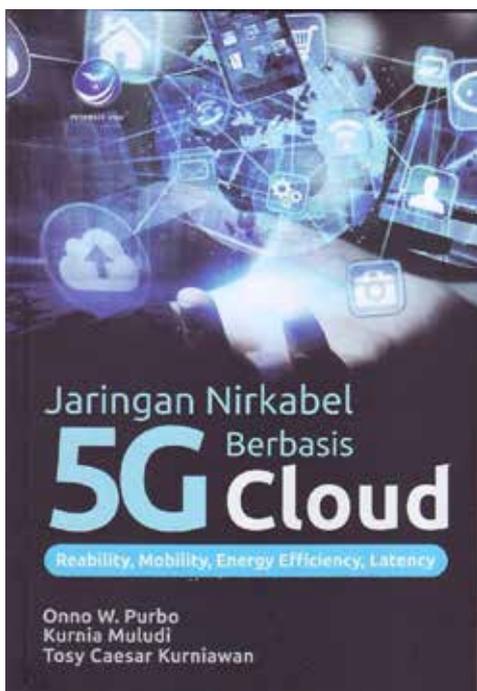
Mengambil premis menarik, Baik Se Hee selaku penulis buku ini rupanya mampu menggetarkan dunia non fiksi dengan buku motivasinya yang diangkat dengan cara unik dan menawan

Kendati dari judulnya saja terkesan seperti sedang bercanda, namun buku ini sebenarnya memiliki kisah yang sama sekali tidak bercanda.

Buku berjudul 'I Want to Die but I Want to Eat Tteokpokki' merupakan catatan pengobatan sang penulis sendiri yang dikemas sebagai sebuah buku bacaan yang menenangkan.

Buku ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Kominfo (offline) dan Aplikasi Ruang Buku Kominfo (online).





Jaringan Nirkabel 5G Berbasis Cloud : Reability, Mobility, Energy Efficiency, Latency

**Penulis : Onno W. Purbo, Kurnia Muludi,
Tosal Caesar Kurniawan**

Penerbit : Andi Offset

Kategori : Computers & Technology

Dalam beberapa tahun terakhir, komunikasi informasi dan teknologi cloud sangat familiar dan berbagai teknologi nirkabel telah berhasil digunakan. Dapat diprediksi bahwa teknologi komunikasi mobile generasi kelima (5G) yang akan datang, tidak dapat lagi ditentukan oleh model bisnis tunggal atau karakteristik teknis yang representatif.

5G adalah jaringan multi-layanan dan multi-teknologi yang terintegrasi, memenuhi kebutuhan masa depan dengan berbagai data yang besar dan perkembangan yang pesat, dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan layanan yang cerdas dan personal. 5G adalah *packet switched* nirkabel dengan cakupan wilayah yang luas dan dengan *throughput* yang tinggi. Teknologi 5G ini menggunakan *millimeter wave* yang memungkinkan pengiriman data lebih besar dari 100 Mbps pada mobilitas yang penuh, serta bisa mencapai lebih dari 1 Gbps pada mobilitas yang rendah. Seiring banyaknya perangkat yang terhubung ke web, seluruh infrastruktur perlu mengakomodasi lalu lintas untuk tidak hanya mendukung koneksi yang lebih cepat, tetapi juga menangani yang simultan dengan lebih baik dan memberikan cakupan yang lebih luas untuk perangkat ini.

Buku ini menjelaskan tentang pengembangan jaringan nirkabel, jaringan 5G, jaringan berbasis *cloud*, dan masih banyak yang lainnya. Banyak hal seputar pengembangan teknologi bisa dipelajari dari buku ini. Buku ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Kominfo (*offline*).

Ruang Buku Kominfo, Baca Buku di Genggaman *Gak Pake Ribet*

Pengetahuan yang luas dapat meningkatkan kualitas hidup. Cara termudah untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan membaca. Sayangnya, saat ini minat baca di Indonesia dinilai masih cukup rendah, terlebih dengan adanya alternatif hiburan melalui digital yang lebih menarik perhatian, walaupun tidak dapat dimungkiri bahwa masih banyak juga yang lebih nyaman membaca buku cetak.

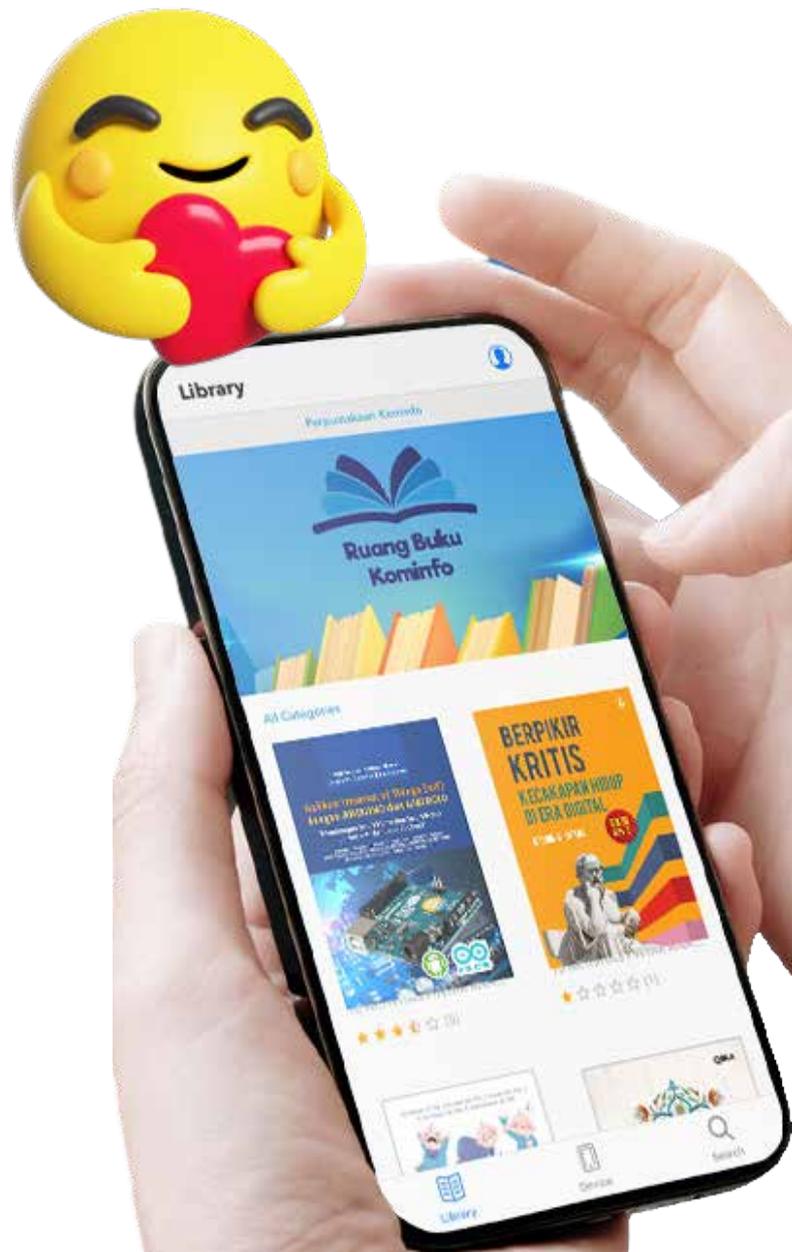
Kegiatan membaca tidak selalu identik dengan lorong-lorong panjang dengan rak-rak besar, atau kertas-kertas yang mulai menguning. Era digital saat ini telah menghadirkan beragam inovasi baru, salah satunya kehadiran perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang berbentuk *electronic library* yang memiliki koleksi buku dalam bentuk elektronik atau biasa disebut e-book. Perpustakaan digital dapat diakses di gawai kapan pun dan di mana pun.

Perpustakaan digital menyediakan beragam buku elektronik atau e-book. Perpustakaan Kominfo berjalan beriringan dengan percepatan transformasi digital yang digaungkan Kementerian Kominfo. Kehadiran e-Perpus Kementerian Komunikasi dan Informatika, nantinya akan memudahkan sivitas Kominfo untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baik terkait bidang kominfo atau bacaan ringan sebagai teman perjalanan pulang di *commuter line* ataupun angkutan umum lainnya.

Ruang Buku Kominfo adalah Aplikasi Perpustakaan Digital Kementerian Kominfo yang memberikan akses kepada anggota untuk meminjam dan membaca buku melalui

perangkat *smartphone*. Koleksi pada Ruang Buku Kominfo terdiri dari buku, majalah, koran digital, serta konten buku dan literatur bacaan lainnya yg dibuat Kementerian Kominfo.

Hadirnya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan alternatif platform yang menyediakan bacaan berkualitas dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan minat baca masyarakat.



Tata Cara Pendaftaran Ruang Buku Kominfo



Isi nama, email, dan pekerjaan melalui tautan <https://s.id/pendaftaranRBK>



Cek waiting list/status pendaftaran <https://s.id/akunRBK>



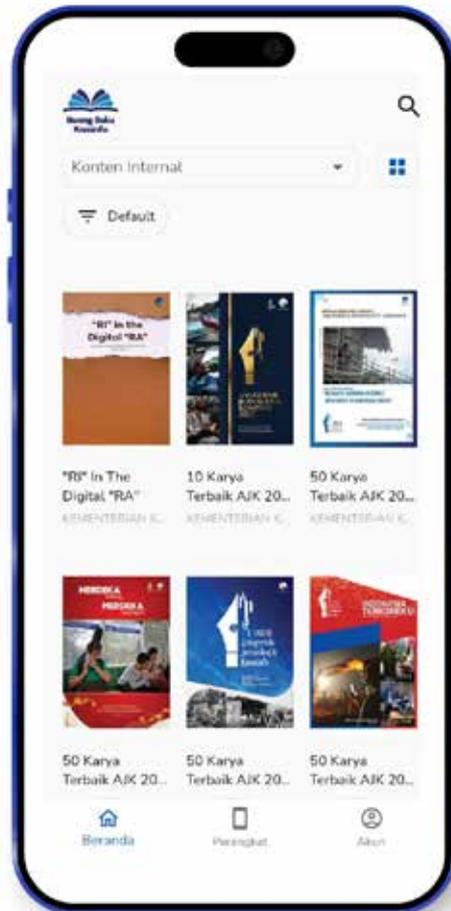
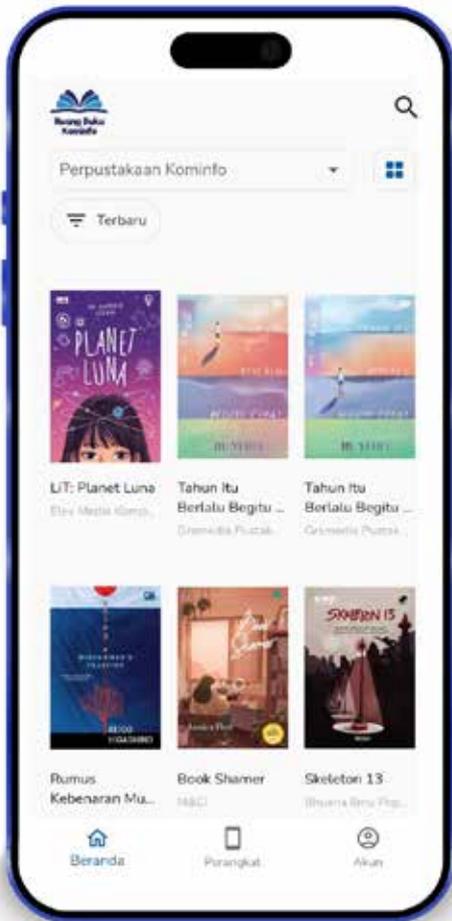
Akan ada email balasan dari Perpustakaan Kominfo berupa username/email dan password



Unduh Ruang Buku Kominfo di Appstore/Playstore



Dengan terbatasnya kuota pengguna Ruang Buku Kominfo, Perpustakaan Kominfo membuat kebijakan untuk pengguna yang sudah tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut, maka akun tersebut akan otomatis terhapus agar kuota pengguna bisa dimanfaatkan dan didaftarkan oleh pengguna lain yang sudah mendaftar di *waiting list*.



3.102 Judul Koleksi Umum

4.193 Eksemplar

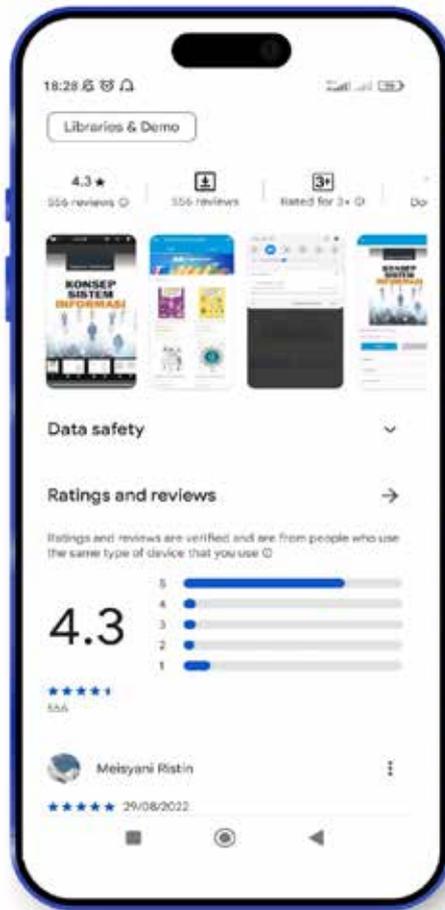
80
Judul

Koleksi Internal

Rating Ruang Buku Kominfo (Perpustakaan Digital)

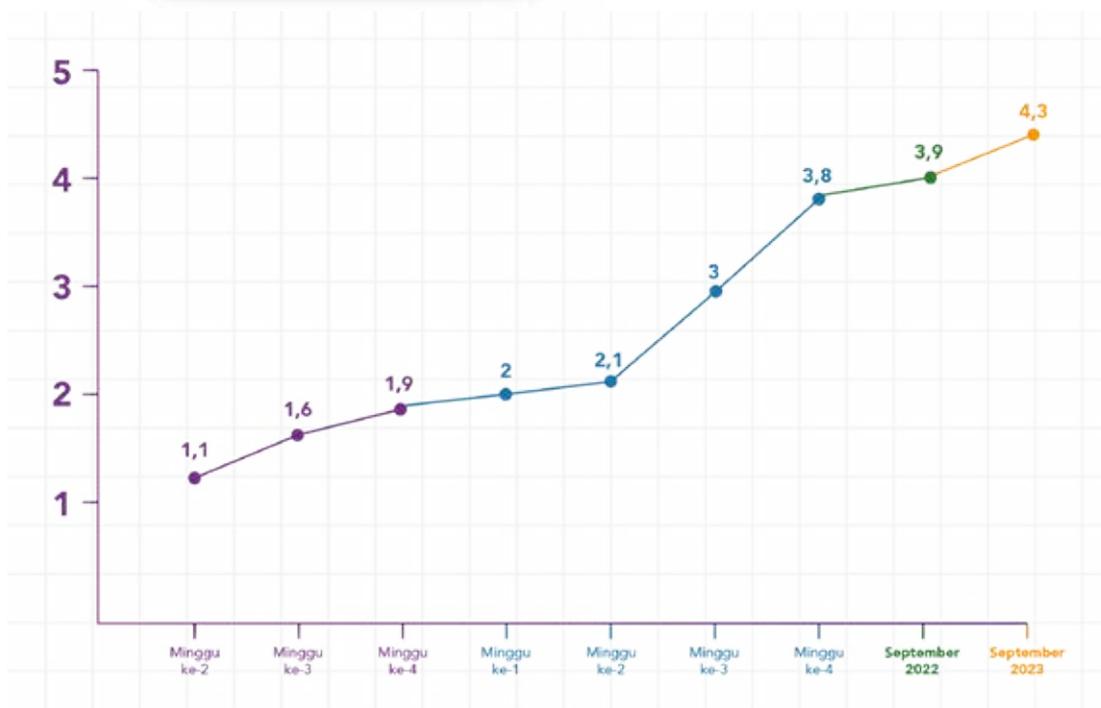
4,3/5

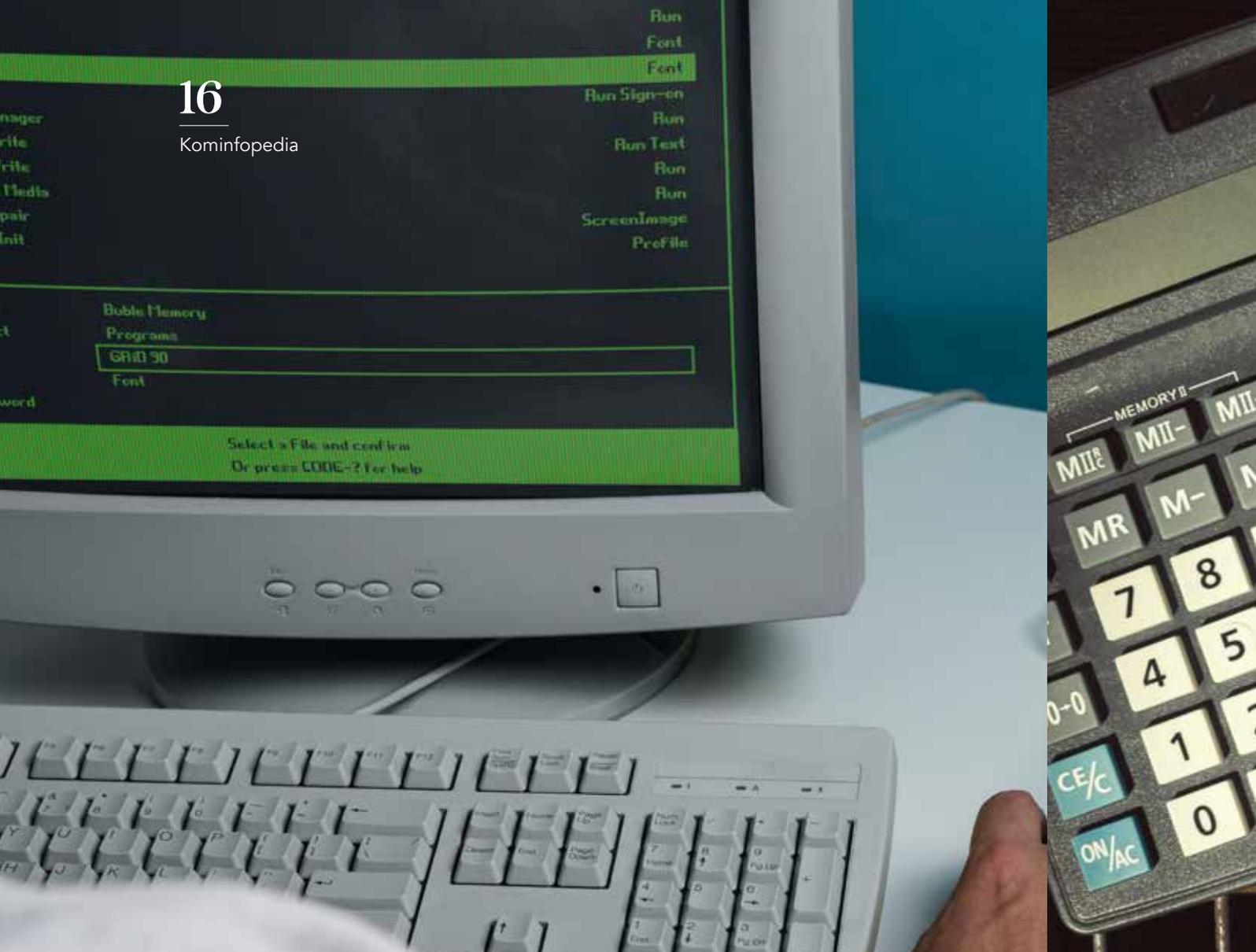




Seiring dengan peningkatan layanan melalui *fast respon* pembuatan akun, bantuan kendala login, hingga fasilitasi pengadaan ebook yang diusulkan masyarakat, saat ini Aplikasi Ruang Buku Kominfo mengalami peningkatan rating di PlayStore hingga mencapai 4.3. peningkatan rating di Playstore pada aplikasi Ruang Buku Kominfo yang pada tanggal 19 Agustus 2023 mencapai 4,3.

Rating Ruang Buku Kominfo sempat anjlok 1,1 pada periode bulan Juli 2022 dikarenakan sentimen negatif warganet, namun pelan tapi pasti, Ruang Buku Kominfo kembali *on the track* untuk memberikan layanan peminjaman buku bagi para pemustaka. (Fahmie TJ)





Sejarah Komputer

Halo SobatKom, apa kabar? Buat yang sudah punya hak pilih, udah digunakan dengan baik belum? Daripada pusing dan ujung-ujungnya berantem gara-gara beda pilihan, mending SobatKom simak Kominfopedia edisi kali ini yang akan membahas seputar sejarah komputer.

Sebelum lebih jauh ngomongin sejarahnya, kita harus sepakat dulu, apa sih komputer itu? Kata komputer sendiri pertama kali digunakan untuk manusia, diartikan sebagai manusia yang melakukan perhitungan numerik menggunakan kalkulator mekanik seperti sempoa dan mistar hitung.

Dikutip dari Etymonline, sebuah kamus etimologi online, istilah **komputer sekitar tahun 1640 diartikan sebagai "orang yang melakukan perhitungan, orang yang bertugas hitung-menghitung"**.



Dari penjelasan di Etymonline tersebut dapat disimpulkan bahwa sempoa adalah alat bantu hitung yang merupakan bagian dari komputer. Walau istilahnya baru muncul sekitar tahun 1640-an, *abacus* atau yang lebih kita kenal dengan nama sempoa sudah ada sejak kerajaan Babylon pada 2700 sampai 2300 SM. Jadi komputer itu *enggak* selamanya mengacu pada perangkat elektronik yang menggunakan listrik.

SobatKom, definisi komputer ikut berganti seiring perkembangan zaman. Dengan definisi yang modern, ternyata ada juga mekanisme yang mirip komputer modern namun tidak menggunakan listrik atau perangkat elektronik, misalnya *Antikythera mechanism* yang dipercaya sebagai komputer analog tertua. *Antikythera mechanism* diperkirakan dibuat pada sekitar tahun 100 SM. Perangkat ini didesain untuk menghitung posisi astronomi benda-benda angkasa.

Setelah *Antikythera mechanism*, komputer juga terus berkembang sebelum listrik banyak digunakan. Contoh komputer mekanik lain yang paling modern adalah *Difference Engine* karya Charles Babbage. Mesin ini berfungsi untuk mentabulasi fungsi polinomial. Walaupun didesain oleh Charles Babbage, ternyata sepanjang masa hidupnya ia tidak berhasil menyelesaikan pembuatannya. Baru pada tahun 2002, Doron Swade dan sekelompok insinyur lain di *Science Museum* di London menyelesaikan mesin tersebut menggunakan material yang hanya ada di sekitar tahun 1840an tersebut.

Melihat desain detail Babbage yang dapat berfungsi baik, sejarawan menyimpulkan bahwa jika Charles Babbage berhasil menyelesaikan *difference engine* tersebut, rancangannya pasti akan bekerja dengan baik juga. Kerennya lagi, Charles Babbage ini juga mendesain komputer mekanik lain yang menyerupai komputer modern yang dia beri nama *analytical engine*. *Analytical engine* ini memiliki "*scratch memory*" yang menyerupai RAM, punya berbagai macam output seperti bel, *graph-plotter*, dan printer sederhana. Perangkat ini juga memiliki input-output yang dapat diprogram menggunakan *punch cards* yang bisa dimodifikasi dan dibaca.

Sayangnya, berbeda dengan komputer digital modern, komputer analog kurang fleksibel dan perlu dikonfigurasi ulang secara manual untuk menyelesaikan perhitungan lain. Komputer analog waktu itu unggul dari komputer digital, karena dapat menyelesaikan masalah kompleks sementara komputer digital awal sangat terbatas.

Nah, dengan perkembangan elektronik, saat ini komputer didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat menerima data (*input*), memproses data yang menghasilkan output dan menyimpan datanya (*storage*).

Wah, panjang juga ya, padahal belum masuk pembahasan komputer digital nih. Tungguin Kominfopedia selanjutnya di edisi KominfoNext berikutnya ya, SobatKom. (Agung Windhi)



Menilik Keunggulan dan Tantangan Pemilu Elektronik (E-Voting)

Pemilu 2024 baru saja selesai diselenggarakan. Sebuah perhelatan besar yang diselenggarakan di 820 ribu TPS dan melibatkan 5,7 juta orang anggota KPPS.¹ Ini belum termasuk para pegawai di lingkungan KPU, Bawaslu, dan DKPP, baik di pusat maupun daerah. Pemerintah pun mengucurkan anggaran hingga Rp71,3 triliun untuk penyelenggaraan pesta demokrasi ini.²

Penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu tidak berakhir pada pemungutan suara saja, namun dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga nasional. Proses rekapitulasi ini berlangsung sekitar satu bulan dan dilakukan secara manual dengan menghitung kertas suara dan formulir rekap suara. Dengan banyaknya formulir yang diisi, proses ini membutuhkan waktu lama dan rentan terjadi kesalahan.

Mungkin Sobatkom ada yang bertanya-tanya, mengapa pemungutan suara masih dilakukan secara manual di tengah perkembangan teknologi yang sudah semakin maju saat ini? Kita bisa melakukan transaksi jual beli dan perbankan cukup dengan gawai kita tetapi kenapa Pemilu masih menggunakan kertas dan paku?

Di era digital saat ini sudah ada metode pemungutan suara elektronik atau yang biasa disebut e-voting. Di Indonesia, e-voting sudah digunakan oleh beberapa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di berbagai wilayah. Namun, masih belum dimungkinkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu. Mengapa demikian?

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nv9jd4xd3o>

² <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi#:~:text=Untuk Pemilu 2024%2C Kementerian Keuangan,bertambah menjadi Rp30%2C0 triliun.>

Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu e-voting itu apa. *Sistem Electronic Voting* (e-Voting) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara, dan menghasilkan perhitungan suara.³ Keuntungan penggunaan e-voting diantaranya adalah penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan efektif dan efisien, tidak ada suara yang rusak, akurasi perhitungan yang tinggi, tidak ada duplikasi data pemilih, dan menghemat biaya dalam jangka panjang.⁴

Sistem e-voting sebetulnya bukan hal baru, pada tahun 1838 di Inggris sudah dilakukan pemungutan suara untuk parlemen dengan menggunakan mesin sederhana. Mesin ini memiliki lubang sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih. Pemilih yang menunaikan hak pilihnya memasukkan sebuah bola ke dalam salah satu lubang sesuai calon yang dipilih untuk kemudian dihitung secara otomatis.⁵ Pada tahun-tahun berikutnya, mesin yang digunakan terus berkembang namun masih menggunakan sistem mekanik.

Mesin e-voting yang menggunakan sistem elektronik dan komputer pertama digunakan pada tahun 1974 di Chicago, Amerika Serikat.⁶ Mesin e-voting ini memiliki beberapa tombol, layar, dan rangkaian elektronik untuk menghitung suara yang dipilih mirip seperti mesin ATM yang biasa kita gunakan untuk transaksi perbankan.

Dibalik semua keunggulan yang ada, ternyata hanya sedikit negara yang menerapkan e-voting. Bahkan di negara-negara tersebut proses pemungutan suara tidak sepenuhnya menggunakan e-voting, tetapi metode manual masih tetap digunakan. Beberapa negara tersebut diantaranya Estonia, India, Korea Selatan, dan negara tetangga kita Filipina.⁷

Lalu apa yang menjadi hambatan negara-negara di dunia menyelenggarakan e-voting? Masalah terbesar adalah tentang keamanan data dan pengawasan hasil pemungutan suara. Meskipun bisa diketahui secara instan hasilnya pasca pemungutan suara, namun masih dimungkinkan adanya manipulasi data oleh orang yang mempunyai akses ke dalam sistem ataupun peretas dari luar.⁸

Selain itu, penyelenggaraan e-voting membutuhkan infrastruktur listrik, komputer, dan internet serta SDM yang memadai. Hal ini belum tentu tersedia di semua wilayah terlebih di negara yang luas seperti Indonesia. Jika kita melihat regulasi yang ada pun, saat ini belum tersedia aturan yang memungkinkan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada secara elektronik.

Kita tentunya berharap teknologi yang semakin berkembang bisa membuat sistem e-voting lebih mudah dan murah serta aman dari manipulasi data. Jika Pemilu bisa diselenggarakan dengan lebih efisien tentunya dapat mengurangi beban kerja dan anggaran penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan ini. **(Adhi Sakti)**



³ <https://www.inti.co.id/?p=5848>

⁴ <https://www.inti.co.id/?p=5848>

⁵ <https://homepage.divms.uiowa.edu/~jones/voting/pictures/>

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/DRE_voting_machine

⁷ <https://www.merdeka.com/politik/potret-e-voting-negara-negara-dunia-indonesia-pilih-mana.html>

⁸ <https://lan.go.id/?p=9942>



Sejarah Pemilu

Gagasan untuk membentuk pemerintahan demokratis di awal kemerdekaan telah disiapkan sejak pekan-pekan awal setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945, dengan keinginan untuk menyelenggarakan Pemilu Indonesia yang bebas.

Dalam dinamika politik sebuah negara, pemilihan umum atau pemilu memiliki peran yang sangat penting sebagai pondasi demokrasi. Pemilu menjadi sarana bagi warga negara untuk menentukan arah pemerintahan dan mewujudkan tujuan politik. Namun, perjalanan panjang sejarah pemilu tidaklah selalu mulus. Di setiap negara, proses pemilu telah melalui berbagai tantangan, perubahan, dan transformasi yang mencerminkan evolusi masyarakat dan sistem politiknya.

Begitupun di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia digelar pertama kali pada tahun 1955, di saat Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional. Sejatinya, sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946.

Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian nyatanya Pemilu pertama tersebut baru terselenggara, berarti hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.



Namun, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu tahun 1955 diselenggarakan dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Lalu kedua, pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan bulan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, namun tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut disebabkan beberapa kendala. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Sementara penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Mengutip dari situs Perludem.org milik organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, gagasan untuk membentuk pemerintahan demokratis di awal kemerdekaan telah disiapkan sejak pekan-pekan awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945, dengan keinginan untuk menyelenggarakan Pemilu Indonesia yang bebas.

Terdapat sembilan langkah yang ditempuh Indonesia untuk melahirkan pemerintahan konstitusional. Pertama, memperluas partisipasi politik yang disampaikan oleh Sutan Syahrir pada Oktober 1945. Kedua, memberi kekuasaan legislatif kepada wakil-wakil rakyat, ditandai dengan terbitnya Maklumat No. X 16 Oktober 1945. Ketiga, menolak pemerintahan otoriter, lalu keempat, memelihara kemerdekaan ke luar. Kelima, bertekad untuk menjamin kebebasan ke dalam, dan keenam, bertekad untuk menjamin asas-asas universal pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketujuh, membentuk sistem multipartai. Delapan, menetapkan pertanggungjawaban pemerintah kepada wakil rakyat, serta terakhir, pengakuan terhadap asas pemilihan bebas.

Gagasan Awal Pemilu dalam Konstitusi

1.

UUD 1945 (18 Agustus x1945 - berlakunya konstitusi RIS 1949)

2.

Konstitusi RIS 1949 (1949-UUDS 19450);

3.

UUDS 1950 (1950-5 Juli 1959)

4.

UUD 1945 (5 Juli 1955 - dilaksanakan amandemen mulai 1999-2002)

UUD 1945 tidak memiliki pengaturan terkait Pemilu, namun hanya mengatur tentang susunan dan kedudukan DPR pada Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945;

Sementara itu dalam Konstitusi RIS 1949 terdapat beberapa pasal yang memberikan pengaturan tentang Pemilu, di antaranya Pasal 34 terkait asas pemilihan dan Pasal 111 terkait waktu pelaksanaan Pemilu.

Kemudian dalam UUDS 1950, terdapat beberapa ketentuan terkait Pemilu: yakni Pasal 35 UUD 1950 tentang asas-asas pemilu, dan Pasal 135 Ayat (2) UUDS 1950 tentang pemilihan anggota konstituante;

1. Pasal 57 tentang Pemilihan Anggota DPR;

2. Pasal 60 tentang syarat anggota DPR;

3. Pasal 135 Ayat (2) tentang Pemilihan Anggota Konstituante;

4. Pasal 23 Ayat (1) Hak untuk dipilih dalam pemilu

5. Pasal 35 tentang prinsip dan asas pemilu

Setelah dilakukan amandemen pada UUD 1945, pengaturan pemilu dalam konstitusi tersebut mencakup Pasal 2 Ayat (1) tentang Pemilihan MPR; Pasal 6A Ayat(1) tentang Pencalonan Presiden; Pasal 18 Ayat (3) tentang DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pasal 18 Ayat (4) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan terakhir Pasal 22 E yang memiliki Bab Khusus Pemilu dan terdiri dari 6 ayat.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil ,serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian

dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Pemilu 1955 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, dengan anggota paling sedikit lima dan paling banyak sembilan anggota. Panitia Pemilihan Indonesia ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sementara PPI di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Lalu, untuk PPI di Kabupaten dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri. (Viska)

Sumber: https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955

<http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf>

Bentuk Satgas Pelaksana Distribusi Logistik dan Perlengkapan, Ini Beragam Kesiapan Kominfo Dukung Pemilu 2024



Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung menyatakan PT Pos Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung Pemilu. Salah satunya dengan pembentukan satuan tugas pelaksana distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu, sembari menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

“Sebagai vendor distribusi, PT Pos menggunakan Aplikasi Silog KPU untuk memastikan teknis operasional sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPU,” ungkapnya.

Guna memenuhi kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penyediaan jaringan pos

di 514 kabupaten dan kota serta 49,20% dari 7320 kelurahan memiliki titik layanan pos.

“Jaringan pos juga telah mencakup 100% kelurahan di Indonesia. Beberapa penyelenggara pos juga ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-katalog, salah satunya adalah PT Pos Indonesia,” jelas Gunawan Hutagalung, saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa (23/01/2024).

Menurut Direktur Gunawan Hutagalung, dukungan tersebut untuk mendukung arus informasi dan arus barang. Ada perbedaan antara pergerakan arus ruang dan barang.



Guna memenuhi kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta 49,20% dari 7320 kelurahan memiliki titik layanan pos.



“Kalau pergerakan orang kan tugasnya Kementerian Perhubungan, sedangkan arus barang maka kita mengenal sistem logistik. Logistik adalah proses manajemen dari pengiriman yang mencakup persediaan pengiriman, pengelolaan dari sistem komunikasi dan informasi dalam pengiriman, pengelolaan sumber daya manusia,” jelasnya.

Direktur Gunawan Hutagalung menyatakan, dalam hal logistik diselenggarakan oleh penyelenggara pos, Sementara itu, penyelenggara jasa pengangkutan diatur oleh Kemenhub.

“Jadi, Kominfo itu tugasnya mengawasi tugas dari penyelenggara pos karena salah satu layanan pos adalah logistik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gunawan Hutagalung mengatakan pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas.

“Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pos dinas lainnya ini adalah penyelenggara pos yang harus memenuhi kriteria-kriteria standar pengiriman dan manajemen pengiriman untuk keperluan pemerintah, salah satunya itu untuk keperluan Pemilu,” ujar Gunawan.



Dengan ketentuan itu, maka terjamin kualitasnya pengiriman pemerintah. Selanjutnya, instansi pemerintah akan menunjuk siapa saja penyelenggara pos untuk melakukan proses pengiriman.

"Jadi prosesnya itu kita telah menyiapkan regulasi, bagaimana pengiriman Pemilihan Umum 2024 harus dilakukan dengan berkualitas. Contohnya, kita mengatur bahwa barang hilang kiriman Pemilu itu harus nol. Artinya, tidak ada toleransi untuk *lost and broken*," jelas Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung.

Direktur Gunawan menilai setelah ada standar itu nantinya siapapun yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan proses

pengiriman tersebut melalui penyelenggara pos, maka penyelenggara pos yang ditunjuk wajib tunduk terhadap standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.

"Jadi, standarnya harus memenuhi seluruh titik-titik pengiriman dengan standar waktu pengiriman (SWP) harus sesuai, *lost and broken* atau hilang dan rusak harus nol persen," ungkapnya.

Saat ini, kata Direktur Gunawan, KPU telah menunjuk percetakan kertas suara-suara. "Di dalamnya termasuk juga nanti di KPU daerah, menunjuk siapa yang akan menghantarkan percetakan. Dengan kata lain, percetakan itu tidak terpusat. Bisa percetakan yang berlokasi di Jakarta, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan," tuturnya.

Berperan jadi Regulator untuk Penuhi Kualitas Pengiriman Logistik Pemilu

Tahapan selanjutnya KPU yang akan menunjuk siapa yang membawa kertas suara ini ke masing-masing KPU daerah. Terkait dengan prosesnya, menggunakan e-katalog. Salah satu yang sudah ditunjuk yakni PT Pos untuk mengantar kertas suara itu ke KPUD-KPUD. Tugasnya Kominfo hanya memonitor agar PT Pos dapat memenuhi kriteria-kriteria kualitas dan standar waktu pengiriman sebagaimana yang ditetapkan Menteri Kominfo.

“Sedangkan PT Pos sebagai operator. Kita memonitor standar kualitas layanannya untuk memastikan KPU memperoleh layanan yang terbaik untuk pelaksanaan pemilu ini. Itulah perannya Direktorat Pos Ditjen PPI, jadi kita berkoordinasi dengan PT Pos untuk memantau apakah mereka memenuhi kriteria tadi, tidak hilang dan waktu pengiriman harus dilakukan sesuai dengan standar waktu pengiriman,” papar Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung.

Direktur Gunawan menjelaskan, Direktorat Pos Ditjen PPI Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Biro Umum KPU untuk memastikan pengiriman logistik pemilu berjalan dengan optimal dan berkualitas.

“Jadi, kalau umpamanya ada keluhan, dari KPU bisa ke penyelenggara posnya karena kiriman pemerintah. Kita bisa menegakkan aturan-aturan kiriman pemerintah ke mereka,” ungkapinya.



Kementerian Kominfo berperan sebagai regulator, tidak melakukan operasional di lapangan karena wewenang tersebut merupakan tugas KPU, pihak percetakan dan penyelenggara pos.

“Kita memonitor penyelenggara pos, bagaimana mereka memenuhi kualitas pelayanannya. sekarang, kami dalam posisi memantau para penyelenggara pos yang mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam melakukan pengiriman logistik Pemilu, karena ada pula yang melakukan pengiriman jasa pengangkutan, izinnya diterbitkan Kementerian Perhubungan. Fungsi kita seperti itu di sini. Jadi, kita sudah merancang regulasi tentang proses-proses logistik itu dan telah ditandatangani oleh Menteri Kominfo,” jelas Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai di mana masyarakat dapat mengakses SILOG, apakah ada fitur-fitur seperti jumlah TPS pada setiap provinsi dan kabupaten/kota, panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, serta kebutuhan logistik lainnya



SILOG hanya digunakan untuk keperluan monitoring dashboard logistik, bukan untuk publik.

dapat diakses melalui aplikasi tersebut, Direktur Gunawan menegaskan SILOG hanya digunakan untuk keperluan memonitoring dashboard logistik, bukan untuk publik.

“KPU menggunakannya (SILOG) untuk memonitor APK-nya Pemilu sudah sampai di mana. Publik tidak bisa mengaksesnya. kita tidak turut di situ, dan itu sangat *secure*. Informasinya tentang rahasia negara, tidak ada satupun pihak lain yang mengetahui selain KPU sebagai penyelenggara Pemilu. mereka sudah punya juga perjanjian kerahasiaan data sebagai lembaga independen,” tegasnya.



© 2024 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO



KPU
PEMILU
TAHUN 2024

Mitigasi untuk Jaga Kualitas Layanan

Menurut Direktur Gunawan, Kementerian Kominfo dalam hal ini posisi pasif. *In-case* jika terjadi kendala, Direktorat Pos Ditjen PPI melakukan mitigasi terhadap penyelenggara pos.

“Kita tidak boleh terlalu mengintervensi mereka mereka, tetapi, di awal kita sudah merancang bagaimana seluruh kualitas layanan itu harus dilakukan oleh penyelenggara pos,” ungkapnya.

Kertas suara itu hanya untuk KPU, memastikan sudah sampai dengan standar waktu pengiriman,” ujarnya menyontohkan.

Setelah diterima oleh titik point (KPUD atau panitia pemilihan di kecamatan), kemudian diperiksa, lengkap semua, lalu dikirim. Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa tidak ada kertas suara yang rusak maupun hilang.



Gunawan melanjutkan, meski SILOG bersifat informasi rahasia, namun publik bisa memperoleh informasi mengenai ketersediaan kertas suara dan lain-lain di TPS melalui sistem informasi lainnya.

“Jadi, SILOG itu adalah sistem logistik manajemen pemilu yang berfungsi sebagai dashboard untuk memantau pergerakan kertas suara, logistik pemilu dan perlengkapan-perengkapan pemilu. Kita bisa mengetahui umpamanya si A sebagai pengirim kertas suara ke KPUD-KPUD atau panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Itu hanya untuk keperluannya KPU. Masyarakat tidak bisa memantau karena rentan informasinya. Apabila diketahui semua orang, tiba-tiba ada truck begitu, di-bomb, bahaya.

“Nah, SILOG ini bagaimana cara kerjanya? Ini SILOG-nya KPU, sistem logistiknya operator umpamanya PT Pos akan terhubung secara API. Jadi seluruh pergerakan armadanya PT Pos, karena sudah terhubung dengan *Application Programming Interface* (Antarmuka Pemrograman Aplikasi), maka terhubunglah ke SILOG ini. Tetapi, bukan untuk masyarakat ketahui. Sebab, jika sewaktu-waktu untuk memastikan proses pengiriman logistik berjalan dengan baik, kita tinggal mengkonfirmasi ke KPU apakah pengiriman logistik yang dilakukan penyelenggara pos ada masalah atau tidaknya,” tutur Direktur Pos Gunawan Hutagalung.

Direktur Gunawan melanjutkan, apabila terjadi kendala Kementerian Kominfo akan melakukan mitigasi dengan penyelenggara pos. Menurutnya, hal itu diperlukan guna menjaga kualitas pelayanan yang harus dipenuhi.

“Tetapi, penyelenggara pos itu sudah siap, termasuk PT Pos, untuk memenuhi standar waktu pengirimannya, karena ini kan urusan negara,” ujarnya.

Bahkan, Kementerian Kominfo telah mempersiapkan diri untuk memberikan dukungan logistik Pemilu ini dengan menyusun regulasinya. “Seperti yang tadi saya bilang regulatif pelaksanaan pos dinas lainnya, yaitu layanan logistik pemerintah. Kita mengatur seluruh ketentuan persyaratan menjadi seperti apa? Jadi, untuk menjadi penyelenggara logistik pemerintah tidak sembarangan.

Menurut Direktur Gunawan, ada kriteria yang disiapkan seperti misalnya harus tersebar di seluruh Indonesia, mempunyai armada sekian banyak, memiliki kelengkapan-kelengkapan operasional yang telah ditentukan hingga jumlah CCTV pun harus diatur 100%.

“Nah, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, dalam prosesnya KPU menunjuk satu operator. Jadi, kita hanya melakukan persiapan di depan. Setelah itu ditetapkan sebagai peraturan, regulasinya mengacu semua termasuk KPU,” jelasnya.

Dalam proses implementasi saat ini, Kementerian Kominfo memantau dan melakukan kesiapan untuk mitigasi. “Kalau ada masalah, baru kita memitigasinya ke operator untuk mengingatkan. Kalau KPU itu kan lembaga independen, tidak bisa terlalu dalam kita masuk, apalagi isunya sensitif dan mereka ini kan punya Kepala Biro Umum, divisi logistik dan lain sebagainya. Kementerian Kominfo tugasnya hanya menetapkan regulasinya saja,” ungkap Direktur Pos Gunawan Hutagalung

Direktur Pos Ditjen PPI Kominfo Gunawan Hutagalung berharap proses pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang berjalan dengan baik dan pengiriman logistik dilakukan tepat waktu.

“Kita berharap apabila nanti ada pengangkutan kembali semua kertas-kertas suara pada saat setelah rekapitulasi bisa berjalan dengan baik, karena logistik itu bukan mengangkut suatu barang ke satu titik ke titik lain seperti mengatur ketersediaan, sistem informasinya, pergudangan, mengatur ini - itu semua adalah layanan. Bukan hanya yang satu mengangkut sini, mengangkut situ (itu namanya pengangkutan). Tetapi, kalau logistik itu termasuk menyiapkan sistem logistik yang *head-to-head* dengan SILOG.

Menurut Gunawan, apabila seseorang mengangkut barang tanpa adanya sistem informasi, hal itu bukan penyelenggara logistik, melainkan sama halnya dengan pengangkutan barang dengan truk yang berada di jalan tol.

“Itulah yang kita harapkan. Ke depannya, kami berharap pemerintah makin percaya dengan penyelenggara pos untuk melakukan dan mengadakan logistiknya pemerintah,” harapnya. (Yusuf)





Peran PIP Penting Bantu Sukseskan Pemilu

Foto Jadi Ujung Tombak
Penyebar Informasi,

PIP adalah kepanjangan tangan Kominfo di daerah-daerah 3T atau wilayah-wilayah yang tidak terjangkau media, ada internet tetapi mungkin tidak bagus, bahkan ada yang tidak ada internet. Jadi pola komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi tatap muka.



Penyuluh Informasi Publik (PIP) menjadi ujung tombak penyebaran informasi publik ke seluruh pelosok negeri. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menyatakan keberadaan PIP telah membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi program dan isu strategis ke masyarakat yang masih memerlukan bentuk-bentuk komunikasi tatap muka, salah satunya dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“PIP adalah kepanjangan tangan Kominfo di daerah-daerah 3T atau wilayah-wilayah yang tidak terjangkau media, ada internet tetapi mungkin tidak bagus, bahkan ada yang tidak ada internet. Jadi pola komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi tatap muka. Umumnya bertemu langsung dengan masyarakat. Peran PIP penting, justru sebagai garda terdepan dalam berkomunikasi dengan masyarakat karena berkomunikasi secara langsung, sedangkan kalau kita yang berada di perkotaan istilahnya *mediated communication* atau komunikasi yang termediasi. Kalau mereka kan bertemu langsung, jadi perannya sebagai ujung tombak sehingga perannya sangat penting ketimbang kita yang di pusat ini hadir lewat media,” jelasnya saat berbincang dengan Tim Majalah KominfoNext di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (24/01/2024).

Menurut Dirjen Usman Kansong, secara berkala Kementerian Kominfo memberikan bekal informasi yang dapat menjadi bahan bagi PIP. Sebelumnya, bimbingan teknis mengangkat tema Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024. Selanjutnya, informasi itu sudah mulai didiseminasikan PIP di seluruh Indonesia.

“Kita membekali mereka dengan wawasan tentang Pemilu. Kita bekal dan memberikan bahan-bahan yang oleh dia bisa dipelajari. Kalau cuma dengar, kan mungkin lupa. Kita berikan bahan-bahan tertulis, lalu kemudian itulah yang menjadi bahan bagi mereka untuk menyampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan misalnya di Bali, Makassar, Medan, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dirjen Usman Kansong menyontohkan pembekalan bimtek berupa sejumlah materi paparan dengan tiga tema utama seperti ajakan menggunakan hak pilih agar masyarakat jangan golput, edukasi untuk berhati-hati dengan segala bentuk informasi yang berseliweran, terutama lewat media sosial, dan literasi digital supaya pemilih tidak mudah terpapar hoaks Pemilu.

“Ada beberapa tema yang kita bekal ke PIP ini. Pertama, yang paling penting adalah mengajak mereka untuk berpartisipasi. Artinya, jangan sampai golput. Kedua, kita ajak mereka untuk berhati-hati dengan berbagai informasi yang berseliweran, terutama lewat media sosial. Hoaks tidak harus lewat medsos, bisa dari mulut ke mulut dan seterusnya. Hoaks sudah jelas menyebabkan perpecahan, polarisasi masyarakat. Jadi, kalau



kampanye diseminasi informasi anti hoaks itu berhasil, maka akan mengurangi potensi konflik dan tercapailah Pemilu damai. Nah, yang ketiga, kita mengedukasi mereka untuk anti politik uang,” jelasnya.

Dirjen Usman Kansong menyatakan materi lain yang tidak kalah penting adalah isu mengenai praktik politik uang yang kerap terjadi. Direktur Jenderal IKP Kominfo melanjutkan, anti politik uang juga erat kaitannya dengan legitimasi Pemilu.

“Legitimasi Pemilu bisa diartikan orang berpartisipasi secara sukarela, bukan dimobilisasi karena uang, sehingga akan meningkatkan kredibilitas Pemilu kita. Apabila kredibilitasnya tinggi, maka saya kira enggak akan terjadi huru-hara. Itu yang kita lakukan,”

Tema-tema tersebut kemudian dirajut dalam pesan besar yang dinamai lewat narasi Pemilu damai.



**Legitimasi
Pemilu bisa
diartikan orang
berpartisipasi
secara
sukarela, bukan
dimobilisasi
karena uang,
sehingga akan
meningkatkan
kredibilitas
Pemilu kita.**



“Pemilu damai itu kalau partisipasi politik tinggi, kita berharap legitimasinya jadi makin tinggi. Jika legitimasinya tinggi, maka akan damai,” harap Usman Kansong.

Dirjen Usman Kansong menyatakan Program PIP merupakan upaya Kementerian Kominfo memberikan informasi kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau infrastruktur telekomunikasi. Program yang telah berjalan sejak tahun 2017 itu melibatkan Kementerian Agama dengan pemberdayaan Penyuluh Agama.

“PIP ini kan, sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat. Penyuluh-penyuluh dari berbagai agama kita kumpulkan. Seperti contoh, waktu kegiatan di Medan, ada beragam pemuka agama yang berasal dari Nias, dari mana-manalah, kampung-kampung yang kita enggak kenal namanya. Itu mereka setiap hari berinteraksi dengan masyarakat. Ada yang berprofesi sebagai guru agama islam, kristen, atau agama yang lain. Mereka sudah dikenal masyarakat sekitar dan salah satu kesuksesan komunikasi, memang kedekatan itu menjadi penting,” ungkapanya.

Dengan bertatap muka, maka bisa lebih berempati kepada mereka. “Karena itu, kenapa kita menggunakan penyuluh-penyuluh agama dari Kemenag? Antara lain, karena dia sudah dikenal bahkan mungkin menjadi bagian dari masyarakat tersebut,” tutur Dirjen Usman.

Secara berkala, PIP menyebarluaskan informasi berbagai program dan kebijakan yang menysasar langsung ke masyarakat agar lebih mudah dipahami dengan baik, tepat guna dan memberikan manfaat optimal.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal IKP Usman Kansong mengatakan, selain PIP Kementerian Kominfo turut melibatkan komunitas informasi.

“Komunitas informasi ini, inisiatifnya justru datang dari masyarakat. Contohnya, mereka ajukan ‘saya mau bikin *camp*’. Kalau dulu namanya Kelompencapir, yang merupakan singkatan dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa. Itupun kita dorong mereka untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan informasi tentang Pemilu,” ujarnya.

Gencar Edukasi Intensif

Guna mendiseminasikan informasi mengenai Pemilihan Umum Serentak 2024 secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Kominfo pun gencar melakukan edukasi intensif kepada para Penyuluh Informasi Publik (PIP).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyatakan edukasi yang diberikan menjadi bekal bagi para PIP untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam Pemilu 2024 dengan meninggalkan politik SARA, mengkampanyekan antihoaks, antisipasi SARA hingga memeriksa calon yang akan dipilih dengan seksama.

“Materi pembekalan kepada PIP dilakukan melalui metode diskusi, biasanya dalam bentuk paparan atau tanya jawab. Jadi mereka kita kumpulkan di suatu tempat, kemudian kita berikan materi oleh para narasumber yang kompeten seperti misalnya untuk kepentingan Pemilu, pembicaraannya kita hadirkan dari Bawaslu dan KPU (penyelenggara Pemilu),” jelasnya.

Namun, jika masih membutuhkan informasi tambahan seputar Pemilu, para PIP juga bisa menghubungi Kementerian Kominfo melalui email maupun Whatsapp.

“Mereka mungkin memang harus menempuh perjalanan dulu barangkali dari satu desa ke

kantor kecamatan yang ada jaringan internetnya, mereka bisa juga meminta materi dari kita kalau ada yang dia butuhkan itu tidak ada dalam dihapus paparan misalnya. Kan, setelah paparan mereka juga diberikan materi diskusi berupa *softcopy* atau *hardcopy*. Misal, ada yang saya butuhkan lebih lagi atau mereka mau bertanya bisa kapan saja, jadi ada dua pola,” ungkap Dirjen Usman.

Lebih rinci, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyatakan Kementerian Kominfo kerap mengingatkan kepada PIP agar edukasi terkait Pemilu damai 2024 kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti aturan peraturan perundang-undangan.

“Kita sentil pikiran dan emosinya, biasanya juga ada non-teknis selain materi paparan tentang bagaimana sih cara menyampaikannya, bagaimana emosinya juga muncul bahwa itu hak kita untuk memilih orang untuk memimpin negara ini tetapi kita juga memberikan rambu-rambu atau batasan kepada mereka. Kita imbau agar jangan mereka lakukan kampanye buat paslon tertentu.

“Tentu edukasi harus sesuai aturan perundang-undangan. Ayo coblos gunakan hak pilih sebagai Warga Negara Indonesia. Bukan ayo pilih si A, B, atau C. Itu juga kita beritahu rambu-rambunya kepada mereka, walaupun mereka ini kan umumnya belum ASN,” imbaunya..

Selain materi bahan paparan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik juga memberikan



insentif - insentif guna menopang kinerja para PIP lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.

“Biasanya berupa sarana komunikasi semisal telepon genggam (*handphone*). Kita kasih hadiah kepada mereka untuk bersemangat bekerja. Honorinya tidak besar, tetapi saya kira bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Bahkan, setiap tahun adapula semacam *award* buat dua orang penyuluh informasi yang terbaik,” ungkap Dirjen Usman.

Secara berkala, PIP menyebarluaskan informasi berbagai program dan kebijakan yang menysasar langsung ke masyarakat agar lebih mudah dipahami dengan baik, tepat guna dan memberikan manfaat optimal.

“Kita sampaikan bahwa Pemilu itu penting. Pemilu merupakan hak untuk kita jalankan. Kalau kita jalankan, artinya ikut menentukan nasib bangsa Indonesia dalam lima tahun kedepan,” tutur Dirjen Usman.

Pantau Kinerja PIP Lewat Sistem Pelaporan

Selain memberi edukasi kepada PIP, Kementerian Kominfo memberi pelatihan dengan Teknik tertentu agar komunikasi antar para penyuluh informasi dengan masyarakat bisa berhasil.

“Namun demikian, kita berikan rambu-rambu supaya tidak kebablasan. Potensi seperti itu kan, harus kita jaga karena setiap orang punya preferensi politik masing-masing. Jadi kita punya sistem pelaporan untuk memantau kinerja para PIP. Ketika mereka usai melakukan suatu kegiatan diseminasi informasi, mereka harus melaporkan berupa resume, kemudian juga jumlah orang yang mereka suluh. Mereka ini kan datang ke suatu tempat, bukan datang *door-to-door* ke sini, berapa orang pesertanya mereka bisa menyertakan, ambil dokumentasi gambar kegiatan, kemudian dilaporkan ke sistem kita. Jadi sudah serba digital pemantauan dan pelaporannya, karena teknologi Indonesia sudah semakin luas dan berkembang, jadi gak kita cek mereka satu persatu (*by system*),” papar Direktur Jenderal IKP Kementerian Kominfo.

Sebagai *Key Opinion Leader* di lingkungan tempat tinggal, PIP dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda. Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo hal itu dilatari faktor kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitas masing-masing.

“Tentu kita memohon kepada teman-teman PIP untuk terus membantu bangsa dan negara ini dalam memenuhi hak masyarakat akan informasi. Tugas PIP itu mulia, karena memenuhi hak asasi manusia yang mungkin imbalannya tidak seberapa tetapi dengan dedikasi, semangat untuk membantu bangsa ini, mudah-mudahan tidak ada masyarakat Indonesia yang tertinggal informasinya dalam segala hal, termasuk dalam konteks ini adalah Pemilu,” harapnya.

Hingga tahun 2023, Kementerian Kominfo telah melibatkan sekitar 600-an orang PIP yang aktif bertugas mendiseminasikan informasi berbagai program dan kebijakan strategis Pemerintah dari Sabang hingga Merauke.

“Tidak banyak tetapi mungkin kita bisa galang untuk katakanlah melaporkan. Bahkan, kami sampaikan potret saja kalau ada pelanggaran-pelanggaran hasil pemilu. PIP ini adanya di 3T, itu yang kami lakukan,” tandas Dirjen Usman Kansong. (Yusuf)

”

Tidak banyak tetapi mungkin kita bisa galang untuk katakanlah melaporkan. Bahkan, kami sampaikan potret saja kalau ada pelanggaran-pelanggaran hasil pemilu.



Hoaks hingga Mal Informasi Picu Polarisasi Politik, Lewat Literasi Digital Kominfo Siapkan Strategi Preventif

Konsep literasi digital berkaitan erat dengan media digital, dalam hal ini penggunaan media internet dan berbagai teknologi yang terhubung dengan internet. Penggunaan media digital belakangan ini menjadi kebutuhan dalam setiap aktivitas yang menuntut pemerolehan informasi yang begitu cepat.



Kemunculan internet yang menyediakan akses informasi yang cepat dan senantiasa diperbaharui setiap saat, membuka jalan bagi setiap individu mendapat akses terhadap sumber daya informasi digital sangat melimpah. Bahkan, setiap orang pun bebas memasukkan informasi di dunia maya tanpa batasan.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67 persen dibandingkan pada periode sebelumnya sebanyak 210,03 juta pengguna. Sementara itu, jumlah pengguna internet setara dengan 78,19 persen dari total populasi Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa. Sebagai informasi, tren penetrasi internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 lalu, penetrasi internet di tanah air mencapai 64,8 persen dan levelnya meningkat menjadi 73,7 persen di tahun 2019 - 2020. Kemudian, setahun berselang hingga 2022, tingkat penetrasi internet kembali meningkat. Kali ini, tingkat penetrasinya mencapai 77,02 persen dan berada di angka 80 persen di tahun 2022-2023. Hal ini menunjukkan orang Indonesia semakin melek dengan internet.

Berkaca dari hal itu, muncullah istilah *digital native* yang mengandung pengertian generasi muda saat ini hidup pada era digital, yakni internet menjadi bagian dari keseharian dalam hidupnya. Contoh lainnya telah banyak kasus persekusi yang diakibatkan adanya ketidaksepahaman di dunia *online* yang berujung ke aktivitas fisik dan membuat kegaduhan di dunia nyata.



Selain itu, terdapat pula persekusi oleh kelompok agama. Misalnya, pada tahun 2019 silam telah terjadi polarisasi akibat kontestasi pemilihan umum yang cukup massif. Dampak dari polarisasi tersebut juga mendung di ranah digital yang berakibat atau berdampak di ruang fisik. Perbedaan pendapat dan pilihan yang awalnya ringan berubah menjadi aktivitas fisik yang menyebabkan kegaduhan dan pertikaian. Kondisi emosional yang beragam dan pemahaman yang bervariasi juga mempengaruhi kondisi dimaksud.

Pada tahun ini, Indonesia kembali akan menyelenggarakan pemilihan umum. Bawaslu pun bertindak cepat dengan mengeluarkan hasil survey Indeks Kerawanan Pemilu 2024, dimana konstruksi di dalamnya terdiri dari 4 dimensi, yaitu Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, dan Partisipasi Pemilu, dimana masing-masing terdapat lagi 12 sub dimensi, dan 61 indikator.

Mengutip laman sipekapulu, dari konstruksi tersebut didapatkan Indeks Kerawanan Pemilu di tingkat provinsi sebanyak 45 provinsi, 10 diantaranya, yaitu termasuk kategori rawan sedang, Dan terdapat 5 provinsi termasuk kategori tinggi, 21 provinsi

termasuk kategori sedang, dan 8 provinsi rawan rendah. Sementara di tingkat kabupaten/kota ditemukan 85 kabupaten/kota rawan tinggi, 349 kabupaten/kota rawan sedang, dan 80 kabupaten/kota rawan rendah.

Berkaitan dengan hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku penyelenggara publik bidang digitalisasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menciptakan kondisi dan ruang digital yang kondusif, serta mampu mendorong berbagai arah kebijakan pemerintah, salah satunya terkait penciptaan ruang kondusif pemilihan umum.

Oleh karena itu, perlu diselenggarakan berbagai kegiatan dan aktifitas yang membuka wawasan dan pemahaman penggunaan TIK di masyarakat sehingga masyarakat dapat berpikiran terbuka, berdiskusi dan bertukar pikiran secara rasional tanpa emosi karena hal tersebut akan menurunkan kesadaran toleransi. Rendahnya toleransi tersebut ketika menggunakan TIK/Internet merupakan akar munculnya berbagai penyakit digital seperti *hate speech*, *hoax*, persekusi dan lain sebagainya.

Hingga kini, ada banyak diskursus yang terjadi di masyarakat. Tak hanya di ruang fisik, namun juga di ruang digital. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A. Pangerapan mencontohkan, di media sosial misalnya, masyarakat banyak yang aktif berpartisipasi di berbagai diskusi. Mulai dari terkait visi misi dari para pasangan calon maupun diskusi tentang isu penting lainnya yang berkaitan dengan pemilu tahun ini.

Menurut Dirjen Samuel, munculnya diskusi-diskusi di ruang digital memberikan dampak yang baik karena masyarakat dapat memanfaatkan untuk menunjukkan partisipasi politiknya.

“Namun demikian, yang masih sangat disayangkan adalah masih banyaknya diskursus di ruang digital yang disisipi dengan hoaks, misinformasi, disinformasi, malinformasi, terlebih di masa-masa pemilu ini,” ungkapnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Dirjen Samuel menyatakan Kementerian Kominfo telah menemukan sebanyak 28 isu hoaks terkait pemilu di bulan Januari tahun ini. Sedangkan secara total, telah mengidentifikasi 230 isu hoaks pemilu dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 26 Januari 2024.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel A. Pangerapan, angka-angka itu bukan jumlah kecil dan sangat berbahaya, karena penyebaran konten kabar bohong, misinformasi disinformasi, serta malinformasi dapat memicu meningkatnya intoleransi hingga mendorong terjadinya polarisasi politik yang bisa mengancam ketertiban umum.

“Jika penyebaran misinformasi dan disinformasi dibiarkan merajalela, yang sayangnya memang relatif lebih cepat diproduksi serta tersebar, dapat memberikan ruang bagi tumbuhnya masyarakat yang mudah percaya kepada hoaks.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan peningkatan literasi digital kepada masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi



konten negatif tersebut. Bahkan, Kementerian Kominfo secara proaktif melakukan peningkatan literasi dan pembekalan kecakapan digital kepada masyarakat dalam penangkalan hoaks.

“Seperti dengan penanaman kemampuan *Prebunking* dan *Debunking*,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel A. Pangerapan.

Dirjen Samuel menjelaskan *prebunking* sebagai strategi preventif yang memberdayakan masyarakat melalui pembekalan pengetahuan akurat. Sedangkan *debunking* penting dalam menyediakan fakta, bukti, dan penjelasan yang valid untuk meluruskan miskonsepsi yang muncul.

“Jadi, prinsipnya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar tidak bisa dipercaya sampai kita mengkonfirmasi sumbernya, tabayyun, tabayyun, tabayyun,” jelasnya.



Gandeng komunitas untuk bekal masyarakat miliki Literasi Digital

Guna memastikan kemampuan *prebunking* dan *debunking* ini bisa dimiliki oleh setiap individu Kementerian Kominfo melibatkan partisipasi berbagai pihak, salah satunya dengan mengajak komunitas masyarakat yang sudah hadir pada kesempatan ini.

Menurut Dirjen Semuel, keterlibatan komunitas sebagai mitra penting dengan posisi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan literasi digital.

“Kenapa? Karena rekan komunitas berada paling dekat dengan masyarakat sehingga memahami apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Makassar dalam menangkal misinformasi dan disinformasi,” jelasnya.

Dengan kedekatan itu, mitra komunitas punya pemahaman yang lebih dalam terkait *culture* atau budaya dari masyarakat, sehingga metode penyampaian materi literasi digital dapat disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada.

“Upaya menangkal hoaks itu sendiri juga merupakan tanggung jawab setiap individu,

namun dengan adanya dukungan komunitas maka kegiatan *knowledge sharing* untuk meningkatkan literasi dan kecakapan digital tidak harus selalu menunggu pembekalan secara *top-down* dari pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel A. Pangerapan.

Oleh karena itu, Dirjen Semuel menyatakan Kementerian Kominfo berkomitmen dalam menyelenggarakan berbagai inisiatif dan program peningkatan literasi digital. Hal ini guna mendukung upaya yang berkelanjutan, Literasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengelola rekam jejak digital secara *bijak*.

“Acara yang berlangsung dalam sehari penuh ini akan banyak diisi dengan sesi-sesi diskusi dengan para narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Melalui kegiatan hari ini, saya sangat berharap rekan-rekan semua dapat menggali pengetahuan sedalam-dalamnya, bukan saja untuk meningkatkan kecakapan digital secara individual, tetapi semoga, bisa memberikan literasi digital juga kepada keluarga dan kerabat terdekat,” harapnya.



Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin berharap literasi digital bisa menciptakan suasana damai selama Pemilu. Apalagi, media sosial kerap digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks yang dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat.

“Literasi digital sangat penting, karena dapat menghadirkan kesejukan di media sosial,” ungkapnya.

Bahtiar menilai literasi digital yang baik, akan semakin meningkatkan suasana kondusif di Sulsel. Apalagi tingkat indeks kerawanan Pemilu sudah hijau secara nasional.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Bahtiar mengutip falsafah leluhur di Sulsel yang memiliki makna keteguhan dan kejujuran sebagai pagar kehidupan.

“*Iyami Ri ala sappo, getteng, lempu, na ada tongeng.* Yang artinya, jadikan keteguhan, kejujuran dan ucapan yang benar sebagai pagar kehidupan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli mengatakan potensi disinformasi kerap muncul pada pelaksanaan beberapa Tahapan, khususnya saat masa kampanye. Oleh karena itu, Mardiana mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif mengawasi pemberitaan dan informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Sulawesi Selatan untuk menciptakan pemilih cerdas dan Pemilu yang berintegritas.

Mardiana menjelaskan, mewaspadaai disinformasi menjadi amat penting karena saat ini sudah dalam tahapan kampanye. Informasi yang tujuannya menyesatkan dan menimbulkan kebingungan akan berdampak negatif.

“Kami mendorong masyarakat, khususnya generasi muda untuk bijak dalam menggunakan media sosial, media digital dan media elektronik. Perdebatan, adu gagasan bahkan adu propaganda dalam informasi kepemiluan sangat nyata. Jadi, kita harus mengidentifikasi informasi dengan baik dan menghindari misinformasi,” ungkapnya.



Deklarasikan Pemilu Damai bersama Gen Z Makassar

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Damai. Dalam kegiatan Literasi Digital Pemilu Damai Makassar: Cerdas Memilih, Bijak Berkreasi, Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Generasi Z Kota Makassar mendeklarasikan Pemilu Damai 2024.

"Pada hari ini, kami, para pemangku kepentingan yang berkumpul di sini dengan penuh semangat dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, secara resmi mendeklarasikan komitmen bersama kami. Dengan sungguh-sungguh kami berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan demokrasi, mengedepankan informasi fakta, menolak politik identitas dan SARA. Bertekad menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa di atas segala perbedaan," kata Menkominfo saat memimpin deklarasi dalam acara Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie membacakan deklarasi bersama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto diikuti Generasi Z Kota Makassar. Setelah itu, Menkominfo bersama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, menekan tombol layar sentuh sebagai simbol penegasan Deklarasi Pemilu Damai 2024.

Usai deklarasi, Menteri Budi Arie kominfo mengimbau masyarakat khususnya pemilih pemula

untuk bijak bermedia sosial. Menurutnya, media sosial bisa menjadi pemicu kerawanan Pemilu.

Menkominfo menyatakan Pemilu sebagai proses memilih pemimpin perlu diimbangi dengan partisipasi setiap warga negara dengan menggunakan hak pilih masing-masing.

"Memilih itu hak kedaulatan rakyat jadi ayo berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing," tandasnya.

Adapun kegiatan Gali Ilmu untuk Komunitas dengan tema "Cerdas Memilih, Bijak Berkreasi" yang diselenggarakan di Makassar bertujuan untuk menasar peningkatan wawasan dan kesadaran di masyarakat Sulawesi Selatan agar tercapai kondisi lingkungan digital yang kondusif dan teratur, khususnya dalam menghadapi pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Secara spesifik, tujuan kegiatan ini yaitu membentuk kesadaran dan kebijakan dalam memanfaatkan teknologi digital, mendorong terbentuknya berpikir kritis, sesuai etika, dan partisipasi aktif seluruh elemen di masyarakat dalam menggunakan media sosial. Selain itu, melalui talkshow literasi digital ini Kementerian Kominfo mendorong masyarakat untuk cerdas dalam memilih berita dan bijak dalam berkreasi di media sosial sehingga terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024. (Yusuf)

Peta Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 34 Provinsi di Indonesia

46.55

Konteks Sosial

54.27

Penyelenggaraan

45.10

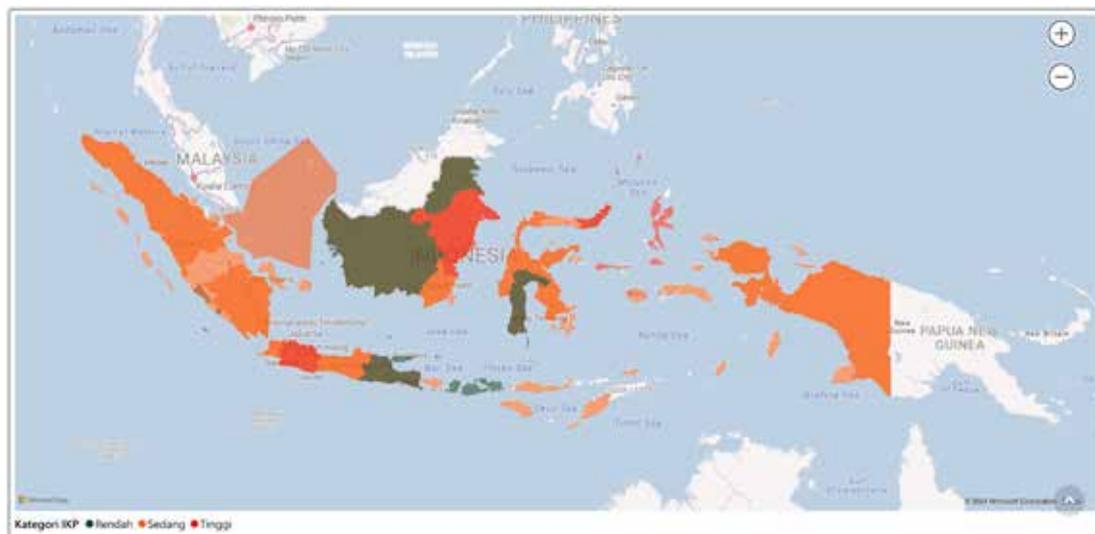
Skor IKP

40.75

Kontestasi

17.23

Partisipasi





Sambut Pemilu Damai 2024, Kominfo Gelar Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo

“ Kita tidak hanya berkumpul untuk saling beradu kemampuan dalam tenis meja, tetapi juga untuk menyatukan tekad dalam mendukung Pemilu Damai 2024 ”

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo. Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya berhasil diselenggarakan pada tahun 2023. Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Pemilu Damai 2024 bertempat di Gelanggang Olahraga Bulungan Jakarta pada 2 s.d. 4 Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan kejuaraan ini bukan sekadar kompetisi biasa, namun menjadi sarana membangun semangat bersama mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024 secara damai.

“Kita tidak hanya berkumpul untuk saling beradu kemampuan dalam tenis meja, tetapi juga untuk menyatukan tekad dalam mendukung Pemilu Damai 2024,” ungkapnya dalam Pembukaan Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo 2024 di Gedung Olah Raga Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (02/02/2024).

Menkominfo menilai Kejuaraan Tenis Meja ini menjadi ajang menggalang kebersamaan lintas kementerian, lembaga, atlet profesional atau master hingga lembaga pers.



Kejuaraan ini mempertemukan orang-orang dari instansi yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, bukan tidak mungkin pula dengan pilihan politik yang berbeda. Namun, kita semua berkumpul dengan semangat kebersamaan



Menteri Budi Arie berharap kejuaraan tenis meja menjadi perwujudan semangat persatuan dan kebersamaan sebagai manifestasi dalam menghadapi Pemilu ke depan.

“Bukan sekadar ajang adu *skill* permainan, saya yakin, dengan semangat persaudaraan yang tinggi, kita dapat menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan berintegritas,” tandasnya.

Menkominfo mengingatkan agar setiap peserta cerdas dalam menyalurkan keterampilan berolahraga dan bijak dalam menggunakan teknologi selama gelaran Pemilu 2024.

“Tidak hanya taktis dalam menangkis serangan lawan, tetapi juga taktis dalam menangkis segala bentuk hoaks dan ujaran kebencian,” tuturnya.

Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman selama rangkaian Pemilu 2024.

“Mari kita ciptakan ruang digital yang sehat dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat, dan mampu memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu,” ujarnya.



Diikuti 209 peserta

Sementara Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan peserta yang mengikuti Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo berjumlah 209 orang peserta dari berbagai kategori.

“Kejuaraan Tenis meja ini adalah yang kedua, tahun lalu diikuti oleh 114 orang peserta dan tahun ini diikuti 209 orang peserta, bertambah hampir 100 persen. Yang berbeda di tahun ini adalah kita ada tambahan dua kategori yaitu eksekutif yang nanti diikuti oleh eselon satu dan eselon dua dari kementerian,” papar Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar.

Selain melibatkan sebanyak 24 orang atlet tenis meja di Indonesia kategori master, kejuaraan ini juga diikuti oleh 21 kementerian dan lembaga, yaitu Kominfo, Kemendag, KLHK, Kemendagri, Kemendikbud Ristek, Kemenhan, KPPPA, BPK, KKP, Kemenko Marves, Kemendes PDTT, Kemenkes, Kemenkeu, Kejagung, Kemensetneg, Kementan,

Kementerian PUPR, BPKP, Kemenhub, Kementerian BUMN, dan Kemenlu.

Ada pula sebanyak 13 lembaga pers yang turut berpartisipasi yaitu TransTV, iNews Media, Jurnalis Spin Club, LPP RRI, Kumparan, Bisnis Indonesia, Antara, Kependudukan.id, Disway.id, Kompas, SCTV, Republika, dan Pojok Satu.

Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo mempertandingkan beberapa kategori, yaitu kategori eksekutif, tunggal umum putri kementerian, beregu umum putri kementerian, tunggal umum putra kementerian, beregu umum putra kementerian, beregu umum lembaga pers, dan antar master.

Kominfo Juara Umum

Pada kejuaraan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika keluar sebagai juara umum, unggul dalam perolehan medali terbanyak dengan mengumpulkan 4 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Posisinya disusul oleh Kementerian Pertanian pada peringkat kedua dengan mengantongi sebanyak 1 medali emas, 2 perak dan 2 perunggu. Peringkat ketiga ditempati Kementerian PUPR dengan meraih 1 medali perak dan 1 perunggu.

Kejaksanaan Agung berhasil membawa 1 medali perak dan diikuti oleh Kementerian Keuangan, KLHK, Kemendagri, Kemenhub, Kemenkes, dan Kementan dengan masing-masing membawa pulang 1 medali perunggu.

Pada acara penutupan, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengharapkan kejuaraan ini menjadi acara tahunan rutin sekaligus menjadi ajang menjalin komunikasi dan membangun relasi antarinstansi pemerintah serta lembaga media massa.

"Saya berharap kejuaraan ini menjadi event tahunan, bahkan jika mungkin menambah cabang olahraga lain, namun akan disesuaikan dengan kebutuhan," ungkapnya dalam Penutupan Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo 2024 di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (04/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan olahraga tenis meja merupakan cabang olahraga yang merakyat karena kerap digelar dalam setiap momentum peringatan hari besar nasional.

"Saya juga gembira melihat antusiasme yang tinggi dari para peserta (atlet). Hal itu terlihat dari jalannya pertandingan final hari ini, ada yang sampai lima set untuk penentuan sebagai juara satu," tuturnya.

Menkominfo mengharapkan agar turnamen ini menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik di kalangan peserta yang telah ikut bertanding. Menteri Budi Arie juga mendorong juara dalam kompetisi tenis meja senantiasa tetap semangat berlatih.

"Teruslah berlatih untuk meningkatkan prestasi. Selamat atas prestasi yang telah diraih karena rekan-rekan telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dan sportivitas yang luar biasa," ujarnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan ini dengan baik.

Acara diakhiri dengan pembagian piala, medali, dan hadiah serta souvenir untuk seluruh kategori atlet pemenang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Adhi Sakti)





Daftar Pemenang Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo 2024

Kategori Eksekutif

Juara 1 : Andry Asmara, Kementan

Juara 2 : Prof. Reda Manthovani, Kejagung

Juara 3 Bersama : Fadhilah Mathar, Kominfo dan Ir. Nicodemus Daud, Kementerian PUPR

Kategori Tunggal Umum Putri Kementerian

Juara 1 : Gading, Kementerian Kominfo

Juara 2 : Winda M, Kementerian PUPR

Juara 3 Bersama : Elly F, Kementerian Pertanian dan Langgeng Harum, Kemenkes

Kategori Beregu Umum Putri Kementerian

Juara 1 : Kominfo

Juara 2 : Kementan

Juara 3 : Kemendagri dan Kemenhan

Kategori Tunggal Umum Putra Kementerian

Juara 1 : Ardha, Kominfo

Juara 2 : Kevin, Kominfo

Juara 3 Bersama: Nanang Gatot, Kemenhub dan Rahmat Yandri, Kementan





Kategori Beregu Umum Putra Kementerian

Juara 1 : Kominfo A

Juara 2 : Kementan

Juara 3 Bersama : Kemenkeu dan KLHK

Kategori Beregu Umum Lembaga Pers

Juara 1 : Trans TV (Eko Darta, Eko Sentosa, Wijanarko)

Juara 2 : Pojok Satu (Untung Bachtiar, Eef Nandang R, Ahmad Gunawan, Sani Santana, Ajat Munajat)

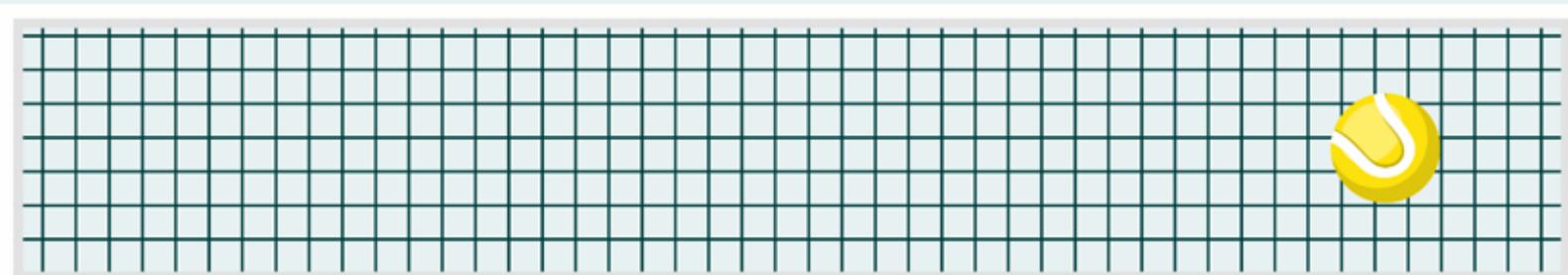
Juara 3 Bersama : Bisnis Indonesia (Heri, Fikri Ilham, Yusuf Muchtar, Firman Wibowo) dan Kompas (Kasianto, Mulyadi, Herman, Ery, Herlin)

Kategori Antar Master

Juara 1 : M. Bima Abdi Negara, GMO Sport Club

Juara 2 : Rafanael, Stoni

Juara 3 Bersama : Ficky S, Telkom dan Yayasan, Prima Nusantara



SETELAH NYOBLOS HARUS CELUP JARI KE TINTA

Kenapa ya?



Mencelupkan jari ke dalam tinta ungu sesuai menggunakan hak pilih saat Pemilu merupakan salah satu tahap yang tidak boleh dilewatkan. Selain menjadi tanda bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya, saat ini tinta ungu pada jari juga bisa dimanfaatkan untuk berburu diskon di berbagai pusat perbelanjaan. Namun, tahukah kamu bagaimana asal-usul dicelupkan jari ke tinta usai nyoblos Pemilu? Yuk simak penjelasan berikut ini!



Dicelupkannya jari ke dalam tinta berasal dari Negara India saat pelaksanaan Pemilu tahun 1962 atau telah berlangsung sejak 62 tahun lalu. Kejadian tersebut bermula pada tahun 1950, banyak pemilih di India yang menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali. Untuk menghindari terulangnya kejadian serupa, Pemerintah India mengimbau agar para pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta saat Pemilu tahun 1962. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh 44 negara lain di dunia, salah satunya Indonesia.

Tinta yang digunakan saat itu merupakan tinta permanen yang hanya dapat hilang sejalan dengan pertumbuhan kuku atau sekitar empat bulan lamanya. Tinta tersebut mengandung perak nitrat yang dapat membuat warna tahan lama dan tidak mudah pudar oleh air sabun atau bahan yang mengandung klorin.

Di Indonesia sendiri, dicelupkannya jari ke dalam tinta setelah mencoblos baru diterapkan pada Pemilu tahun 1999 pasca reformasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar tanpa kecurangan. Tinta yang digunakan juga merupakan tinta permanen yang sulit untuk dihilangkan. Pencelupan jari ke dalam tinta masih berlaku hingga saat ini dengan ketentuan dan pengaturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Adelia)

Sumber Foto : <https://thewire.in/history/the-first-indian-election-inclusion-independence-and-the-making-of-we-the-people>



Pesta Rakyat Lima Tahunan

Foto dan Teks:
Biro Hubungan Masyarakat Kominfo



PEMILIHAN SARAN INTEGRAL BANGSA

DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM 2024

2



CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
GIBRAN RAKABUMING RAKA

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

**BERSAMA INDONESIA MAJU
MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

MISI

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

3



CALON PRESIDEN
**H. GANJAR PRANOWO,
S.H., M.I.P.**

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



GERAKAN BERKEADILAN MENUJU

KEBERKESIAHAN

MISI

1. Memperkuat Indonesia yang sejahtera, adil, dan sejahtera;

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi Indonesia. Pada 14 Februari 2024, Indonesia menorehkan sejarah dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak terbesar di dunia. Melansir laman KPU, lebih dari 204 juta pemilih terdaftar untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu hari. Indonesia merupakan demokrasi elektoral terbesar ketiga di dunia, meski demikian pemilu di Indonesia pada periode 2024 ini dapat dikatakan sebagai *single day voting* terbesar di dunia.





Keamanan Pemilihan Umum 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara ataupun peserta pemilu, tetapi dibutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Sikap dan perilaku netralitas aparat penegak hukum turut dibutuhkan untuk menciptakan pemilu damai. Selain itu, masyarakat juga harus tetap saling menghormati perbedaan pilihan dan tetap saling menjaga situasi kamtibmas jelang pemilu 2024. Hal tersebut merupakan bentuk kedewasaan dalam berpolitik, yang ditunjukkan dengan sikap tidak mempermasalahkan perbedaan pilihan. Dalam demokrasi terkadang dituntut untuk berbeda. Perbedaan pendapat dan pandangan politik merupakan bentuk demokrasi sehingga diharapkan tidak terjadi perpecahan karena kedamaian mutlak harus terwujud.





Berdasarkan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pengumuman hasil Pemilu 2024 pilpres dan pileg akan dirilis antara Februari hingga Maret 2024. Pengumuman tersebut akan dilakukan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pengumuman hasil Pemilu 2024 memang membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini karena data suara yang dihimpun oleh KPU sangat banyak berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Adapun hasil akhir atau *real count* akan diumumkan oleh KPU melalui rekapitulasi mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024 mendatang.





Harga Kartu Keluarga

oleh: Annisa Moezha*

Macet bagi Jakarta adalah hal yang lumrah. Emosi dan kepal asap polusi bahkan sulit dibedakan, semua melebur dalam keramaian. Belum lagi suara klakson kendaraan dari pemiliknya yang tak sabaran, seolah jadi nada favorit sehari-hari. Entah pada jam berangkat atau pulang, orang-orang selalu tergesa, berdesakan, saling sikut dan berebut. Tak ada kata silahkan duluan, siapa pun ingin cepat sampai di tujuan. Sialnya, sebagai salah satu pegawai pemerintah yang setiap harinya pulang-pergi ke kantor dengan transportasi umum, aku pun jadi bagian di dalamnya.

Rasa-rasanya, aku telah khatam dibesarkan oleh makian orang di jalan-jalan, dengkur panjang pekerja yang lelap di kursi KRL, atau bau apek keringat di setiap koridor TransJakarta. Jakarta juga tak pernah sepi kalau soal kegaduhan. Itu sebabnya, sekarang ini banyak orang memilih

menyumpal telinga mereka dengan earphone dan asyik dengan playlist pilihannya, karena dunia terlalu berisik untuk didengar juga tak punya banyak pilihan yang menyenangkan.

Sampai mana? Buruan pulang. Di rumah ada ribut-ribut.

Muncul satu pesan WhatsApp dari Ali, adikku, di bar notifikasi. Kuabaikan sementara dan lanjut menonton k-drama *on going* dari hp yang sengaja dimiringkan.

Mba, beneran ini. Tolong cepet balik. Aku bingung kudu gimana.

Pesan dari Ali muncul lagi. Kulirik papan informasi LED di atas pintu busway, halte pemberhentian yang kutuju sudah dekat. Aku berdiri mendekati ke pintu.

Sabar. Sebentar lagi sampe. Biasa Senin sore, kaya nggak tahu aja macetnya.

Tak butuh waktu lama, pesan balasanku centang dua biru.

Cepetan!!!



Ali

now

Sampai mana? Buruan pulang. Di rumah ada ribut-ribut.



Ali

now

Mba, beneran ini. Tolong cepet balik. Aku bingung kudu gimana.



Ingin kumaki si Ali, tapi sudahlah. Tak berguna juga kujelaskan biar pun sudah dekat, bukan berarti bisa lebih cepat.

"Eh, rasanya hambar ya debat capres kemarin. Nggak ada ribut-ribut kaya sebelumnya," terdengar bisik-bisik seorang perempuan di sebelah tempatku berdiri.

"Semuanya cari aman kayaknya. Maklum ah biar elektabilitasnya nggak terjun payung," tanggapan santai oleh rekan di depannya itu kemudian memunculkan tawa kecil keduanya.

Aku melirik sekilas ke arah mereka. Bus sampai di halte yang kutuju. Ternyata kami turun di halte yang sama.

Di kantor, di transportasi umum, di barisan halte, di antrian kedai kopi, semua orang masih ramai membicarakan topik debat terakhir capres cawapres yang dilangsungkan minggu malam kemarin. Musim pemilu kali ini cukup sulit dengan tiga pasang capres cawapres yang bertarung sengit. Tentu saja, masing-masing punya pendukung dan simpatisan yang akan selalu membenarkan setiap ucapan calon yang didukungnya dan cenderung mengesampingkan pandangan dari rivalnya. Semua sibuk meraup suara sebanyak-banyaknya, memilah dan memilih mana kawan mana lawan.

**

Langit sudah gelap ketika langkahku sampai di ujung gang sempit menuju rumah. Sisa hujan

sore tadi membekas di sepanjang jalan setapak, menyisakan becek dan aroma got yang meluap. Nasib punya rumah di Jakarta pinggiran, hujan dikit banjir mengancam.

Lima meter menuju pintu rumah, suara raungan terdengar. Deg! Si Ali tidak bercanda, situasi rumah sedang kacau seperti ini.

Begitu sampai, pemandangan pertamaku adalah ibu yang berkacak pinggang, nenek duduk sambil mengusap air mata, bapak sibuk membereskan berkas-berkas yang berserakkan di lantai, Ali tak kelihatan batang hidungnya, si kampret itu pasti kabur.

"Ada apa ini?" tanyaku parau dengan sisa energi yang kupunya.

Ibu langsung menghampiriku, "Itu nenekmu, mau jual suara satu keluarga demi minyak goreng satu liter sama beras satu kilo."

Aku mengangkat alis, butuh penjelasan lebih detail. "Tanya aja sendiri!" tukas Ibu. Pandanganku langsung menuju nenek. "Betul Mbah? Gimana ceritanya?"

Nenek geleng-geleng kepala seolah menyangkal. "Lha wong aku nggak tahu nduk. Pak RT tadi siang ke sini, minta aku menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga biar dapet bantuan sembako. Aku nyari-nyari juga belum ketemu, Ibumu langsung misuh-misuh," air mata merembes ke pipinya yang keriput.



"Kamu denger kan? Hampir aja suara kita digadaikan! Caleg macam apa masih pake cara kotor kaya gitu. Malu-maluin!" Ibu bersungut-sungut. Dari intonasinya yang tinggi, bisa dimaklumi nenek sesedih apa saat anaknya sendiri mencak-mencak kepadanya sejak tadi.

"Udahlah bu, Mbah mungkin nggak paham pak RT minta KK buat apa. Mbah kan tahunya mau dapat sembako. Nggak usah dilanjutkan lagi." Bapak coba menenangkan Ibu.

"Halah, bapak bilang kaya gitu karena tahu kan itu caleg dari partai yang capresnya bapak dukung?! emang Ibu nggak tahu selama ini bapak condong ke mana!" Ibu menabuh genderang perang rupanya.

"Loh? Kok ibu malah bahas-bahas capres? ibu kalau punya pilihan capres yang beda sama bapak, silakan. tapi nggak usah bawa-bawa di sini. Lagian hak masing-masing mau condong ke mana. Kenapa ibu jadi sensi ke bapak?" serangan balasan meluncur. Bapak jadi merepet. Matanya memerah menahan amarah.

Berkas yang berserakkan masih tersisa untuk dimasukkan ke lemari. Kuduga, nenek membukabuka lemari dokumen untuk mencari fotokopian kartu keluarga dan ibu memergokinya. Lalu terjadilah percekocokan ini.

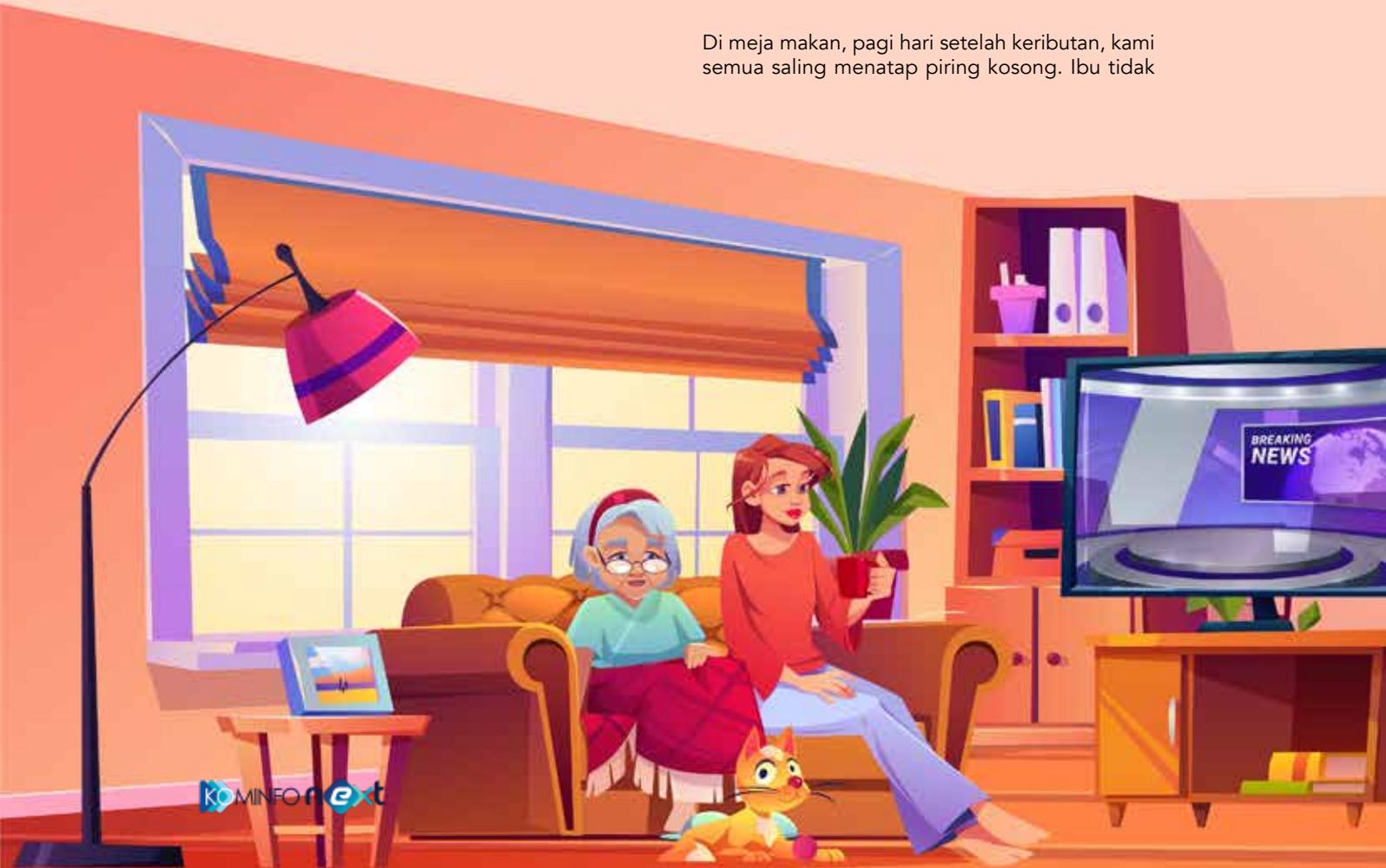
"Pokoknya aku nggak suka bapak dukung capres itu." Ibu tetap tak mau kalah.

"Bu, sudahlah. Capres yang ibu dukung juga belum tentu lebih baik. Semua punya kelebihan dan kekurangan!" Bapak sedikit membanting pintu lemari. Seketika suasana ruang tengah jadi hening.

Aku berdehem. "Udah ribut-ributnya? Aku capek pulang kantor. Kalau masih mau lanjut ribut, di luar rumah aja sekalian biar semua tetangga tahu keluarga kita beda pilihan capres!" hanya itu kalimat yang bisa kulontarkan sebelum energiku benar-benar habis. Aku memilih masuk kamar, menutup pintu rapat-rapat. Rumah sepetak yang diisi aku, bapak, ibu, adik, dan nenek ini terasa lebih sempit dan menyesak.

**

Di meja makan, pagi hari setelah keributan, kami semua saling menatap piring kosong. Ibu tidak



memasak apa-apa. Semalaman ia mengunci diri di kamar dan membiarkan Bapak tidur di ruang tengah.

Tak lama, Ali muncul membawa beberapa bungkus nasi uduk. Kami semua sarapan dalam keheningan dan pergi dengan kesibukan masing-masing setelahnya.

Sorenya, pulang dari kantor aku sudah melihat ibu dan nenek duduk menonton TV. Sudah tak ada keributan. Entah mungkin sudah saling memaklumi atau mereka memilih untuk tidak membahas lebih lanjut.

"Ali kemana bu?" tanyaku basa-basi setelah salim ke mereka.

"Rapat anggota KPPS. Sekarang dia punya kesibukan, dari pada di rumah terus." Ibu nampak berbangga begitu menyebut KPPS. Maklum, anak bujangnya itu katanya sudah berjuang mati-matian cari kerjaan belakangan ini.

"Bapak belum pulang?" satu lagi pertanyaan dariku, namun ibu tak merespon. Langsung kusimpulkan, perang dingin masih berlanjut.

"Apa Ibu masih marahan sama Bapak gara-gara beda dukungan capres?" akhirnya pecah juga

rasa penasaranku. Ibu menggeleng. Tapi ekspresi wajahnya tak bisa bohong.

Aku pergi ke meja makan, syukurlah ada lauk pauk di sana. Rasa laparku selamat. Tadinya kalau ibu masih mogok masak, mie instan bakal jadi solusi. Tak lama ibu datang menghampiri dan duduk bersamaku di meja makan.

"Kenapa bu?" aku tahu Ibu membendung pertanyaan.

"Kalau ASN tuh harus netral ya katanya?" tanya Ibu hati-hati. Aku mengangguk dan kembali menyendok makananku.

Iya, benar. Sebagai bagian dari pegawai pemerintah sebut sajalah ASN, ada aturan untuk tetap netral dalam pemilu. Sehingga harus turut berhati-hati dalam menyuarakan pendapat atau melakukan hal yang arahnya bisa terbaca condong ke salah satu paslon. Memang terlalu banyak regulasi yang mengikat pada ASN, bahkan pose jari tangan saat berfoto saja ada aturannya.

"Kenapa bu? Mau tanya aku pilih nomor berapa?" tebakkanku tidak meleset. Ibu senyum-senyum.

"Coba jujur sama ibu. Jangan-jangan, kamu juga beda pilihan ya sama ibu?"



Untungnya aku sudah selesai makan. Jadi biar kutuntaskan saja sekarang. "Bu, memangnya kenapa? Ibu mau pilihanku sama dengan ibu? Ya bisa jadi iya, bisa jadi nggak. Aku sudah besar loh bu. Kalau pilihanku beda juga nggak merugikan ibu kan?" tandasku.

Ibu merengut. Kecewa dengan jawabanku.

"Mbah, kalau ada lagi yang minta KTP atau KK terus menjanjikan imbalan kaya sembako, amplop, atau apa aja. Jangan mau ya, Mbah. Bilang aja nggak tahu." Kataku pelan-pelan. Mbah yang usianya hampir 70 tahun itu hanya mengangguk-angguk ketika coba kunasehati tadi pagi di meja makan ini.

Namun kali ini, yang aku hadapi Ibu. Ras terkuat di rumah ini. "Bu, mau beda atau nggak, yang penting jangan merugikan kita sebagai keluarga ya."

Di rumah ini, aku bukan saja sebagai anak perempuan pertama di keluarga yang harus

bersikap tangguh dan tegas, tapi berusaha menjadi anggota keluarga paling waras di tengah situasi pemilu yang panas.

"Siapa pun yang menang, semoga capres dan para caleg itu bisa membawa Indonesia lebih baik, ya kan bu?" ujarku lagi seraya memijit pundak ibu. Ia tak merespon apa-apa sampai kemudian Bapak muncul di hadapan kami.

"Bener bu. Kita cukup menggunakan hak pilih kita aja untuk siapa. Mau beda pilihan atau tidak, yang penting kita nggak golput. Ya *tho?*" detik selanjutnya Bapak berusaha menghibur Ibu yang masih dengan wajah berlipat.

Mendekati hari pemilihan umum, suatu ketika saat sedang *scroll* media sosial, aku menemukan foto artis-artis yang berselfie ria selepas mengikuti debat capres terakhir. Salah satu keluarga artis bahkan berpose bersama padahal mereka menggunakan atribut dukungan yang berbeda. Iya, mereka beda pilihan capres. Kukirim foto-foto itu ke grup WA keluarga.



Tuh, mereka aja cinta damai. Siapapun presidennya, kita tetep keluarga!

Tak lama respon emoticon masuk. Ibu memberi jempol. Bapak tanda tos!. Si kampret Ali menanggapi dengan tawa. Chat kirimanku centang dua biru. Semoga saja keributan pemilu ini segera berlalu.

**

Pesta demokrasi yang paling ditunggu-tunggu tiba. Ali sebagai petugas KPPS sudah pergi pagi buta. Biarlah, anak muda seperti dia memang cocok berkontribusi untuk negara. Kami sekeluarga berangkat ke TPS sendiri-sendiri. Ibu pergi pagi-pagi sekali, malas antri kalau kesiangan katanya. Bapak menyusul tak lama dari ibu. Aku dan nenek berangkat sebelum dhuhur.

Menjelang sore, kami bersama-sama menonton di TV proses perhitungan suara dari hasil hitung

cepat beberapa daerah. Berbagai prediksi mulai bermunculan. Media sosial tak kalah update. Gambar jari bertinta ungu berkelebatan di sepanjang timeline. Orang-orang tampak menikmati hari ini.

Semakin petang, jumlah suara yang masuk dan terproses semakin banyak. Tebak-tebakan siapa pemenang putaran sudah jadi trending topik. Semua orang menunggu hasil akhir dengan dada berdebar, apakah akan berlangsung satu putaran saja? Atau akan ada putaran kedua?

Ah! Satu putaran atau dua putaran, aku tak peduli. Yang kuingin keluargaku utuh kembali.



Annisa Moezha

Gemar membaca buku, menulis cerpen dan puisi. Cerita-cerita lainnya bisa mampir ke media sosialnya @annisamoezha



Lindungi Keberlangsungan Media Pers, Menkominfo: R-Pepres Publisher Rights Segera Disahkan



Dunia pers telah memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan peradaban dunia. Beragam produk jurnalistik yang dihasilkannya telah menciptakan perubahan baik di tingkat global maupun di Indonesia. Namun di tengah masifnya perkembangan digitalisasi saat ini, dunia pers mengalami guncangan yang maha dahsyat. Hadirnya platform raksasa global seperti google dan meta menimbulkan persoalan baru seperti pelanggaran hak cipta dan berkurangnya pendapatan perusahaan media.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia berupaya menghadirkan regulasi yang mendukung keberlangsungan dunia pers tanah air melalui *Publisher Rights*. Pemerintah dan pemangku kepentingan telah membahas pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan pers dan platform digital. Pengaturan itu merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan Rancangan Peraturan Presiden mengenai *Publisher Rights* akan segera disahkan.

“Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu akan segera datang,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Syukuran HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (09/02/2024).

Pers menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi. Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, pers nasional memiliki peran sentral dalam sejarah Bangsa Indonesia. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers di Indonesia menjadi penyebar

informasi yang mencerdaskan dan mendukung perjuangan mewujudkan kemerdekaan.

“Dalam perjuangan kemerdekaan, pers setidaknya memegang dua peran penting, yakni menyebar informasi kepada masyarakat untuk mencerdaskan dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta terlibat aktif sebagai aktivis yang menyuarakan anti-penjajahan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak agar mendukung keberlangsungan pers di tanah air. Untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua pihak. Lewat R-Perpres ini diharapkan akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi agar pasca pengesahan regulasi, semua pihak bisa menjalankannya dengan optimal.

“Kita sudah cukup optimis dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan mitigasi dan solusi ini betul-betul bisa berjalan,” tegasnya.

Pers dalam Sejarah Kemerdekaan

Dalam momen HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia, Menteri Budi Arie Setiadi mengenang kembali bagaimana kontribusi pers dalam mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, sejarah pembentukan PWI 78 tahun lalu menjadi kisah bagaimana dukungan pers dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa.

“Pembentukan PWI merupakan inisiatif sebuah komisi yang terdiri dari perwakilan delapan media di tanah air, dengan misi mendukung negara dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan,” ungkapnya.

Ia pun meyakini konsistensi itu tetap terjaga dan menjadikan PWI sebagai organisasi yang menegaskan perannya sebagai pilar demokrasi



bangsa. Menurutnya, PWI telah mengemban misi yang suci sejak lahir dan harus terus dilanjutkan agar membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Dengan misi mendukung rakyat, saya meyakini bahwa hingga saat ini PWI terus menunjukkan konsistensinya dalam menegakkan pilar demokrasi bangsa yang terus bertumbuh dan berkualitas,” tandasnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, Menteri Budi Arie mengajak untuk menghayati kembali, tanggal 9 Februari sebagai hari penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Hari kelahiran PWI, rumah bagi insan wartawan Indonesia.

“Itu peristiwa sejarah pembentukan organisasi wartawan seluruh Indonesia, tetapi langkah-langkah ke depan adalah bagaimana kita bisa menyuarakan lebih informatif, memberikan inspirasi tentang bagaimana Indonesia ini bisa menjadi negara maju,” tegasnya. (Desideramus Bitan)



Perayaan HPN 2024: Kado Perpres “Publisher Rights” dari Kominfo untuk Pers Indonesia

Eksistensi pers di Indonesia semakin memperlihatkan kematangan dalam berdemokrasi sebagaimana yang telah diakui dunia. Indonesia menjadikan industri pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi karena peran pentingnya yang ikut mengawal dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024 terselip pesan tentang kemajuan demokrasi di Indonesia. HPN tahun ini secara khusus mengangkat tema “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa”. Tema tersebut tentu sangat erat kaitannya

dengan momentum Pemilihan Umum 2024 yang baru saja berlangsung pada tanggal 14 Februari lalu. Esensi dari tema HPN ini menerjemahkan peran sentral pers di tanah air dalam menghidupkan iklim demokrasi.

Berbicara tentang dunia pers tidak terlepas dari peran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai institusi pemerintahan yang salah satu fungsinya sebagai *Government Public Relations* (GPR) dikenal erat bersinergi dan berkolaborasi dengan industri media dan pers. Dalam beberapa aspek, Kementerian Kominfo sebagai regulator juga membawahi sejumlah kebijakan



maupun program untuk turut menyiapkan regulasi maupun peraturan yang berkaitan dengan perkembangan pers. Tentu saja kemerdekaan pers menjadi argumen dasar bagi pemerintah untuk tidak campur-tangan ikhwal kebebasan pers itu sendiri.

Kado Kominfo untuk HPN 2024

Semarak HPN 2024 selain memberikan warna baru dalam kehidupan berdemokrasi juga diwarnai dengan semangat dan komitmen bersama dalam menciptakan jurnalisme berkualitas. Untuk itu, Kementerian Kominfo secara khusus memberikan kado dalam perayaan HPN 2024 dengan turut serta menuntaskan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang *Publisher Rights*.

Tepat di Puncak Peringatan HPN 2024 di Jakarta tanggal 20 Februari 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani peraturan tersebut.

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang akhirnya kemarin (Senin, 19/2/2024) saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres *Publisher Rights*," jelas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan terkait proses panjang dari penyusunan dan pembahasan perpres dengan menerima banyaknya perbedaan pendapat. Bagi Kepala Negara hal melelahkan berbagai pihak yang berkepentingan hingga sulit menembang titik temu.

"Sebelum menandatangani, saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak benar-benar bulat, ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital sehingga kita harus menimbang dan semua implikasinya. Setelah mulai ada titik



kesepahaman dan titik temu ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus. Akhirnya, kemarin saya menandatangani perpres tersebut.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan akan menindaklanjuti proses perpres tersebut dengan merumuskan substansi mengenai upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas. Sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Budi Arie menegaskan komitmen Kementerian Kominfo untuk mendukung jurnalisme berkualitas telah dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait selama menyiapkan Perpres *Publisher Rights*.

”

Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya

Dalam berbagai kesempatan, Menkominfo Budi Arie menjelaskan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua stakeholder, termasuk dan yang paling terpenting adalah industri pers itu sendiri. Oleh karena itu, melalui Perpres *Publisher Rights* diharapkan dapat melahirkan payung hukum yang akan menjadi acuan terwujudnya jurnalisme berkualitas.

“Kita ingin memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberi manfaat optimal, dengan kepastian payung hukum di dalamnya,” ungkap Menteri Budi Arie.

Guna memastikan keberlanjutan proses regulasi setelah diterbitkannya Perpres *Publisher Rights*, Kementerian Kominfo akan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar pada saatnya nanti semua pihak yang terkait dalam peraturan tersebut dapat menjalankannya dengan optimal.



NASIONAL 2024

71

Liputan Khusus

PEMIMPINAN NASIONAL UTUHAN BANGSA





Dukung Deklarasi Kemerdekaan Pers

Momentum HPN 2024 yang dibingkai dalam suasana pesta demokrasi turut memberikan sejarah baru bagi industri pers. Sebelum hari pemilihan tanggal 14 Februari, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menghadiri kegiatan Deklarasi Kemerdekaan Pers serta Penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers.

Kegiatan deklarasi tersebut menunjukkan bahwa pers dan pemerintah saling memberikan dukungan terhadap pertumbuhan kualitas demokrasi di Indonesia. "Kebebasan pers indikator yang penting. Alhamdulillah selama reformasi berjalan dan setelah melewati beberapa pimpinan nasional komitmen itu cukup kuat," ungkap Wamenkominfo dalam kegiatan deklarasi yang berlangsung pada tanggal 10 Februari 2024.

Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah bangsa bahwa sejak era Reformasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi garis demarkasi jelas dalam demokratisasi di Indonesia. Produk hukum yang lahir di awal reformasi tersebut dalam pandangan Wamen Nezar Patria adalah menjadikan garis demarkasi antara rezim demokrasi dengan rezim otoriter.





Setelah lebih dari 25 tahun reformasi lahir, roda pemerintahan dalam kepemimpinan nasional terbukti memberikan komitmen yang kuat dalam menjaga kemerdekaan pers di tanah air. Hal penting inilah yang kemudian menjadi harapan besar agar kedepannya nilai-nilai yang terkandung dalam asas demokrasi dan kebebasan pers harus terus digaungkan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga melalui perayaan HPN 2024 menjadi harapan besar seluruh elemen anak bangsa untuk bersama-sama mempertahankan dan meneruskan perjuangan bagi kebebasan pers di Indonesia. Selamat memperingati Hari Pers Nasional tahun 2024 bagi seluruh insan pers di tanah air. (Irs0)



Festival Pers 2024 di Monumen Pers Nasional Solo

Oleh: Arnain Dian Agustin
Pranata Humas Ahli Pertama
Monumen Pers Nasional

Setiap tahun, Monumen Pers Nasional menggelar kegiatan Festival Pers dalam rangka memperingati hari peresmian Monumen Pers Nasional yang bertepatan dengan Hari Pers Nasional yaitu tanggal 9 Februari. Berkaca pada sejarah, peringatan Hari Pers Nasional merupakan apresiasi terhadap peran penting pers dalam perjalanan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Hari Pers Nasional ditetapkan berdasarkan peristiwa sejarah yaitu penyelenggaraan kongres wartawan pertama pasca proklamasi yang dilaksanakan di Kota Solo pada 9 Februari 1946, tepatnya di gedung Societeit Mangkoenegaran. Kongres wartawan tersebut kemudian melahirkan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang pertama kali mengusulkan didirikannya museum pers di Indonesia.

Sebagai penghormatan kepada perjuangan para perintis pers nasional, pemerintah menyetujui pendirian museum pers dan meresmikan gedung Societeit Mangkoenegaran sebagai Monumen Pers Nasional pada 9 Februari 1978. Peresmian Monumen Pers Nasional menjadi simbol kontribusi pers dalam sejarah perjuangan kemerdekaan sekaligus sebagai monumen untuk mengenang jasa para tokoh pers tanah air. Inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan acara Festival Pers sebagai kegiatan tahunan Monumen Pers Nasional.

Kegiatan Festival Pers pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018, dengan tujuan untuk mempromosikan museum dan layanan publik Monumen Pers Nasional kepada masyarakat di

wilayah Kota Solo dan sekitarnya. Serangkaian acara diselenggarakan selama bulan Februari, diantaranya adalah pameran foto, *workshop* dan diskusi, pertunjukan seni, beberapa lomba dan kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat.



Seremoni pembukaan Festival Pers 2024 pada tanggal 1 Februari 2024 dibuka oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenkominfo, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta Anas Syahirul, serta sejumlah pemimpin redaksi media massa di Solo. Para undangan kemudian mengikuti tur perdana pameran foto yang dipandu langsung oleh Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo.



Pameran foto jurnalistik menjadi puncak acara utama dalam kegiatan Festival Pers setiap tahunnya. Dalam Festival Pers 2024 ini digelar pameran foto bertema "Pers Mengawal Pesta Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa", menampilkan rangkaian foto-foto Pemilu di Indonesia yang pernah terbit di media massa. Pameran ini dibuka selama bulan Februari 2024 di gedung Monumen Pers Nasional.

Pameran foto Festival Pers 2024 ini menampilkan enam puluh foto jurnalistik dan pemberitaan media cetak terbaik dari Pemilu pertama tahun 1955 hingga 2009. Dalam pameran foto ini pengunjung dapat melihat kembali momen-momen bersejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia dari era sebelumnya, dimulai dengan Pemilu pertama yang diadakan setelah kemerdekaan hingga Pemilu selanjutnya yang menjadi catatan linimasa utama dalam sejarah bangsa kita.



Melalui foto-foto yang dipamerkan, pengunjung akan dapat melihat bagaimana pers telah memainkan peran penting dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Dari liputan-liputan jurnalistik yang menggugah kesadaran publik, hingga peran media dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Pameran ini juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merenungkan perjalanan demokrasi Indonesia dan mengapresiasi peran penting pers dalam menjaga dan mengawal proses demokrasi bangsa selama hampir tujuh dasawarsa setelah kemerdekaan.

Penyelenggaraan acara Festival Pers 2024 Monumen Pers Nasional, ditujukan kepada masyarakat umum dengan melibatkan partisipasi kalangan pers dan pelajar dari sekolah-sekolah di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya. Selain pameran foto jurnalistik masih terdapat rangkaian acara lainnya, yaitu: 1) Talkshow Hari Pers bertema Peran Pers Mengawal Pemilu yang Jurdil; 2) Sosialisasi layanan Monumen Pers Nasional ke sekolah SMA/SMK; 3) Workshop Video untuk Umum dan Workshop Menulis untuk Guru SMP; 4) Live Music Keroncong Monpers; 5) Video & Photo Competition; 6) Monpers Journalist Competition; 7) Lomba Mewarnai untuk PAUD/TK dan SD, Lomba Storytelling untuk SMP, dan Lomba Cerdas Cermat untuk SMA/SMK; 8) serta CSR Apresiasi Pengasong Koran dan Donor Darah.

Dalam sambutan pembukaan Festival Pers 2024, Widodo Hastjaryo juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Festival Pers ini merupakan bentuk pengenalan kegiatan pers kepada khalayak umum, memperkenalkan lebih dekat Monumen Pers Nasional ke berbagai kalangan masyarakat di Kota Solo, dan menjadi ajang partisipasi bagi para guru dan pelajar dalam memberikan apresiasi terhadap peran pers di masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan Festival Pers 2024 ini, dapat terwujud hubungan lebih erat antara media pers dan masyarakat, mendorong kebebasan berekspresi, dan menghormati peran pers dalam menyediakan informasi yang akurat bagi masyarakat. (Arnain Dian Agustin)





Sambut HPN, Monumen Pers Nasional Solo

Gelar Festival Pers 2024 Sebulan Penuh

Oleh: Lazuardi Pratama

Pranata Humas Ahli Pertama
Monumen Pers Nasional

Monumen Pers Nasional menggelar Festival Pers 2024 untuk menyambut Hari Pers Nasional atau HPN selama satu bulan penuh. Event itu dibuka dengan pameran foto bertema Pesta Demokrasi Dari Masa ke Masa pada Kamis (1/2/2024). Festival Pers Nasional 2023 dibuka dengan pameran foto yang dibuka untuk masyarakat umum pada Kamis (1/2/2024).

Acara seremoni pembukaan Festival Pers 2024 dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solo, Anas Syahirul dan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Solo.

Kasubag Umum Monumen Pers Nasional, Kuncoro Mahendro Suryo mengatakan acara seremoni pembukaan pameran foto dilakukan dengan penggungtingan pita.

Kemudian, para pejabat dan tamu undangan bakal mengunjungi pameran foto yang menggambarkan potret tahapan pemilu pada beberapa tahun lalu.

"Acara seremoni pembukaan pameran foto dilakukan secara sederhana. Ada beberapa pemimpin redaksi media massa yang juga diundang," kata dia, Rabu (31/1/2024).

Yoyok, sapaan akrabnya, mengatakan acara dilanjutkan talkshow HPN 2024 dengan narasumber Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo, Ketua PWI Solo, Anas Syahirul, dan pengamat media dari FISIP UNS, Sri Hastjarjo.

Dialog interaktif itu bakal mengupas peran serta media massa dalam membangun bangsa dan negara. Selama ini, Monumen Pers Nasional selalu menggelar kegiatan Festival Pers menyambut HPN setiap tahun.

“Monumen Pers Nasional menjadi saksi perjuangan wartawan sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Makanya, acara Festival Pers selalu digelar untuk memperingati HPN setiap tahun,” papar dia.

Sementara itu, staf Humas Monumen Pers Nasional Solo, Andi Prabowo mengatakan ada sederet kegiatan dalam Festival Pers 2024, Selain pameran foto, ada beberapa kegiatan yang menasar para kawula muda.

Seperti *workshop* dan lomba video pendek pada 7 Februari. Masyarakat terutama kaum milenial bisa mengasah kreativitas dan *skill* produksi video pendek.



Ada pula kegiatan khusus yang menasar para guru, yakni *workshop* menulis pada 16 Februari. “Para guru bakal diberi materi sekaligus praktik bagaimana menulis dengan baik dan benar. Bagaimana mengangkat isu paling menarik berdasarkan fakta dan data,” ujar dia.

Bagi kalangan pelajar, ada beberapa lomba yang bisa diikuti seperti lomba mewarnai dan menggambar untuk siswa TK dan SD pada 17-18 Februari, cerdas cermat untuk siswa jenjang SMA dan sederajat pada 20-21 Februari, dan *story telling* untuk siswa jenjang SMP dan sederajat pada 22 Februari.

Selain itu, ada kegiatan apresiasi terhadap pengasong dan penyumbangan darah massal pada 23 Februari. “Festival Pers 2024 direncanakan ditutup pada 29 Februari. Jadi selama sebulan, setiap hari bakal ada rangkaian kegiatan,” ujar dia.



Indonesia Dorong Kolaborasi yang Teguh dan Saling Mendukung Sesama Anggota ASEAN

Indonesia mendorong kerja sama yang teguh dan kokoh sesama anggota ASEAN dalam acara Pertemuan Keempat Para Menteri Digital ASEAN (4th ASEAN Digital Ministers Meeting) yang diselenggarakan di Singapura 1 Februari s/d 2 Februari 2024 yang lalu. Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba mengungkapkan bahwa membangun ASEAN digital yang inklusif dan terpercaya akan lebih mudah dengan menindaklanjuti ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025.

“Membangun ASEAN digital yang inklusif membutuhkan daya tahan, keuletan, dan perhatian. Namun yang terpenting, kolaborasi yang teguh, saling mendukung, dan tekad untuk tidak meninggalkan siapa pun, no one left behind,” ujarnya dalam pertemuan hari pertama acara 4th ASEAN Digital Ministers Meetings di Shangri-La Hotel Singapura, Jumat (02/02/2024).



Meski diterpa berbagai krisis, ASEAN mampu bertahan di tengah gejolak makro yang menghantam seluruh dunia beberapa tahun belakangan. Menurut Sekjen Mira, di tengah persoalan tersebut, ASEAN telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang besar. Bahkan dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB), ASEAN berada pada posisi ketiga perekonomian terbesar di Asia dan kelima di dunia yakni USD 3,7 Triliun. Oleh karena itu Sekjen Mira mengungkapkan bahwa rekomendasi tindakan yang disajikan dalam Tinjauan Jangka Menengah ADM 2025 akan memungkinkan ekosistem digital yang inklusif dan tepercaya tumbuh dan berkembang di seluruh Negara Anggota ASEAN sebagai kawasan yang kohesif.



Membangun ASEAN digital yang inklusif membutuhkan daya tahan, keuletan, dan perhatian. Namun yang terpenting, kolaborasi yang teguh, saling mendukung, dan tekad untuk tidak meninggalkan siapa pun, *no one left behind*

Untuk mendorong pertumbuhan regional, ada beberapa strategi yang telah dirumuskan ASEAN, salah satunya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang berpotensi melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan dari USD1 Triliun menjadi USD2 Triliun pada tahun 2030.

“Prospek yang menjanjikan ini harus dimanfaatkan secara strategis, untuk memungkinkan percepatan pertumbuhan baik bagi ASEAN maupun negara-negara anggotanya,” ujar Sekjen Mira Tayyiba.



Dukung Kolaborasi dengan Mitra ASEAN

Selain mendorong pentingnya kerja sama sesama anggota ASEAN, Indonesia juga mendukung kolaborasi dengan berbagai mitra ASEAN seperti Jepang, Tiongkok, AS dan ITU. Bersama Jepang, ASEAN telah membangun kemitraan selama 50 tahun dan menghasilkan banyak capaian positif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Oleh karena itu, Sekjen Mira menyatakan Indonesia menjunjung tinggi pernyataan visi bersama, persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang serta rencana implementasinya.

“Pemerintah Indonesia menginginkan kerjasama dan kolaborasi yang lebih intensif melalui platform Kemitraan Jepang-ASEAN, yang secara khusus berfokus pada membina kerja sama digital di bidang telekomunikasi,” jelasnya dalam pertemuan hari kedua acara 4th ASEAN Digital Ministers Meeting bersama Jepang di Shangri-La Hotel Singapura, Jumat (02/02/2024).





Selain itu, Kemitraan ASEAN dan Jepang juga meningkatkan dukungan dan kerja sama dalam sektor pertanian, pemetaan digital, tingkat melek huruf, dan membuat program pelatihan untuk membantu petani memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Negara-negara anggota ASEAN dan Jepang akan berkolaborasi untuk membekali warga negara dengan keterampilan digital yang diperlukan, membina komunitas yang lebih kuat dan masa depan lebih sejahtera. Untuk itu Sekjen Mira berharap, kolaborasi yang dibangun dapat memperkuat kemitraan dan mendorong kebersamaan visi membangun ekosistem digital yang inklusif dan tepercaya di ASEAN. Ia pun mengapresiasi Jepang yang telah memberikan dukungan dalam perkembangan digitalisasi di ASEAN.

"Indonesia secara khusus memuji hasil dari KTT Peringatan 50 Tahun Kerja Sama dan Persahabatan ASEAN-Jepang baru-baru ini. Saya yakin, bersama-sama, kita dapat memanfaatkan kekuatan teknologi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan,

pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran bersama di seluruh negara kita," ungkapnya.

Indonesia juga mendukung kerja sama yang lebih intensif dengan International Telecommunication Union (ITU). Sekjen Mira Tayyiba menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung penuh Rencana Kerja Digital ASEAN dengan ITU 2024 dan Area Kerja Sama Prioritas ASEAN - ITU 2024 - 2026. Menurutnya, kerja sama tersebut akan menjadikan konektivitas digital di negara-negara ASEAN lebih merata.

"Dukungan ITU yang tak ternilai memainkan peran penting dalam memberikan manfaat konektivitas internet ke seluruh pelosok dunia. Saat ini, sekitar 517,2 juta orang Asia Tenggara atau 75,6% populasi Asia Tenggara terhubung dengan internet. Jadi, ada 166,7 juta atau 24,4% dari kita masih belum terhubung," tuturnya.



Lebih lanjut, Sekjen Mira Tayyiba menyatakan upaya untuk menghadirkan konektivitas ke daerah paling terpencil dan komunitas pedesaan memerlukan dedikasi yang kuat. Indonesia telah bekerja sama dengan ITU dalam melaksanakan inisiatif Desa Cerdas dan Pulau Cerdas atau Smart Village and Smart Island (SVSI) sebagai sarana untuk memberikan konektivitas dan layanan digital kepada komunitas yang belum terhubung dan kurang terlayani. Ia pun menilai, pemerataan konektivitas digital menjadi kunci dalam transformasi masyarakat pedesaan dan pesisir, meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan dengan menghubungkan ke berbagai layanan yang dimungkinkan secara digital. Oleh karena itu ia mengapresiasi ITU karena telah menjadi mitra ASEAN yang luar biasa selama ini dalam mengembangkan akses dan konektivitas telekomunikasi.

“Kami berharap kolaborasi kita akan terus berkembang, dan bersama-sama, kita akan membangun dan menumbuhkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya di seluruh ASEAN,” ungkapnya.

ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN) merupakan pertemuan tahunan bagi pimpinan tinggi bidang digital dan pemangku kepentingan di wilayah ASEAN untuk membahas perkembangan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan perekonomian serta kualitas hidup masyarakat ASEAN. (Desideramus Bitan)





4th ASEAN DIGITAL MINISTERS' MEETING 2024

SINGAPORE

Building an Inclusive and Trusted Digital Ecosystem



4th ASEAN DIGITAL MINISTERS' MEETING 2024

SINGAPORE

Building an Inclusive and Trusted Digital Ecosystem





Perkuat Kolaborasi Digital, Indonesia Tandatangani MoU dengan Singapura dan Thailand

Indonesia memperkuat kolaborasi di bidang digital dengan sesama anggota ASEAN melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau nota kesepahaman dengan Singapura dan Thailand. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan Indonesia mengoptimalkan dialog dan pertemuan bilateral untuk mengembangkan ekosistem digital nasional. Bersama Singapura dan Thailand, Indonesia melakukan pertemuan bilateral untuk memperkuat kolaborasi di bidang digital. Ada beberapa isu dalam MoU tersebut seperti terkait dengan data dan *capacity building*.

“Masing-masing negara anggota menyampaikan update terkait dengan bagaimana membangun ekosistem digital yang inklusif dan dipercaya yang merupakan topik dari pertemuan ADGMIN tahun ini. Masing-masing negara diwakili oleh menteri yang mengatur dan mengelola isu digital di negara masing-masing,” ujarnya usai mengikuti The 4th ADGMIN Meeting with Dialogue and Development Partners dalam rangkaian acara 4th ASEAN Digital Minister Meeting 2024 di Shangri-La Hotel, Singapura, Jumat (02/02/2024).

Selain itu, Indonesia melalui Kementerian Kominfo juga menjajaki kerja sama bidang digital dengan Amerika Serikat dan US - ASEAN Business Council (USABC). Dalam kedua pertemuan bilateral tersebut, Sekjen Mira Tayyiba menyatakan Indonesia menjajaki kemungkinan kerja sama antarkedua negara.



“Terutama di Amerika sangat tertarik terhadap *rollout* 5G dan OpenRAN. Ini juga kita sudah catat untuk nanti kami koordinasikan dengan teman-teman di internal Kementerian Kominfo,” ungkapnya.

Berbagi Praktik Terbaik

Dalam rangkaian ADGMIN 2024, Indonesia menyampaikan komitmen dalam meningkatkan atau memperkuat ekosistem digital melalui penyediaan akses yang merata dan berkualitas, peningkatan kualitas SDM melalui literasi digital dan peningkatan digital skills.

“Kemudian kita meningkatkan atau memperkuat tata kelola data sampai dengan bagaimana kita menciptakan lingkungan berusaha yang fair dan transparan,” tandas Sekjen Mira Tayyiba.

Sekjen Kementerian Kominfo juga memaparkan beberapa milestone atau pencapaian dari aspek regulasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia.

“Bagaimana Indonesia menyelesaikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di tahun 2022, kemudian pada tahun 2023, revisi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mengakomodasi perlindungan anak yang mengakses layanan online. Selanjutnya, langkah Pemerintah RI dalam menghadapi *emerging technologies* salah satunya AI baik dari segi potensi maupun risikonya,” jelasnya. (Desideramus Bitan)



Terutama di Amerika sangat tertarik terhadap *rollout* 5G dan OpenRAN. Ini juga kita sudah catat untuk nanti kami koordinasikan dengan teman-teman di internal Kementerian Kominfo



© 2024 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO

Indonesia Rebut Lima Penghargaan ASEAN Digital Awards 2024

Indonesia berhasil memperoleh lima penghargaan dalam ASEAN Digital Awards (ADA) 2024. Penghargaan itu menjadikan Indonesia sebagai juara umum pencapaian inovasi digital terbaik di antara pemangku kepentingan utama di ASEAN yang sebelumnya dikenal sebagai ASEAN ICT Awards. Kelima penghargaan ini diberikan dalam sela Gala Dinner ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN) yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Februari 2024 di Gardens by The Bay, Singapura.

Kelima medali tersebut menjadi ganjaran untuk inovasi karya teknologi informasi dan komunikasi dalam kategori Private Sector, dan Digital Startup. Dalam ADA 2024, Tim Crustea dan Tim Shieldtag

merebut Penghargaan Gold Winner, sementara Artopologi merebut Penghargaan Silver Winner. Serta, penghargaan Bronze Winner direbut oleh Jaramba dan Incrane.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan keberhasilan ini merupakan bukti sukses Program Startup Digital di Indonesia.

“Ini menandakan bahwa program Digital Startup yang diampu Kominfo berjalan cukup efektif.”

Karena saya dengar informasinya lima besar yang digital startup, ya memang hanya startup Indonesia,” ujarnya sebelum mengikuti Pertemuan Hari Kedua 4th ASEAN Digital Minister Meeting di Shangri-La Hotel Singapura, Jumat (02/02/2024).

Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo memiliki beberapa program untuk memfasilitasi perkembangan startup digital nasional.

“Mulai dari pengumpulan ide, sampai dengan mencari mentor, investor, dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat hasilnya salah satunya di ajang yang berlangsung di rangkaian ADGMIN ini,” jelasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyoroti pemenang yang berasal dari Generasi Z dengan inisiatif layanan dan produk di sektor pertanian dan kelautan.

“Yang menggembirakan di mana pemenang tersebut bukan bisnis konvensional seperti *e-commerce*, *fintech*, tapi sudah merambah ke hal-hal yang lebih *basic* seperti pertanian dan kelautan,” ungkapnya.

Sekjen Mira Tayyiba mengaku bangga dan mengapresiasi prestasi yang diraih kelima delegasi Indonesia dalam ASEAN Digital Awards 2024 tersebut.

“Jadi hal-hal mendasar yang memang kita harus paham dulu proses bisnisnya supaya kita bisa berhasil. Karena proses bisnis perdagangan atau retail sangat berbeda dengan pertanian,” tandasnya.





Selain itu, Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius Pudjianto juga mengapresiasi pencapaian lima perwakilan Indonesia dalam ajang pengganti ASEAN ICT Awards itu.

“Mereka berkontribusi dalam berinovasi dan juga penerapan dalam setiap sektor. Oleh karena itu, kami terus mendorong dengan program pengembangan startup selanjutnya serta hilirisasi digital di sektor strategis,” ujarnya usai acara Penyerahan Penghargaan ADA 2024 dalam Gala Dinner 4th ADGMIN di Gardens by the Bay, Singapura, Kamis (01/02/2024) malam.

Melalui Program 1000 Startup Digital, Kementerian Kominfo memfasilitasi untuk pengembangan *entrepreneur* berbasis digital. Dalam ADA 2024,

Kementerian Kominfo memfasilitasi karya TIK terbaik dari Indonesia.

“Kominfo memfasilitasi lima tim finalis perwakilan Indonesia melakukan presentasi secara luring di depan 13 Final Judges ADA 2024 yang terdiri dari 10 juri dari tiap negara anggota ASEAN dan 3 orang juri undangan yang berasal dari China, Jepang dan Korea,” jelas Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo.

ADA 2024 merupakan ajang kompetisi regional yang kurasi atau seleksi produk dari pesertanya dilaksanakan sepenuhnya secara daring. ADA 2024 merupakan proyek bersama kementerian bidang telekomunikasi di negara-negara ASEAN yang bertujuan mempromosikan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, pebisnis, dan institusi lain.



Sebagai ajang kompetisi Karya TIK tertinggi di tingkat ASEAN, ADA mempertemukan enam kategori, yaitu *Public Sector*, *Private Sector*, *Digital Content*, *Digital Startup*, *Digital Innovation* dan *Digital Inclusivity*.

ADA pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 (saat itu masih bernama AICTA) di Cebu, Philippines. Pada tahun 2020, ADA sempat terhenti karena Pandemi Covid-19 melanda dunia.

"Sekitar pertengahan tahun 2023 kemudian diputuskan bahwa AICTA kembali dilaksanakan dengan Singapura sebagai *host country* atau penyelenggara yang kini bernama ASEAN Digital Awards (ADA)," jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Salah satu pemenang, CEO dan Founder Crustea Roikhanatun Nafi'ah mengaku bangga dan berterima kasih atas undangan Kementerian Kominfo untuk mengikuti ADA 2024.

"Kami bahagia karena sebelumnya tidak berekspektasi bakal Juara 1 karena kami juga startup masih baru. Kurang dari 2 tahun. ini jadi motivasi tersendiri untuk terus menumbuhkan startup. Kami dipercaya dan tentunya bisa memberikan kebermanfaatan ke petambak atau sektor apa pun itu," ungkapnya. (Bonita)



Global Forum UNESCO tentang Etika AI

Indonesia Jadi Episentrum di Kawasan ASEAN



Tiga Aspek Tata Kelola AI

Dunia sedang dihadapkan dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, AI bukanlah hal baru bagi sebagian industri dan masyarakat global. Namun yang kita tahu, penggunaan AI semakin masif khususnya *generative* AI dengan mengelaborasi berbagai kreativitas di media sosial maupun moderasi konten. Dalam era transformasi digital saat ini, sangat penting bagi kita untuk menyambut penggunaan AI dengan mengedepankan aspek etika, karena dampak positif memerlukan sebuah pedoman. Begitupun dari sisi negatif diperlukan perlindungan hukum dan cara mengendalikan penyalahgunaan yang berlebihan.

Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan keseriusan dalam menyambut teknologi AI. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini dipimpin oleh Menteri Budi Arie Setiadi bertekad melanjutkan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI. Pada akhir tahun 2023 tepatnya di tanggal 22 Desember telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence. SE tersebut sebagai panduan etika penggunaan AI di Indonesia yang diperuntukkan bagi masyarakat umum hingga Penyelenggara Sistem Elektronik Privat dan Publik.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria membawa SE Etika AI tersebut dalam Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence 2024 yang diselenggarakan oleh The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Slovenia pada tanggal 4 – 6 Februari 2024.

Global Forum UNESCO tentang Etika AI tersebut menghadirkan sekitar lebih dari 30 negara di dunia yang tengah konsen menyiapkan berbagai kebijakan dan program terkait penggunaan AI. Indonesia dalam forum tersebut memiliki *standing point* dan mengundang perhatian banyak negara.

Wamenkominfo Nezar Patria mengemukakan tiga aspek penting bagi Indonesia dalam merespons era AI yakni aspek keberlanjutan, tata kelola dan inovasi. Pemerintah Indonesia menilai tiga aspek tersebut bahkan sejalan dengan hasil temuan dari Badan Penasihat AI atau AI Advisory Body yang dibentuk oleh UNESCO. Indonesia menginginkan kehadiran ekosistem teknologi AI harus mampu menjembatani kesenjangan digital dan mempercepat pembangunan untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030.

Dalam SDGs tertuang salah satu misi besar mengatasi kesenjangan digital global dengan memastikan semua negara di belahan dunia tidak ada yang tertinggal dari jangkauan konektivitas, khususnya bagi negara Selatan-Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia memandang pentingnya mengintensifkan penggunaan AI sebagai saran menghadirkan tata kelola AI dalam ruang lingkup global dengan prinsip kesetaraan dan berkedudukan yang sama.

Selain mempresentasikan SE tentang Etika AI berikut tata kelolanya, Wamen Nezar Patria juga memamerkan pemanfaatan dan produktivitas penggunaan AI pada industri startup di Indonesia. Di hadapan para petinggi negara dan UNESCO, dikatakan bahwa sebanyak 198 startup atau perusahaan rintisan telah menggunakan teknologi AI menurut data per Juni 2023.

Masifnya penggunaan teknologi AI pada industri startup didukung oleh program dan kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah bersama ekosistem. Kementerian Kominfo misalnya memiliki Program 1000 Startup Digital, Startup Studio, dan HUB.ID. Seluruh program tersebut disiapkan untuk tumbuh kembang startup lokal yang inovatif dan kreatif. Sehingga dengan penuh kebanggaan, Wamenkominfo Nezar Patria menekankan Indonesia telah siap menyambut era AI.



AI Dukung Sektor Strategis

Global Forum UNESCO tentang Etika AI ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menjaring peluang kerja sama dengan berbagai negara dalam mengembangkan ekosistem AI. Bagi Indonesia, teknologi AI sangat membantu pembangunan berkelanjutan khususnya pada sektor-sektor strategis. Meskipun Indonesia masih dalam tahap pengembangan AI, namun dampak positifnya telah dirasakan pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sektor strategis lainnya yang telah mengimplementasikan AI. Dalam hal ini, pemerintah berpandangan bahwa dukungan kuat terhadap pengembangan AI akan menjadi benchmark penguasaan industri teknologi dalam 5 – 10 tahun kedepan.

Wamen Nezar Patria menegaskan Indonesia dapat menjadi episentrum perkembangan AI di kawasan ASEAN karena beberapa kelebihan yang tidak dimiliki negara lain. Dari segi populasi, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN, memiliki ekosistem startup terbanyak hingga termasuk negara yang cukup tanggap merespons perkembangan AI.

Melalui Forum Global UNESCO, Indonesia akan mengadopsi hasil-hasil pembahasan dalam forum tersebut dengan membangun kolaborasi dengan negara-negara maju yang telah memiliki model pengembangan AI. Misalnya, *foundation model*

untuk mengembangkan Generative AI untuk *Natural Language Processing* yang akan diterapkan di industri startup dan pemrosesan data dengan menggunakan AI di bidang *marketing*.

Foundation model yang telah diterapkan oleh sejumlah negara maju, diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang bertekad mengembangkan AI di berbagai bidang.

Masih tentang penggunaan AI di dunia, Indonesia menilai pentingnya *sharing knowledge* bersama negara maju untuk mengkonsolidasikan penggunaan AI melalui tata kelola yang komprehensif. Wamen Nezar Patria usai mengikuti salah satu workshop dalam Forum Global UNESCO tentang AI mengamati orientasi sejumlah negara dalam penerapan AI. Negara-negara di Eropa misalnya, yang menerapkan AI dengan mencoba berorientasi horizontal. Berbeda dengan Amerika dan Cina yang melakukan pendekatan vertikal dengan menghubungkan langsung pada sektor-sektor strategis. Meskipun tengah melirik perkembangan AI global dengan mengadopsi capaian di sejumlah negara, Indonesia tetap memperhatikan setiap risiko yang muncul dan menghindari dampak dari penyalahgunaan yang berdampak negatif.

Highlight Rangkaian Agenda Forum Global UNESCO tentang Etika AI

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Forum Global UNESCO tentang Etika AI merupakan momentum yang sangat berarti bagi Indonesia. Wamenkominfo Nezar Patria hadir mewakili pemerintah Indonesia telah mempresentasikan berbagai program dan kebijakan tentang AI dan mengikuti rangkaian kegiatan serta melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara.

Adapun agenda yang dihadiri oleh Wamen Nezar Patria antara lain (1) Ministers' Closed Consultations on the Interim Report of the UNSG's High Level Advisory Body on AI, (2) Workshop

Planning Contributions and Important Stakeholders to Include, dan (3) Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence.

Untuk pertemuan bilateral, Wamenkominfo Nezar Patria berbagi gagasan bersama 7 perwakilan pimpinan negara dan satu agenda lunch meeting bersama pimpinan ASEAN dan Asia Pasific. Poin pembahasan di setiap agenda bilateral tersebut dapat kami rangkum sebagai berikut :



1 *Bilateral Meeting* bersama US Acting Special Envoy for Critical and Emerging Technology Amerika Serikat, Dr Seth Center

Indonesia dan Amerika Serikat membuka peluang kerja sama pengembangan AI sebagai tindak lanjut dari komitmen kedua negara yang telah menjalin hubungan kerja sama strategis di berbagai bidang. Indonesia menilai negara Paman Sam tersebut sukses dalam pengembangan tata kelola AI sehingga menjadi *benchmark* bagi negara lain.



2 *Bilateral Meeting* bersama Menteri Digitalisasi Belanda, Alexandra van Huffelen

Bersama Pemerintah Belanda, Indonesia melihat peluang kerja sama dalam tata kelola Generative AI dan peningkatan sumberdaya manusia. Bagi Indonesia, pengaturan Generative AI di Belanda cukup relevan dengan Indonesia misalnya pada sektor pendidikan untuk membangun talenta digital yang berkompeten dan handal.



3 *Bilateral Meeting dengan Vice Minister of Education People's Republic of China, Wang Jiayi*

Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah China khususnya dalam pemanfaatan dan pengembangan ekosistem AI. Indonesia melihat China sebagai mitra strategis karena pengalamannya terkait data sains dan machine learning. Dua ekosistem AI tersebut dinilai relevan dengan program yang telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia.



4 *Bilateral Meeting dengan Wakil Menteri Kebudayaan Lithuania, Vyginas Gasparavicius*

Dari kawasan Eropa, Indonesia mencoba menjajaki kerja sama dengan Lithuania dalam pengembangan ekosistem teknologi dan pengembangan AI. Pemerintah Lithuania melihat Indonesia sebagai mitra strategis baru karena memiliki potensi kerja sama. Sementara itu, Pemerintah Indonesia mengapresiasi keberhasilan Lituania yang sukses melakukan transformasi digital di negaranya.



5 *Bilateral Meeting bersama Wakil Sekretaris Jenderal dan Utusan Teknologi UNSG, Amandeep Singh Gill*

Peluang Indonesia menjadi episentrum pengembangan AI di kawasan AI dan Asia Pasifik juga dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Utusan Sekretariat Jenderal. Bagi PBB, Indonesia adalah negara strategis karena memiliki populasi penduduk terbanyak keempat di dunia sehingga dapat menjadi episentrum dalam *emerging technology* di kawasan.



6 *Bilateral Meeting* dengan Duta Besar untuk Urusan Digital Kementerian Luar Negeri Estonia, Nele Leosk

Masih bersama negara di kawasan Eropa. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria juga menerima undangan bilateral dari Pemerintah Estonia. Sama dengan Lituania, Indonesia juga ingin menjajaki peluang kerja sama dengan Estonia untuk akselerasi transformasi digital, khususnya penerapan e-Government.



7 *Bilateral Meeting* Asisten Direktur Jenderal untuk Sosial dan Kemanusiaan UNESCO, Gabriela Ramos

Sebagai mitra strategis, UNESCO menyambut baik pengembangan ekosistem AI di Indonesia. Pertemuan bilateral tersebut, Wamen Nezar Patria menyampaikan komitmen Indonesia menjadi bagian dalam perkembangan AI di kawasan. Bahkan, Indonesia bisa menjadi episentrum di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik dengan mengusulkan kesiapannya menjadi tuan rumah dalam penerapan Readiness Assessment Methodology (RAM) yang tengah disusun oleh UNESCO.

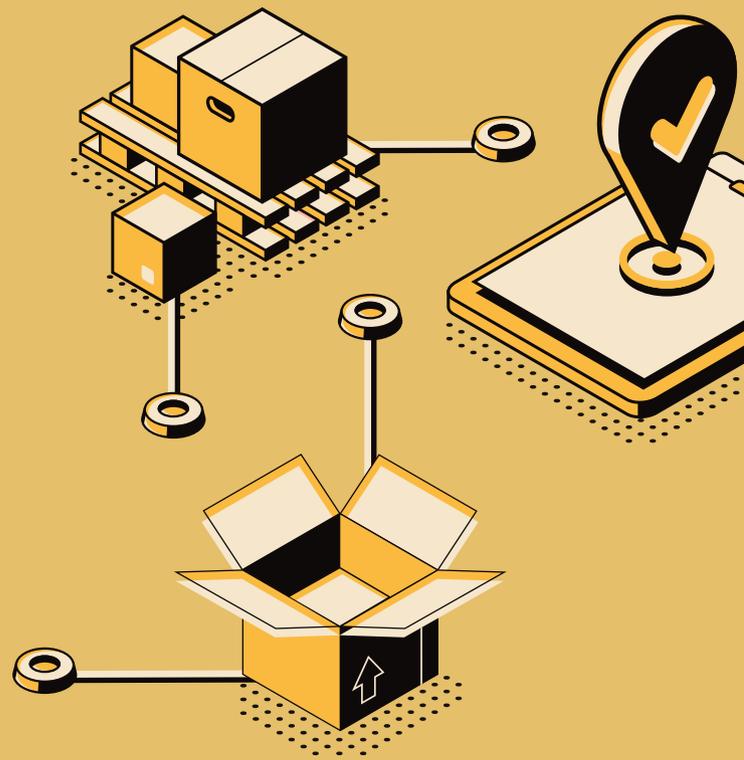


8 *Lunch Meeting* bersama Pimpinan Negara Kawasan ASEAN dan Asia Pasifik

Di sela agenda Global Forum UNESCO, Wamenkominfo Nezar Patria bersama sejumlah pemimpin negara ASEAN dan Asia Pasifik melakukan pertemuan hangat yang mendiskusikan peluang kerja sama strategis. Dalam pembahasannya, Indonesia menyatakan siap menjadi tuan rumah atau sebagai pelaksana dalam pembahasan RAM Etika AI di kawasan pada tahun 2024. (lrso)

Alur Penyelenggara Pos Dinas Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2023, tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya, para penyelenggara pos dapat mengajukan permohonan Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya. Dengan berlakunya peraturan tersebut, berikut adalah langkah yang dapat dilakukan dalam pengajuan permohonan penetapan penyelenggaraan pos dinas lainnya:



1.

Menyampaikan permohonan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

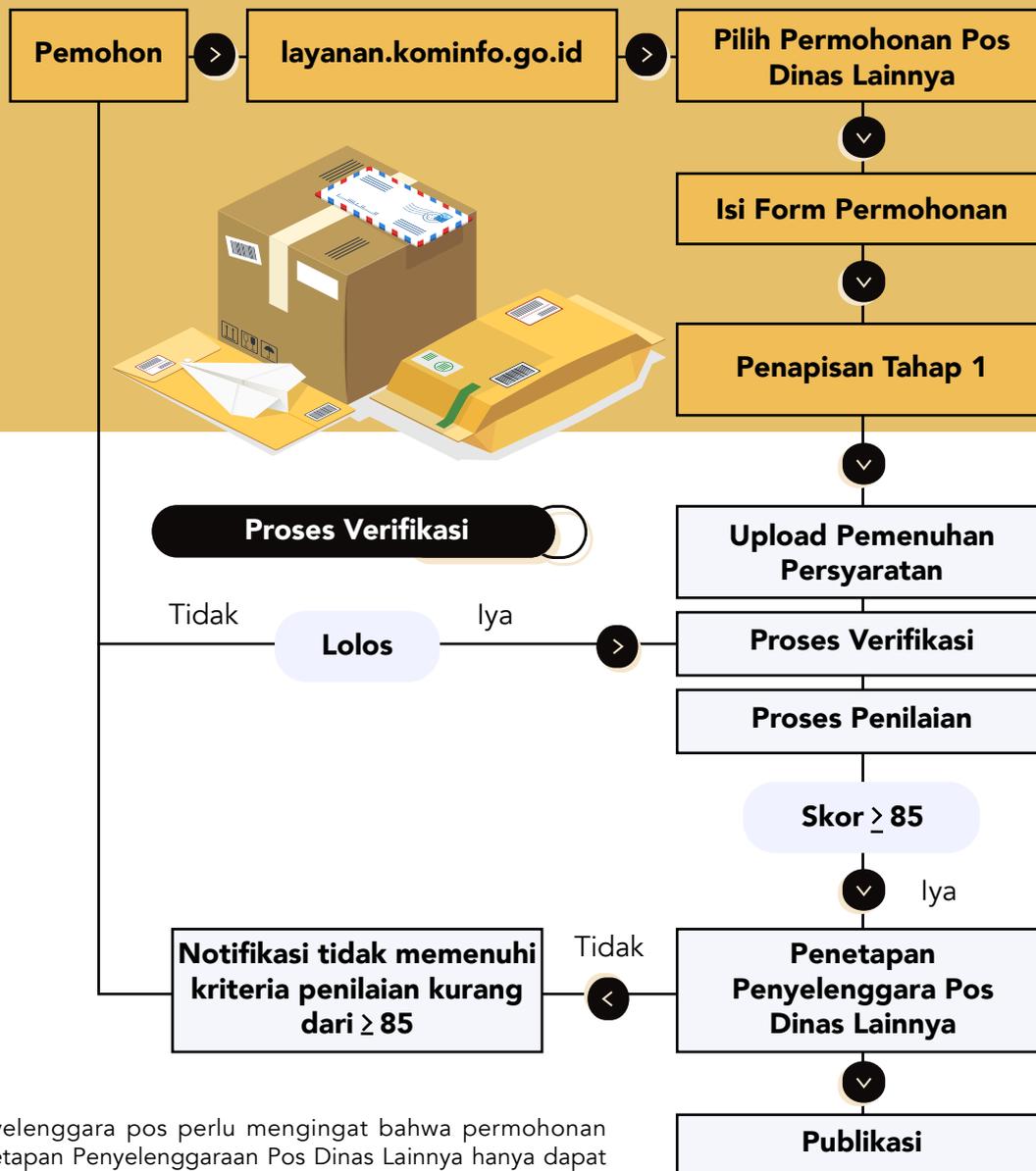
2.

Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya, yang diantaranya;

- a. Laporan penguasaan jaringan Pos
- b. Pengukuran atas kerusakan dan keterlambatan kiriman selama 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Prasarana yang dilengkapi kamera pengawas;
- d. Segel yang digunakan pada moda angkutan dan kantong Kiriman;
- e. Surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan negara;
- f. Standar Operasi dan Prosedur (SOP) untuk semua jenis layanan dan Kiriman;
- g. Struktur organisasi yang menggambarkan adanya unit khusus yang melakukan pengemasan Kiriman;
- h. Menggambarkan proses operasi untuk setiap moda transportasi;
- i. Bukti pemanfaatan sistem pelacakan Kiriman;
- j. Salinan dokumen sertifikasi.



Alur Proses Pos Dinas Lainnya



Penyelenggara pos perlu mengingat bahwa permohonan penetapan Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya hanya dapat dilakukan secara online melalui portal resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni <https://layanan.kominfo.go.id>.

Bagi penyelenggara pos yang telah menyelenggarakan Pos Dinas Lainnya tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri dimaksud.

Apabila ada pertanyaan dan informasi lebih lanjut, penyelenggara pos dapat melakukan konsultasi dan pengaduan melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Depan Lantai 1, atau menghubungi call center 159.

Dukung Transformasi Digital dan Pengawasan Frekuensi Radio,

Menkominfo: Peresmian 19 Fasad UPT untuk Tingkatkan Kinerja

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi serentak meresmikan 19 Fasad dan Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.

Menurut Menteri Budi Arie, kehadiran gedung yang dibangun itu guna meningkatkan pelayanan akses digital kepada masyarakat.

"Digitalisasi merupakan suatu keniscayaan, yang membutuhkan berbagai perangkat dan daya

dukung guna meningkatkan akses sinyal internet yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie juga mengajak untuk terus mengembangkan inovasi agar tetap relevan dan adaptif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

"Saya juga meminta rekan-rekan untuk memperkuat fungsi Ditjen SDPPI agar mampu menjawab tantangan kompleks dalam dunia spektrum frekuensi, maksimalkan otomatisasi pengukuran untuk



meningkatkan akurasi dan efisiensi manajemen ukuran,” ujarnya.

Menkominfo mengapresiasi Ditjen SDPPI yang telah berperan dalam menjaga dan mengelola spektrum frekuensi radio di Indonesia sebagai sumber daya alam yang terbatas namun vital.

“Saya juga mengapresiasi seluruh mitra yang telah berkolaborasi dalam mendukung pencapaian dan kinerja SDPPI untuk menjaga ruang digital kita tetap nyaman digunakan” ujarnya.

Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, saat ini berbagai capaian dan prestasi telah ditorehkan oleh Ditjen SDPPI, yang terbaru yaitu prestasi Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, yang telah mencapai tahap lima besar dalam seleksi nasional jabatan pimpinan tinggi madya terbaik pada Anugerah Aparatur Sipil Negara tahun 2023 lalu yang diselenggarakan Kementerian PAN RB.

“Selamat atas prestasi yang diraih, semoga capaian ini dapat menginspirasi seluruh insan SDPPI dan semua sivitas Kementerian Kominfo,” harapnya.



Saya juga meminta rekan-rekan untuk memperkuat fungsi Ditjen SDPPI agar mampu menjawab tantangan kompleks dalam dunia spektrum frekuensi, maksimalkan otomasi pengukuran untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi manajemen ukuran.

Kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI, Menteri Budi Arie berpesan untuk menjaga soliditas sebagai kunci keberhasilan dalam setiap langkah. Menurutnya hal ini penting untuk dapat mencapai visi bersama. Selain itu, Menkominfo juga mengimbau untuk terus mengembangkan inovasi agar tetap relevan dan adaptif.

Selanjutnya perkuat fungsi SDPPI agar mampu menjawab tantangan kompleks dalam dunia spektrum frekuensi radio serta maksimalkan spektrum pengukuran untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan di lapangan.

“Saya juga meminta rekan-rekan untuk memperkuat fungsi Ditjen SDPPI agar mampu menjawab tantangan kompleks dalam dunia spektrum frekuensi, maksimalkan otomasi pengukuran untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi manajemen ukuran. Mari bersama-sama berkolaborasi dan berinovasi, untuk menciptakan Indonesia yang makin terkoneksi,” ajak Menkominfo.

Menkominfo Budi Arie optimis dengan meningkatkan kinerja SDPPI, dapat mendorong peningkatan kecepatan internet Indonesia, sekaligus mendorong pencapaian teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, Menkominfo mengajak kepada entitas pemerintah dan *stakeholder* dapat berkolaborasi.

“Dengan adanya dukungan nyata dan tindak lanjut, saya yakin ini akan bisa segera terwujudkan” serunya.

Jadi Garda Terdepan Mudahkan Perizinan Frekuensi

Dalam kesempatan itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika juga tengah berupaya menjadi yang terdepan dalam hal melakukan inovasi, transformasi, penerapan semangat kerja, serta peningkatan kolaborasi dalam mendukung agenda strategis Kementerian Kominfo.

Menurut Menkominfo, setiap kantor UPT memiliki ciri khas pola dan simbol khusus pada bagian fasad yang menunjukkan semangat serta kearifan

lokal di setiap daerah (Semangat Perahu Pinisi, para penjaga frekuensi yang tangguh menjaga gelombang frekuensi).

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta peran strategis SDPPI sebagai garda terdepan Kominfo di daerah perlu diberikan penguatan dari sisi input informasi maupun perangkat pendukung dalam pelaksanaan tugasnya.

“Dalam hal ini automasi pengukuran adalah sebuah keharusan, pemanfaatan teknologi menjadi senjata utama guna menciptakan tertib penggunaan frekuensi sehingga kualitas pelayanan (QoS) yang dirasakan masyarakat dapat terjaga,”

Menurut Menteri Budi Arie, kehadiran gedung yang dibangun ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan akses digital kepada masyarakat. Menkominfo menambahkan, selain menjaga penggunaan frekuensi terestrial, frekuensi satelit pun perlu menjadi perhatian kedepan.

“Kebersihan jalur Tol Langit juga perlu diperhatikan. Peningkatan pelayanan masyarakat, digitalisasi kan ke sebuah keniscayaan. Digitalisasi itu memerlukan berbagai perangkat, untuk mendukung kualitas dan juga coverage, terutama bagaimana masyarakat memiliki akses konektivitas atau akses internet yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk berbagai keperluan,” jelasnya.

Simbol Semangat Penghubung Ekosistem

Dirjen SDPPI Ismail menyatakan pembangunan fasad ini merupakan *branding* dalam rangka penanganan gangguan terkait frekuensi. Identitas baru fasad dan ruangan juga merupakan simbol semangat, peran strategis UPT Monitoring SFR sebagai salah satu ujung tombak dalam menghubungkan ekosistem komunikasi dan informatika di daerah.

Oleh karena itu, Ismail menyatakan peningkatan kompetensi dari insan SDPPI menjadi faktor kunci dalam mengembangkan SDM, sehingga perubahan bisa dilakukan secara proporsional.

“Kompetensi dari staf-staf SDPPI ini menjadi faktor kunci bagaimana kami membina, menjaga, agar

terjadi kelangsungan tongkat estafet kompetensi kemampuan dari rekan-rekan senior kepada adik-adik kami yang nanti akan meneruskan semua,” ungkapnya.

Ismail menambahkan SDPPI telah memiliki standar fasad dan interior ruangan untuk seluruh UPT, mulai dari signage, kantor, hingga interior yang berbasis *Activity Base Coworking Space* (ABCS).

“Pembangunan ini merupakan *branding* dalam rangka penanganan gangguan terkait frekuensi. Peremajaan kantor 19 UPT juga telah direncanakan sejak lama. Tidak hanya fisik kantor, pembangunan itu juga menggambarkan semangat dan spirit perjuangan baru Kementerian Kominfo.

Menurut Ismail, hal paling menonjol saat ini terlihat pada jumlah sumber daya manusia di lingkup SDPPI yang didominasi Gen-Z. Mereka bahkan menggawangi dan menjadi penopang tugas operasional Balmon SFR dalam melayani dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai peruntukan.

“Saat ini, di lingkungan SDPPI, jumlah milenial kita sudah semakin banyak. Jadi yang menggawangi dan menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Balmon SFR, mulai dari perizinan, kemudian pengawasan pengendalian, perencanaan dan sebagainya, mayoritas sekarang adalah generasi muda,” tutur Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail.

Lebih lanjut, Dirjen Ismail menjelaskan, tugas Balmon adalah penjaga gawang Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan sumber daya alam terbatas. SFR bahkan kerap menyangkut keselamatan jiwa manusia, seperti sistem penerbangan dan sektor kebencanaan. Termasuk komunikasi selular, juga sektor pemerintahan strategis, pertahanan keamanan dan kepolisian. Sektor-sektor tersebut sangat bergantung pada ketersediaan SFR yang bersih dan aman dari gangguan.

“Kami menjaga komunikasi antara pilot dengan menara kontrol. Kami juga menjaga komunikasi dari sektor kebencanaan. Sepersekian menit setelah terjadinya gempa bumi, ada potensi tsunami seluruh alat yang digunakan BNPB maupun BMKG itu menggunakan SFR. Pada kondisi yang sangat



krusial, SFR tidak boleh terganggu oleh sistem-sistem lain. Ini semua dimonitoring oleh Balmon seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ihsan mengatakan Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di Sulsel, 60 persen berada di daerah dataran tinggi dan 40 persen di dataran rendah, di mana Gowa merupakan daerah penyangga Kota Makassar yang setiap tahunnya pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan 4 persen.

Berdasarkan hal itu, menurut Adnan, kebutuhan terhadap layanan komunikasi dan telekomunikasi terjadi peningkatan yang sangat cepat sehingga dengan dilakukannya peresmian Gedung Balmon di Gowa ini dapat mendukung kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal teknologi.

“Dengan dilakukannya peresmian hari ini semoga kebutuhan masyarakat kita bisa terlayani dengan baik, karena jika berbicara industri 4.0 yang menuju 5.0, digitalisasi merupakan keniscayaan yang harus kita berikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada, sehingga Balai Monitor (Balmon) SFR ini memiliki peran yang sangat strategis salah satunya dalam melakukan pengawasan dan mengelola frekuensi yang menjadi pondasi penting bagi kelancaran layanan telekomunikasi di seluruh wilayah. Semoga Kementerian Kominfo bisa terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada

seluruh lapisan masyarakat yang ada, khususnya di Kabupaten Gowa,” harapnya.

Menkominfo meresmikan pembangunan infrastruktur gedung kantor UPT Loka Tanjung Selor, Loka Mamuju dan Loka Manokwari serta renovasi fasad 16 UPT yaitu Palu, Makassar, Banda Aceh, Banjarmasin, Ternate, Batam, Palangkaraya, Pekanbaru, Pontianak, Palembang, Manado, Tangerang, Mataram, Manokwari, Jayapura, dan Pangkal Pinang.

Usai meresmikan 19 bangunan Balmon SFR Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, Menteri Budi Arie memantau ketersediaan alat yang ada di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1 Makassar di Jalan Raya Malino Km 18, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Dirjen SDPPI Ismail, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, Kadiskominfo Pemprov Sulsel A. Winarno Eka Putra, Kepala BBSDMP Kominfo Makassar Agung Harimurti, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Makassar Heriyanto, dan Kabalmon SFR Manado Manuelson Jaka Jusuf. (Yusuf)

Peresmian Pembangunan Fasad dan Gedung UPT Balai/Loka Monitor SFR (Spektrum Frekuensi Radio) Kelas I Makassar



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi tiba di lokasi Peresmian Pembangunan Fasad dan Gedung Kantor UPT Balai/Loka Monitor SFR (Spektrum Frekuensi Radio) yang dipusatkan di Kantor Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Makassar, di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024). Saat tiba di lokasi Menteri Komunikasi dan Informatika disambut dengan penyematan Patonro yang merupakan aksesoris penutup kepala khas Sulawesi Selatan.



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi didampingi Dirjen SDPPI Kemkominfo, Ismail, Dirjen PPI Kemkominfo, Wayan Toni Suprianto, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkominfo, Arief Tri Hardiyanto, beserta tamu/undangan saat menghadiri Peresmian Pembangunan Fasad dan Gedung Kantor UPT Balai/Loka Monitor SFR (Spektrum Frekuensi Radio) yang dipusatkan di Kantor Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Makassar, di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi memberikan sambutan saat Peresmian Pembangunan Fasad dan Gedung Kantor UPT Balai/Loka Monitor SFR (Spektrum Frekuensi Radio) yang dipusatkan di Kantor Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Makassar, di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.



Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail memberikan sambutan Peresmian Pembangunan Fasad dan Gedung Kantor UPT Balai/Loka Monitor SFR (Spektrum Frekuensi Radio) yang dipusatkan di Kantor Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Makassar, di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi, didampingi Dirjen SDPPI Kemkominfo; Ismail, Dirjen PPI Kemkominfo;Wayan Toni Suprianto, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkominfo; Arief Tri Hardiyanto, Staf Khusus Menkominfo;Daniel Hutagalung, Kepala Balmon Kelas I Makassar; Heriyanto, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lamba, melakukan penandatanganan prasasti saat Peresmian Pembangunan Fasad dan Gedung Kantor UPT Balai/Loka Monitor SFR (Spektrum Frekuensi Radio)) yang dipusatkan di Kantor Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Makassar, di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi didampingi Dirjen SDPPI Kemkominfo; Ismail, Dirjen PPI Kemkominfo;Wayan Toni Suprianto, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkominfo; Arief Tri Hardiyanto, Staf Khusus Menkominfo;Daniel Hutagalung, Kepala Balmon Kelas I Makassar; Heriyanto, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lamba menyaksikan tayangan video pembangunan Fasad dan Gedung UPT Balai/Loka Monitor SFR beberapa daerah.





Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi, didampingi Dirjen SDPPI Kemkominfo; Ismail, Dirjen PPI Kemkominfo; Wayan Toni Suprianto, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkominfo; Arief Tri Hardiyanto, Staf Khusus Menkominfo; Daniel Hutagalung, Kepala Balmon Kelas I Makassar; Heriyanto, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lamba, berfoto bersama usai meresmikan Pembangunan Fasad dan Gedung Kantor UPT Balai/ Loka Monitor SFR (Spektrum Frekuensi Radio).



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi didampingi Dirjen SDPPI Kemkominfo; Ismail, Dirjen PPI Kemkominfo; Wayan Toni Suprianto, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkominfo; Arief Tri Hardiyanto, Staf Khusus Menkominfo; Daniel Hutagalung, Kepala Balmon Kelas I Makassar; Heriyanto, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lamba menyaksikan tayangan video pembangunan Fasad dan Gedung UPT Balai/Loka Monitor SFR beberapa daerah.

© 2024 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO





© 2024 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi didampingi Pejabat Eselon 1 Kementerian Kominfo, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gowa usai melakukan Peresmian Pembangunan Fasad dan Gedung Kantor UPT Balai/Loka Monitor SFR (Spektrum Frekuensi Radio) berkeliling meninjau langsung fasilitas dan sarana pendukung monitoring frekuensi Gedung Balmon Kelas I Makassar.



© 2024 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO



© 2024 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Budi Arie Setiadi didampingi Dirjen SDPPI Kemkominfo; Ismail, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lamba, memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media usai berkeliling meninjau langsung fasilitas dan sarana pendukung monitoring frekuensi Gedung Balmon Kelas I Makassar.

Pers Sebagai Sarana Pemersatu Bangsa

Oleh : Helmi Fajar Andrianto

Wakil Pimred Majalah KominfoNext

Reformasi politik dan demokratisasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), telah memberikan perubahan signifikan terhadap atmosfer kehidupan pers di Indonesia. Walaupun jika kita merunut pada era sebelum disahkannya UU Pers, lembaga pers tetap menyuarakan kritik dan pandangan-pandangan yang kerap kali berseberangan dengan pemerintah. Namun risiko yang harus dihadapi sangatlah besar dikala itu. Pembredelan menjadi momok yang kerap kali harus dihadapi sebagai sebuah realita. Salah satu lembaga pers yang acapkali menjadi objek pembredelan oleh pemerintah di kala itu seperti Tempo, Detik, dan beberapa media lainnya.



Pasca reformasi, pers seolah bermetamorfosa dan menempatkan dirinya sebagai entitas penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada model yang dikenalkan David Fernández Quijada, seorang pakar media dan komunikasi yang berasal dari Spanyol dalam artikelnya yang berjudul "The Pentahelix: A New Model for Innovative Ecosystems in the Knowledge Society", pers menjadi satu entitas yang turut berperan dalam mengembangkan knowledge society yang berfokus pada industri media dan komunikasi. Tidak berhenti sampai disitu, model ini juga terus berkembang, bahkan menjangkau ranah kehidupan demokrasi hingga transformasi digital di era modern.

Pada ranah demokrasi, masih hangat di benak kita, bagaimana pers turut membangun demokrasi di Indonesia melalui kerja-kerja jurnalistik pada tiap tahapan Pemilu 2024. Berkelindan dengan hal tersebut, pers sebagai entitas demokrasi, juga menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pesta demokrasi, melalui pemberitaan yang mengangkat dinamika hingga pro-kontra terhadap isu yang muncul di publik. Sebagai bentuk nyata dalam turut menjaga demokrasi, beberapa lembaga pers bahkan menayangkan reportase *quick count* Pemilu hingga 48 jam non-stop disertai analisis para ahli yang secara langsung memberikan edukasi sebagai bahan pengambilan keputusan masyarakat.



Nilai-nilai jurnalistik pers dalam menjaga akurasi, independensi, keadilan, kerahasiaan, kemanusiaan, akuntabilitas, hingga transparansi, menjadi jurus ulgi dalam melawan disinformasi di media sosial.



Spirit kehidupan pers yang saat ini sudah berada *on the track* sebagai amanah reformasi, hendaknya terus dijaga dan diperkuat. Pemerintah memiliki peran penting dalam turut menjaga pers yang sehat di tanah air. Melihat pada bagaimana respon pemerintah terhadap pemberitaan maupun pernyataan para narasumber di media yang cenderung mengkritik dan berseberangan dengan pemerintah, mencerminkan bagaimana pemerintah berkomitmen untuk turut menjaga kebebasan pers yang bertanggungjawab. Pendapat publik dapat disampaikan tanpa ada kekhawatiran maupun ketakutan akan adanya pembredelan maupun intimidasi terhadap lembaga pers, hal yang tentunya tidak akan kita temukan di masa sebelum lahirnya UU Pers.

Berbeda dengan ranah demokrasi, dimana pers sudah berpengalaman dalam menjalani berbagai macam dinamikanya terutama di Era Orde Baru, digitalisasi menjadi aspek yang relatif baru bagi dunia pers. Serba-serbi dan pola isu pada aspek ini membutuhkan penyesuaian, dampak dari disrupsi yang muncul dalam prosesnya. Tidak terhitung bagaimana lembaga pers 'dipaksa' beralih dari platform cetak ke digital agar tetap bertahan dan kokoh di tengah gelombang. Perjuangan



pers ditengah digitalisasi tidak berhenti sampai disitu, munculnya *new media* dalam bentuk media sosial, menjadi primadona baru bagi masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Pers dihadapkan pada munculnya pesaing dan bentuk baru media informasi dengan segenap kemolekan dan berbagai atributnya yang menggoda konsumen informasi tanah air.

Bersama kesulitan, ada kemudahan dan potensi yang muncul bagi lembaga pers. Disinformasi menjadi faktor pembeda antara media sosial dengan pers yang menerapkan jurnalistik profesional dalam prosesnya. Munculnya berbagai disinformasi dan misinformasi di media sosial yang sulit dibendung, menempatkan pers sebagai penjaga gerbang dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di masyarakat. Peran lembaga pers terletak pada kemampuannya untuk memberi kejelasan dan membangun kepercayaan melalui konten terverifikasi sebagai hasil dari penerapan standar etika jurnalistik dan profesionalitas jurnalis. Nilai-nilai jurnalistik pers dalam menjaga akurasi, independensi, keadilan, kerahasiaan, kemanusiaan, akuntabilitas, hingga transparansi, menjadi jurus ulit dalam melawan disinformasi di media sosial. Potensi disinformasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dapat dinetralisir dengan hadirnya produk-produk jurnalistik berkualitas dari lembaga pers.

Melihat lebih jauh hubungan antara pers dengan platform media sosial, ternyata tidak sesederhana kisah Romeo dan Juliet. Disatu sisi, media sosial

menjadi partner lembaga pers untuk turut mengamplifikasi produk-produk jurnalistik kepada masyarakat. Memanfaatkan jangkauan media sosial dan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 79,5% (APJII, 2024), potensi masyarakat mengakses produk jurnalistik yang diterbitkan makin terbuka lebar yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pendapatan lembaga pers melalui iklan.

Sisi lain hubungan antara pers dan media sosial terletak pada agregasi berita dan juga pembagian keuntungan ekonomi dalam prosesnya. Hal ini menimbulkan persaingan dan isu mengenai hak cipta antara kedua ekosistem ini. Berkaca pada negara lain yang sudah selesai dengan permasalahan ini, seperti misalnya Uni Eropa dengan EU Copyright Directive yang mewajibkan platform untuk terlebih dahulu memperoleh pelimpahan hak penggunaan konten penerbit, atau bahkan di Jerman yang pada tahun 2013 telah menjamin hak penerbit (dalam hal ini lembaga pers) untuk menerapkan tarif atas konten yang direproduksi atau dimanfaatkan platform media sosial atau agregator berita. Agar persaingan ini dapat menjaga kesehatan ekosistem pers dan platform media sosial, pemerintah mau tidak mau harus turun tangan untuk mendapatkan titik keseimbangan dan menjaga ekosistem bisnis di kedua entitas ini.

Menilik bagaimana peran pers pada aspek demokrasi dan digitalisasi di Indonesia, nampaknya slogan Televisi Republik Indonesia di tahun 90an yang cukup melekat terutama di benak Gen X dan Y : "Menjalin Persatuan dan Kesatuan", menjadi sebuah harapan nyata tentang bagaimana pers dapat menjalankan perannya sebagai entitas kelima unsur Pentahelix di masa ini dan masa depan. Selamat Hari Pers Nasional bagi segenap insan pers Indonesia - Pers : Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa!



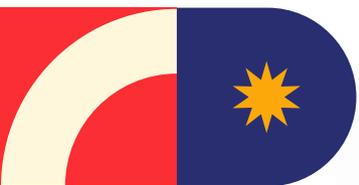


Melek Digital Pakai Nalar? Yuk, Baca “Bernalar Sebelum Klik”!

Sebuah Panduan Literasi Digital

Oleh : Nurul Hidayah Putri

Analisis Kebijakan Ahli Muda Ditjen IKP



Suka gemes sama isi Whatsapp Group yang isinya tautan informasi yang sering gak sinkron dengan caption-nya? Gemes sama kenalan yang tiba-tiba mengirimkan file .apk? Butuh insight atau kutipan yang jitu untuk menghadapi orang-orang seperti itu?

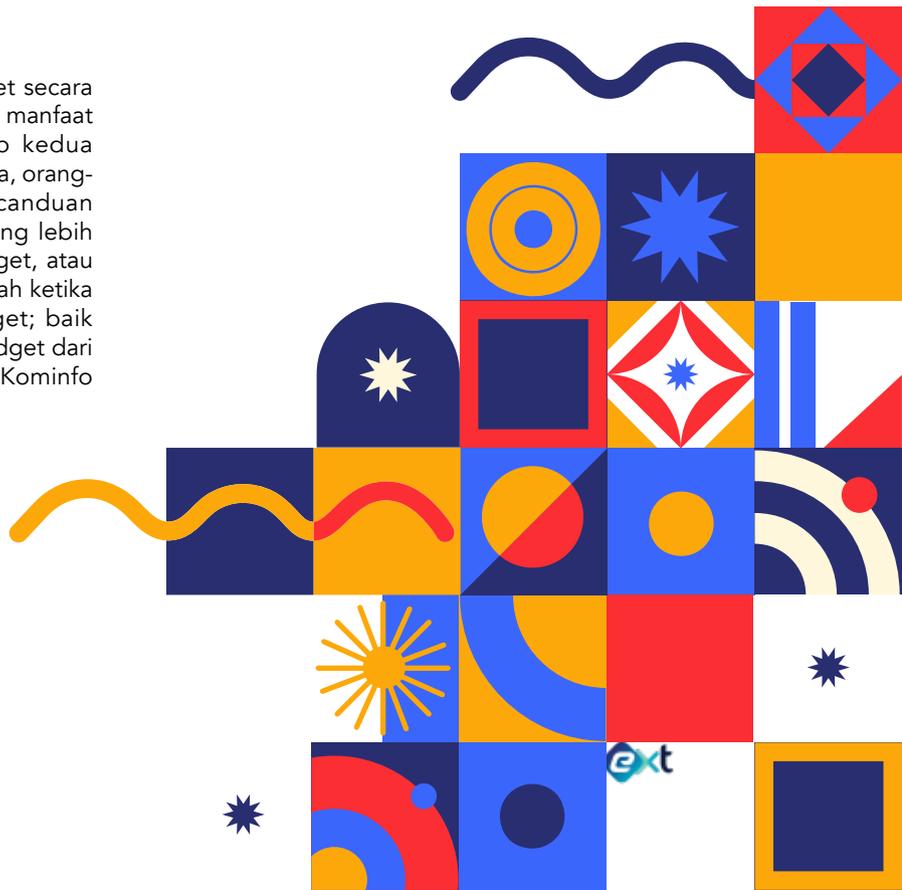
Mungkin saatnya kita kulik buku dari peneliti media dan komunikasi, Agus Sudibyo yang saat ini juga mengampu Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, televisi publik kebanggaan kita bersama. Penulis menganggap digitalisasi yang sudah tidak terhindari ini memiliki pengaruh negatif yang perlu dipahami secara benar oleh masyarakat. Misalnya saja, pengguna internet yang menggunakan layanan digital semestinya paham akan dampak penggunaan layanan tersebut. Masyarakat perlu juga menyadari ketika menjadi objek pengawasan digital dan penambangan data pribadi. Berangkat dari keresahan-keresahan inilah, buku panduan ini bermula.

Buku yang dibuka oleh pengantar dari Wakil Menteri Koinfo, Bapak Nezar Patria ini membabaki enam tema. Tema buku panduan literasi digital ini terdiri dari: Internet Safety, Panduan Berinternet secara Aman; Ciri dan Kiat Mengatasi Kecanduan Gadget; Penipuan Online: Modus dan Kiat Menghadapinya; Selamatkan Privasi dan Data Diri Anda; Enam Alasan Mengurangi Ketergantungan pada Layanan Cloud; Menghindari Jerat Pidana UU ITE; Panduan Etis Bermedia Sosial; serta Pemilu, Pemilih Rasional, dan Media Sosial.

Bab pertama berisi panduan berinternet secara aman dengan mengajarkan prinsip dan manfaat dari Internet Safety. Sedangkan bab kedua memberikan informasi terkait ciri dan kita, orang-orang di sekitar kita mengalami kecanduan internet. Jika mengenali seseorang yang lebih banyak berinteraksi sosial dengan gadget, atau istilahnya anti sosial, hingga marah-marah ketika diminta berhenti menggunakan gadget; baik juga kulik kiat mengatasi kecanduan gadget dari buku ini. Dalam konteks Kementerian Koinfo

ikut mengawasi konten-konten penipuan online, penulis juga menjelaskan macam-macam modus penipuan online di bab ketiga. Jenis-jenisnya dari phishing hingga social engineering dijelaskan cukup rinci disertai contoh kasusnya. Dari sini secara gamblang penipuan online lebih mudah dikenali. Kiat-kiat menghadapi modus penipuan ini juga dijelaskan dengan mudah, dari kiat sederhana seperti tidak tergiur tawaran hadiah, berhati-hati menerima pesan dari orang asing, hingga penggunaan aplikasi pengamanan ekstra ketika berselancar di dunia maya.

Pada bab terakhir dan tampaknya sangat relevan dengan situasi terkini, penulis membeberkan bagaimana isi media sosial perlu dicerna oleh pengguna. Akankah pengalaman-pengalaman di negara lain terkait pro-kontra narasi pemilihan kepala negara/daerah dan legislatif perlu dijadikan renungan? Semuanya bisa dikulik di dalam buku ini, beserta panduan menghadapinya, bahkan termasuk cara menghindari jerat pidana dari UU ITE. Buku ini tersedia di Perpustakaan Koinfo ya, SobatKom.



Lahirkan Inovasi, Hantarkan Wahyudi Jadi ASN Berprestasi

Bertepatan dengan Acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22, Kementerian Kominfo memberikan penghargaan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi. Dalam Penghargaan ASN Berprestasi tersebut, terdapat beberapa kategori, diantaranya Pemimpin Perubahan Terbaik, ASN dengan Inovasi Terbaik, ASN dengan Ide Baru Terbaik, dan ASN Inspiratif. Penghargaan ASN Berprestasi pada kategori ASN dengan Inovasi Terbaik diraih oleh Wahyudi Sri Nugroho dari BBPPT SDPPI.

Inovasi yang dibuat saat itu adalah Software Otomatisasi Pengujian Bluetooth berbasis desktop, yang digunakan untuk membantu proses pengujian fitur bluetooth pada perangkat telekomunikasi. Software tersebut memiliki kemampuan untuk mengontrol alat ukur berupa Spectrum Analyzer. Selain itu, software pengujian ini dapat melakukan pengaturan parameter yang dibutuhkan secara otomatis, melakukan pengukuran secara otomatis, dan menyajikan data yang telah

diperoleh untuk kemudian dituangkan ke dalam format Laporan Hasil Uji (LHU).

Lahirnya Software Otomatisasi Pengujian Bluetooth ini berawal dari kegelisahan Wahyudi sebagai Penguji Perangkat Telekomunikasi yang saat itu melakukan proses pengambilan data secara manual. Proses yang dilakukan secara manual ini tentunya lebih rumit, sehingga Wahyudi berpikir untuk menemukan cara yang lebih mudah.

“Saat itu, saya ngulik alat ukur yang digunakan agar prosesnya bisa dilakukan secara otomatis saja, sehingga dapat lebih memudahkan. Saya pikir, masa sih alat yang canggih dan mahal seperti ini tidak bisa dikontrol?” ujar Wahyudi.

Untuk mengatasi permasalahannya tersebut, Wahyudi mendapatkan saran untuk menggunakan LabView yang merupakan salah satu software pemrograman untuk mengontrol alat ukur. Setelah dilakukan beberapa kali pelatihan, pada tahun 2018 hingga saat ini, Software Otomatisasi Pengujian Bluetooth telah dimanfaatkan oleh para penguji serta asisten penguji.

“Dengan adanya pemanfaatan software ini, mendorong kami untuk memperluas cakupan otomatisasi pengujian yang dapat meningkatkan layanan pengujian dari sisi kecepatan dan mengurangi human error,” Jelas Wahyudi.

Dengan adanya pemanfaatan software ini, mendorong kami untuk memperluas cakupan otomatisasi pengujian yang dapat meningkatkan layanan pengujian dari sisi kecepatan dan mengurangi *human error*





Keberhasilan Wahyudi dalam membuat inovasinya itu, tidak terlepas dari dukungan pimpinan yang telah memberikan berbagai kesempatan. Mulai dari memfasilitasi pelatihan, hingga membantu pengadaan alat-alat yang dibutuhkan untuk mempermudah proses pengujian.

“Sejak tahun 2019 sampai sekarang, dukungan bahkan dorongan pimpinan untuk otomatisasi ini besar. Dukungan anggaran juga selalu siap untuk program yang dapat meningkatkan layanan pengujian di BBPPT, termasuk program pembuatan otomatisasi pengujian,” pungkas Wahyudi.



“**Bagi Saya, dengan terpilihnya menjadi ASN Berprestasi, ini membuat Saya menjadi lebih percaya diri dan memberikan motivasi baik bagi diri Saya maupun rekan-rekan yang lainnya untuk bekerja lebih baik serta mencari ruang inovasi lain**”



Setelah Jadi ASN Berprestasi, Emang Masih Harus Berinovasi?

Bagi Wahyudi, mendapatkan Penghargaan ASN Berprestasi bukan menjadi tujuan utama, namun penghargaan tersebut seharusnya menjadi motivasi untuk melahirkan inovasi-inovasi lainnya. Setelah membuat Software Otomatisasi Pengujian Bluetooth, Wahyudi akan kembali membuat inovasi yang berguna untuk melakukan otomatisasi penyusunan Laporan Hasil Uji (LHU). Inovasi tersebut nantinya akan membantu optimalisasi software yang sebelumnya telah dibuat. Sebab, meskipun alat ukur sudah mampu melakukan pengambilan data melalui pengukuran, namun bentuk output-nya belum sesuai dengan format yang telah ditentukan.

“Lalu, apakah kami berhenti setelah punya alat ukur yang lebih canggih? Tidak. Kami akan melakukan peningkatan melalui otomatisasi dalam penyusunan Laporan Hasil Uji (LHU) yang sesuai dengan format yang ditentukan. Selain itu, tahun ini rencananya kami juga akan mengembangkan Otomatisasi LHU pengujian EMC,” ujar Wahyudi.

Meskipun bukan menjadi tujuan utama, namun hadirnya Penghargaan ASN Berprestasi mampu



membawa dampak positif bagi para ASN di lingkungan Kementerian Kominfo. Penghargaan ini juga diyakini dapat memicu ASN dan satuan kerja untuk membuat suatu inovasi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Bagi Saya, dengan terpilihnya menjadi ASN Berprestasi, ini membuat Saya menjadi lebih percaya diri dan memberikan motivasi baik bagi diri Saya maupun rekan-rekan yang lainnya untuk bekerja lebih baik serta mencari ruang inovasi lain,” jelas Wahyudi.

Dalam prosesnya, pemilihan ASN Berprestasi ini dapat diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Kominfo dengan melewati proses penilaian oleh juri. Sehingga, ASN yang berpartisipasi tentunya harus mempersiapkan karya atau inovasi terbaiknya. Latar belakang dan urgensi dari inovasi yang dibuat menjadi nilai utama dalam pemilihan karya ASN Berprestasi. Para kandidat harus mempersiapkan inovasinya sebaik mungkin dan tetap mengutamakan kebermanfaatannya serta mempersiapkan rencana pengembangan atas inovasi di masa mendatang.

“Dalam pembuatan *software* otomatisasi, Saya lakukan dengan tekun dengan tujuan utamanya, murni untuk meningkatkan nilai proses pengujian yang ada. Tidak disangka karya yang Saya buat mampu mengantarkan Saya Menjadi ASN Berprestasi pada tahun 2023. Saya yakini tidak ada proses yang mengkhianati hasil,” ujar Wahyudi. (Adelia)

Perluas Akses Informasi Melalui PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hadirnya PPID, membuat informasi di lingkup pemerintahan menjadi sesuatu yang mudah untuk didapatkan. PPID sendiri merupakan suatu keharusan bagi setiap badan publik dan diselenggarakan sesuai Amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ruang PPID Kementerian Kominfo terletak di Gedung Belakang Lantai 1, Kantor Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Waktu operasional pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja, dari

Senin hingga Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dan dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

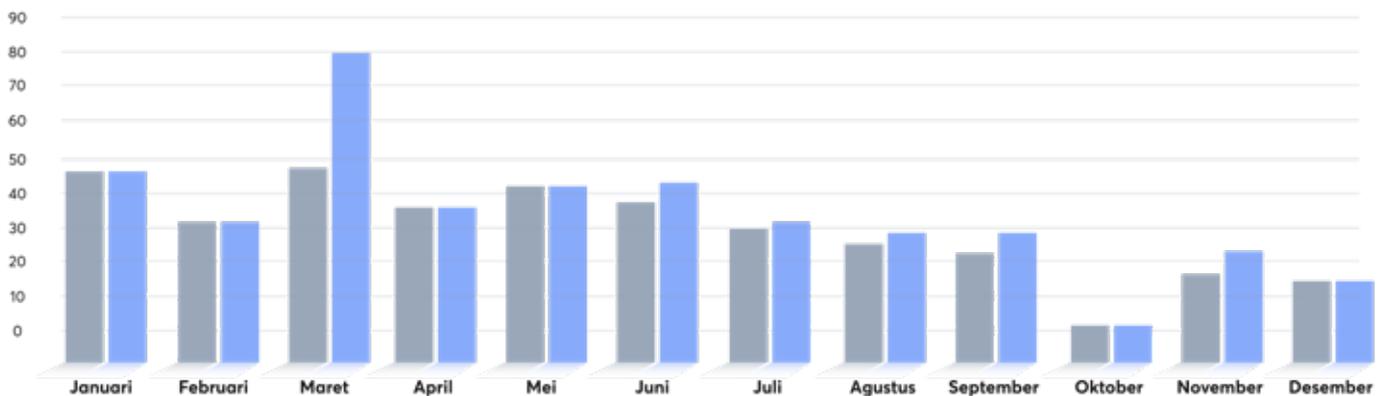
Selama 14 tahun kiprah PPID Kementerian Kominfo dalam memberikan layanan informasi publik, PPID terus berbenah untuk menghadapi berbagai tantangan yang terus hadir. Hingga bulan Desember 2023, PPID Kominfo telah menerima 6.995 permohonan informasi publik dari 3.112 pemohon informasi. Pemohon informasi berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari mahasiswa/akademisi, lembaga swadaya

masyarakat, perusahaan pemangku kepentingan sektor kominfo, maupun ASN kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Layanan informasi yang dilakukan, selain tentunya pelayanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui email, website, serta sambungan telepon dan faksimile. Pada tahun 2022, jalur layanan melalui telepon dan faksimile digabungkan melalui sambungan telepon terpusat di Biro Hubungan Masyarakat. Selain itu, PPID juga beradaptasi dengan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi, dengan menyediakan akses layanan melalui media digital melalui pesan singkat WhatsApp Messenger 0811-56-3344.

Tren penggunaan aplikasi digital yang semakin marak sejak tahun 2010 lalu, juga terus dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Melalui platform eppid-sikelip.kominfo.go.id, PPID memberikan opsi layanan bagi

Trend Pemohon & Permintaan Tahun 2023



Rekapitulasi PPID Tahun 2023

	Jumlah						Rata - Rata Waktu Penyelesaian
	Pemohon	Permintaan	Pemohon Dipenuhi	Pemohon Ditolak	Permintaan Dipenuhi	Permintaan Ditolak	
Januari	47	47	46	1	46	1	1 Hari 1 Jam 1 Menit
Februari	31	31	30	1	30	1	4 Jam 6 Menit
Maret	44	80	41	3	76	4	6 Jam 8 Menit
April	33	33	33	0	33	0	2 Hari 1 Jam 4 Menit
Mei	41	41	41	0	41	0	1 Hari 4 Menit
Juni	38	43	38	0	43	0	1 Hari 8 Menit
Juli	30	31	30	0	31	0	1 Hari 45 Menit
Agustus	25	29	24	1	28	1	1 Hari 12 Menit
September	23	29	23	0	29	0	1 Hari 18 Menit
Oktober	11	11	11	0	11	0	2 Jam 51 Menit
November	16	23	16	0	23	0	3 Jam 8 Menit
Desember	16	16	16	0	16	0	32 Menit
Total	355	414	349	6	407	7	

masyarakat untuk bisa meminta informasi secara daring. Dengan konsep ticketing, melalui aplikasi ini, pemohon informasi bisa memantau secara realtime, progress permintaan informasi yang dilayangkan kepada PPID Kementerian Kominfo.

Dalam pelaksanaannya, setiap PPID badan publik dimonitoring dan dievaluasi secara periodik setiap setahun sekali oleh Komisi Informasi Pusat. Monitoring dan evaluasi tersebut terus dilakukan secara konsisten sejak tahun 2010.

Pada tahun 2018, mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat

mengalami perubahan yang cukup signifikan. Penilaian yang sebelumnya menggunakan peringkat nilai, diubah dengan menggunakan predikat. Sejak perubahan mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut, PPID Kementerian Kominfo terus mendapatkan predikat tertinggi yaitu INFORMATIF hingga tahun 2023 lalu. Harapannya, di tahun ini PPID dapat mempertahankan predikat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2023 untuk pertama kalinya PPID Kementerian Kominfo diikutsertakan sebagai salah satu unit pelayanan publik dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam pemantauan ini, dilakukan assesment baik di internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, hingga pihak eksternal dari Kementerian PAN dan RB. PPID Kementerian Kominfo mendapatkan hasil kualifikasi tertinggi yaitu nilai A dengan predikat Layanan Prima bersama tiga unit layanan publik lainnya di Kementerian Kominfo. (Bagus Ananto)





Ngopi Bareng Kominfo

Ajang Ngobrol Santai bersama Media

Hubungan antara pemerintah dan media saling terkait dan membutuhkan satu sama lain, sehingga perlu terus dibina dengan baik dan harmonis. Sebagai mitra strategis, pemerintah membutuhkan media untuk mendiseminasikan informasi terkait program, kebijakan dan isu yang ada di Kementerian Kominfo kepada masyarakat.

Saat ini Kementerian Kominfo memiliki peranan penting dalam mengentaskan kesenjangan akses digital di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur TIK yang merata di seluruh Indonesia. Selain aspek pemerataan, penyediaan infrastruktur digital juga mengedepankan kualitas dan konektivitas ultrafast berkapasitas tinggi beserta ekosistem infrastruktur pendukungnya untuk mendorong pengembangan dan penerapan teknologi next gen connectivity atau teknologi baru di masa depan. Kementerian Kominfo juga

memiliki program-program untuk peningkatan literasi, kecakapan dan keterampilan digital dilakukan melalui berbagai pelatihan.

Untuk memastikan program, kebijakan dan isu yang ada di Kemkominfo ini bisa diketahui dan tersosialisasikan kepada masyarakat maka dibutuhkan peranan dari media untuk mendiseminasikan informasi melalui pemberitaan media. Sehingga dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan media. Salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan dan mempererat hubungan baik dengan rekan-rekan jurnalis adalah dengan mengadakan acara Ngopi Bareng Kominfo.

Ngopi Bareng Kominfo ini menjadi agenda rutin yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dengan format ngobrol santai dengan

rekan-rekan jurnalis untuk membahas program kerja dan kebijakan Kementerian Kominfo dengan menghadirkan narasumber mulai dari para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2.

Konsep santai dengan menghadirkan narasumber dikelilingi para jurnalis duduk lesehan juga diharapkan mampu membuat diskusi berjalan tidak kaku, rileks dan suasana cair sehingga baik narasumber dan jurnalis bisa berdiskusi dua arah. Hingga saat ini Ngopi Bareng Kominfo sudah empat kali dilaksanakan dan antusiasme dari para jurnalis juga sangat baik. Beberapa jurnalis yang dimintakan pendapat, saran dan masukannya mengatakan bahwa acara Ngopi Bareng ini bagus bagi wartawan untuk bisa mem-follow up isu dan informasi terbaru dari tiap direktorat.

Ngopi Bareng Kominfo (Dirjen SDPPI)

Edisi perdana Ngopi Bareng Kominfo menghadirkan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos (SDPPI), Ismail dan membahas mengenai tugas dan fungsi dari Direktorat SDPPI dan isu lain mulai dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor digital juga membahas mengenai mekanisme insentif untuk penyelenggara layanan telekomunikasi.

Dirjen SDPPI mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan kajian mengenai mekanisme insentif bagi operator seluler. Bahkan meminta masukan dari Kementerian Keuangan serta instansi lain. "Pemerintah telah meminta masukan dari kalangan industri seluler. Kompetisi harga antar operator seluler yang terjadi selama ini ternyata mengancam keberlanjutan perusahaan seluler," tuturnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan digital kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan penambahan Base Transceiver Station (BTS) yang membutuhkan alokasi investasi operator seluler. "Perlu penambahan BTS supaya tidak ada *blank spot*. Bukan karena tidak ada BTS tetapi yang menggunakan terlalu banyak. Penggunaan saat jam sibuk dengan malam hari beda. Itu profil *traffic* yang harus dihitung operator seluler supaya masyarakat dapat menikmati layanan optimal," jelas Dirjen Ismail.



Ngopi Bareng Kominfo (Kabadan Pengembangan SDM)

Kepala Badan Pengembangan SDM Hary Budiarto menjadi narasumber Edisi Kedua Ngopi Bareng Kominfo. Pada ngobrol bareng kali ini, Kabadan Pengembangan SDM menegaskan peran penting BPSDM dalam mengembangkan sumber daya manusia di era digital. Menurutnya, Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan SDM di bidang komunikasi, IT, dan telekomunikasi.

Badan Perencanaan Sumber Daya Manusia memiliki fokus pada tiga bidang utama, yaitu komunikasi, informatika (IT), dan telekomunikasi. Dalam visi Indonesia Digital 2045, terdapat empat pilar utama, salah satunya adalah masyarakat digital. BPSDM memiliki peran khusus dalam mengembangkan pilar ini, dengan fokus pada membentuk SDM yang kompeten di berbagai bidang digital.

Konsep pengembangan SDM digital tersebut mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, pentingnya memiliki standar kompetensi untuk mengukur kemampuan SDM digital. Menurut Kepala BPSDM, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah mengeluarkan standar kompetensi kerja yang berlaku secara nasional, termasuk dalam bidang jurnalistik.



Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman, konsep translasi atau antarmuka diterapkan melalui pembuatan peta okupasi. Peta okupasi ini mencakup berbagai level, mulai dari level 1 hingga level 9, yang telah ditetapkan secara nasional untuk berbagai profesi, termasuk bidang jurnalistik.

BPSDM Kominfo memiliki beberapa program utama dalam upayanya untuk mengembangkan SDM digital. Salah satu program tersebut adalah Digital Leadership Academy (DLA), yang ditujukan untuk para pemimpin dengan level sertifikasi 8 atau 9. DLA bekerja sama dengan universitas-internasional ternama seperti Harvard, Cambridge, dan MIT.

Selain itu, terdapat Digital Talent Scholarship untuk mahasiswa dengan dua akademi, yaitu Vocational School Graduate Academy (VSGA) dan Talent Scholarship Academy (TSA). Program ini dirancang untuk memastikan bahwa kompetensi yang diajarkan di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan industri.



Ngopi Bareng Kominfo (Dirjen Aptika)

Pada Edisi ketiga Ngopi Bareng Kominfo, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A. Pangerapan menyatakan temuan kejanggalan dalam akun X (dulu twitter) pasangan calon Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 disebabkan ada aktivitas bot spam.

"Saya baru dapat beritanya tadi pagi. Saya sudah kontak ke X. Jadi keyword Mahfud itu, ada yang mengirim pesan spam. Banyak itu bot spam. Ada keyword-nya itu. Ada beberapa, tadi saya lihat," ungkapnya.

Bot spam secara otomatis menyebarkan pesan spam dengan akun palsu di platform X. Sesuai

penjelasan Kantor X Singapura, Dirjen Samuel menyatakan akibat bot spamming, keyword dengan nama Mahfud yang dikirim sebagai pesan spam dianggap tidak layak di platform X.

"X bilang, sudah melaporkan ke saya juga, sudah temukan bot-nya. Itu ada bot spamming. Nah, tiap kali konten memuat kata atau mention @mahfud terus itu dikategorikan tulisan tidak layak. Karena ada banyak, jadi sama X dibersihkan dulu," tuturnya.

Dalam komunikasi dengan Kantor X di Singapura, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo mendapatkan informasi saat ini X sudah melakukan pemulihan.

"Tadi jam 8:30 saya telepon dari sini ke Singapura, itu dia bilang lagi recovery. Dia mengakui memang ada bot spam yang menyerang. Jadi per tadi jam 09:00 sudah recover," tandasnya.



Ngopi Bareng Kominfo (Ditjen PPI)

Ngopi Bareng Kominfo edisi keempat menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Indra Maulana, Direktur Pengendalian Ditjen PPI Dany Suwardany dan Indra Apriyadi Ketua Tim Pusat Monitoring dan Telekomunikasi.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo telah berupaya maksimal dalam pengembangan Pos dan Informatika untuk masyarakat Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Indra Maulana (Sesditjen PPI) menyatakan bahwa dari target 70% kecamatan yang seharusnya mendapat fasilitas pos, Kominfo telah berhasil mencapai angka 100% sampai dengan Bulan Desember tahun 2023.

“Untuk proyektivitas layanan pos, Kominfo memiliki target 70% kecamatan di seluruh Indonesia untuk tercakup dengan layanan pos. Sampai akhir tahun 2023 progres cakupan layanan pos telah 100% menjangkau seluruh kecamatan, berdasarkan data yang kami cross dengan Kemendagri, yang mana capaian sudah melebihi dari target. Untuk outcome tentunya kita ingin meningkatkan dan mengembangkan industri pos,” jelasnya.

Selain itu, Sesditjen PPI menjelaskan beberapa upaya-upaya lainnya yang sudah dilakukan oleh Kominfo dalam Pengembangan Pos dan Informatika seperti menjatuhkan sanksi administratif bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang melanggar ketentuan undang-undang, melakukan distribusi Set Top Box kepada keluarga miskin, dan peran aktif Kominfo dalam Pemilu 2024 mendatang. “Tugas pemerintah dalam distribusi Set Top Box kepada keluarga miskin telah terpenuhi dengan total 1.357.178 Set Top Box. Namun, Kominfo tetap bekerja sama dengan LPS dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengupayaan jika ada permintaan dari setiap masyarakat yang membutuhkan Set Top Box,” ujar Sesditjen PPI.

Direktur Pengendalian, Dany Suwardany membahas terkait kolaborasi Kominfo dengan

KPU dan BAWASLU untuk Pemilu 2024. “Kominfo dengan ini bekerja sama dengan KPU dan BAWASLU agar secara aktif mengawal jaringan tetap stabil pada saat Pemilu Februari mendatang. Kami selalu mengawal dan melakukan monitoring 1x24 jam, kebetulan pada setiap titik TPS, maka jika terjadi down signal, akan segera kami tindak lanjut”, jelasnya. (Verawati)



Komentar, Saran dan Masukan Jurnalis terkait Ngopi Bareng Kominfo



Livia, Antarane.com

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Acaranya bagus jadi forum untuk kami wartawan bisa *follow up* isu atau pun dapat informasi terbaru dan terkini dari tiap Ditjen.

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Topiknya mungkin bisa dipertajam, kayak misalnya kalau untuk Dirjen Aptika nanti bisa bahas khusus soal UU Publisher Rights, tapi yang penting jangan ngebatasin wartawan buat doorstop. Soalnya sejauh ini topiknya yang diset masih terlalu meluas tapi nggapapa seenggaknya jadi mengulas tugas-tugas di masing-masing ditjen.

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Kalau bisa jangan terlalu pagi acaranya, dan kalau bisa harinya dirutinin kalau misalnya jumat yaudah jumat aja jangan ganti-ganti gitu.



Faisal, Jawapos TV

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Sangat bagus karena dapat mengulas isu yang lebih luas terkait kominfo

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Topiknya bagus tapi kalau narsumnya juga baik tapi hanya saja banyak yang tidak dapat terakup lebih luas

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Kalau bisa narsumnya jika dirjenya langsung atau kepala deputinya agar dapat bicara lebih luas terkait isu



Komentar, Saran dan Masukan Jurnalis terkait Ngopi Bareng Kominfo



Saviera, RRI

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Menurutku cukup efektif, terimakasih juga Kominfo sudah memfasilitasi kegiatan rutin mingguan yang kita bisa ketemu dan nanya langsung dengan narsumnya

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Topiknya mungkin bisa mengikuti yang lagi berkembang/ramai di masyarakat.

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Sarannya, kalo bisa jamnya digeser ke siang setelah solat Jumat supaya ngga mepet waktu solat. Trus usul ada ngopi bareng Menteri atau Wakil Menteri. Misal sebulan sekali atau dua kali ada dialog khusus kayak FMB (red. Forum Merdeka Barat), tapi narsumnya ada menteri sama dirjen, atau undang eksternal mitra-mitranya Kominfo, misal Apjatel, APJII, penyelenggara PSE, Google, Meta, dll yang nantinya kolab dari Kominfo juga.



Agus, Detik.com

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Ngopi Bareng Kominfo, agenda yang harus menarik dan dihadiri di tiap pekannya. Khususnya untuk mengulas informasi dan isu terkini

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Kalau topik kemarin berdasarkan per direktorat, mungkin nanti bisa per isu yang hangat dibicarakan atau agenda kominfo yang akan dikerjakan. Narasumber Eselon I yang dihadiri sudah oke, pertahankan.

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Secara konsep sudah oke, tapi lebih bagus kalau dibarengi dengan bahan persentase dari narasumber agar tidak terjadi kekeliruan seperti pak Semmy yg viral karena aturan game. Jumat pagi itu enak cuma nanggung buat yg pria, karena terhalang waktu jumat



Komentar, Saran dan Masukan Jurnalis terkait Ngopi Bareng Kominfo



Abdul Haris, SCTV

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Harus di bahas topik/isu hangat yang menjadi perhatian di masyarakat

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Bagi jurnalis TV, ngopi bareng di ruangan hanyalah menghasilkan konten/video bernilai seremonial yang tidak menarik untuk pemberitaan media TV, jadi panitia harus menyiapkan video/konten yang berkaitan dengan isu yang dibahasnya

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Kalau mau ngopi bareng itu bagi jurnalis media TV menariknya di out door, narasumber di lepas berbicara dengan masyarakat nya, yang sudah di kontruksi dan di framing dan agenda seting media TV.



Vendy Yhulia, Kontan

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Acara Ngopi Bareng Kominfo menjadi kesempatan bagi media untuk mendapat informasi secara langsung dari narasumber di Kominfo

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Terkait narasumber juga sudah bagus karena menghadirkan narsum yang bergantian dari Direktorat Jenderal yang ada di Kominfo

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Kedepannya semoga Ngopi Bareng Kominfo terus rutin dilakukan, mengangkat tema/isu yang beragam yang merupakan bagian tugas dan kewenangan Kominfo. Misalnya mengangkat tema terkait kebijakan-kebijakan terkait Kominfo, update program-program yang tengah dilalukan, maupun rencana kerja sama atau investasi terkait ekonomi digital, dan pengembangan Kominfo kedepan



Komentar, Saran dan Masukan Jurnalis terkait Ngopi Bareng Kominfo



Nisa, seluler.id

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Menjadi kesempatan baik bagi kami (Media) untuk mendapat informasi aktual dan valid mengenai update tugas (progress program) masing-masing narasumber

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Topik yang dihadirkan sudah sangat sesuai dengan kapasitas narasumber

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Kalau bisa diperluas lagi narasumbernya. Tidak apa lintas kementerian, asal masih berhubungan, misalnya dari kemenkeu saat bahas BHP atau Kemendag saat bahas HP import dari China, dll



Leo, Bisnis Indonesia

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Tjakep. Media menjadi tahu lebih dalam terkait suatu isu.

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Pemilihan narasumber sudah sangat tepat. Orang-orang yang bisa menjelaskan secara detail dan tepat dan bisa dikutip tentunya

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Jamnya yang dipastikan aja tepatnya. Dan kalau bisa jangan mepet sholat Jumat. Didokumentasikan di YouTube juga kalau bisa biar yang kelewatan/ngga bisa hadir, tetap bisa memantau



Ryan Rahman, Inews TV

Pendapat terkait acara Ngopi Bareng Kominfo?

Menurut saya ini bagian dari kegiatan positif bagi kementerian/ lembaga khususnya kominfo, untuk memberikan ruang bagi media dalam memberikan informasi terkait informatika.

Pendapat terkait topik dan narasumber Ngopi Bareng Kominfo?

Sejauh ini narasumber yg dihadirkan memang dibutuhkan terkait perkembangan informasi di bidangnya, akan tetapi kadang ada isu tertentu yg ingin ditanyakan tidak sesuai dengan narasumber yg dihadirkan.

Masukan untuk acara Ngopi Bareng Kominfo

Diharapkan lebih baik kedepan dalam mengedepankan kebutuhan terkini dari jurnalis, tak hanya terkait TIK, melainkan isu strategis lainnya, baik politik maupun isu berkembang.



Saatnya Kita Kuiz!



Mendatan

- 3 panitia yang bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, memastikan keakuratan dan keabsahan informasi pemilih (singkatan)
- 5 kelompok yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi proses pemungutan suara di tempat pemilihan (singkatan)
- 6 lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (singkatan)

Menurun

- 1 daerah-daerah yang dianggap rawan kecurangan atau masalah selama pemilu, memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan dan penanganan potensi risiko
- 2 lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (singkatan)
- 4 rekening bank khusus yang digunakan untuk mengelola dana kampanye calon atau partai politik (singkatan)



5 orang pemenang beruntung akan mendapatkan bingkisan menarik.

Jawaban dapat dikirim ke majalahkominfonext@kominfo.go.id
dengan subject: **Kuis Kominfonext Februari 2024.**

Sehat Bersama KominfoRunner



LARI merupakan olahraga tertua yang pernah ada, mulai dari zaman prasejarah hingga era modern seperti saat ini. Fungsinya pun terus berkembang, dari berburu untuk bertahan hidup, kompetisi atletik tingkat dunia, dan hingga saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat urban di berbagai belahan dunia. Diantara manfaat lari, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot, mengurangi stress, meningkatkan kesehatan mental, serta manfaat-manfaat lainnya yang bersifat membangun mental dan fisik seseorang. Begitu banyaknya manfaat dari olahraga lari ini, sehingga melahirkan munculnya komunitas-komunitas *runner*, mulai dari yang sifatnya lari untuk olahraga prestasi, maupun lari sebagai sarana pergaulan untuk hidup sehat.

Tidak terkecuali di Kementerian Kominfo, beberapa sivitas yang memiliki concern terhadap gaya hidup sehat dan kesamaan hobi dalam menggeluti olahraga lari, membentuk komunitas yang bernama KominfoRunners. Dilihat dari sisi morfologi, sudah jelas tentunya KominfoRunners merupakan

komunitas para runner (pelari) yang terikat pada satu ekosistem yang bernama Kementerian Kominfo. Menarik dirunut mengenai sejarah berdirinya KominfoRunners itu sendiri. Dokter Lutfi sebagai pendiri komunitas ini bercerita, pada awalnya KominfoRunners dibentuk sebagai wadah untuk persiapan mengikuti lomba lari dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Korpri (Ponas Korpri) di Bangka Belitung pada tahun 2019 silam. 'Waktu itu saya diminta untuk mencari sepuluh orang pelari dari Kominfo untuk mewakili, sehingga saat itu sekalian dibentuk KominfoRunners,' ungkap dr. Lutfi dalam wawancara dengan Tim Majalah KominfoNext di ruang kerjanya.

Seiring dengan semakin banyaknya penghobi lari yang bermunculan di Kementerian Kominfo, fungsi KominfoRunners yang semula hanya sebagai wadah untuk persiapan Ponas Korpri, menjadi berkembang sebagai wadah kegiatan 'ekstrakurikuler' serta tempat berbagi info kegiatan serta ilmu dalam berlari. Merujuk dari WhatsApp Group (WAG) KominfoRunners, total pegawai yang



bergabung dalam komunitas ini yaitu sebanyak 36 orang dari berbagai unit kerja di Kementerian Kominfo. Walaupun saat ini, belum ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas ini, namun jika ada event atau lomba lari, biasanya para anggota KominfoRunners akan berlari bersama dalam satu kelompok. Event besar yang pernah diikuti komunitas ini, diantaranya Pornas Korpri XVI, Jakarta Marathon 2022, Pocari Sweat Run, dan beberapa event lari lainnya.

KominfoRunners saat ini masih berfokus sebagai wadah hobi dan sarana untuk hidup sehat bagi para anggotanya. Pada kegiatan Pocari Sweat Run 2024 di Bandung, sasaran utama keikutsertaan para pelari yang tergabung di KominfoRunners, diprioritaskan untuk uji coba mengikuti nomor marathon dan finish dengan catatan waktu yang ditentukan penyelenggara. "Targetnya, banyak teman-teman (komunitas) yang pengen lari marathon untuk pertama kalinya, jadi targetnya bisa finish dengan kuat dan sehat," ucap dr. Lutfi.

Lebih lanjut, dr. Lutfi menyampaikan bahwa kedepannya, KominfoRunners akan menyelenggarakan secara rutin lari bareng, pelatihan lari, serta penyusunan pola latihan yang tepat untuk membantu anggotanya mencapai target dalam berlari.

Tertarik untuk bergabung? Buat Sobatkom yang ingin hidup sehat sekaligus mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari berlari, bisa langsung menemui dr. Lutfi di Klinik Pratama Kementerian Kominfo, Gedung Annex Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Komunitas ini terbuka bagi Sobatkom yang memang sudah rutin berlari atau bahkan baru memulai untuk berlari. "Tidak ada syarat khusus bagi yang ingin bergabung di KominfoRunners, bagi yang baru mulai lari, kami juga akan sharing ilmu tentang berlari," pungkas dr Lutfi mengakhiri diskusi. (Helmi, Irso)







Portal Kominfo

Siaran Pers No. 81/HM/KOMINFO/02/2024, Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Resmikan 19 Fasad UPT, Menkominfo Ajak Tingkatkan Kinerja



Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah berupaya meningkatkan kecepatan akses internet di Indonesia agar tidak tertinggal dari negara lain. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan optimisme atas upaya itu yang kini terus dilakukan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang berkelanjutan termasuk pengembangan teknologi 5G dan 6G dengan dukungan seluruh sivitas Kementerian Kominfo.

“Dengan meningkatkan kinerja, saya optimis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat mendorong peningkatan kecepatan internet Indonesia,” ungkapnya saat meresmikan secara simbolis Pembangunan Fasad 19 Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie juga mengajak untuk terus mengembangkan inovasi agar tetap relevan dan adaptif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Saya juga meminta rekan-rekan untuk memperkuat fungsi Ditjen SDPPI agar mampu menjawab tantangan kompleks dalam dunia spektrum frekuensi, maksimalkan otomasi pengukuran untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi manajemen ukuran,” ujarnya.

Menkominfo mengapresiasi Ditjen SDPPI yang telah berperan besar dalam menjaga dan mengelola spektrum frekuensi radio di Indonesia.

“Sebagai sumber daya alam yang terbatas namun vital perlu dikelola baik. Saya juga memberi apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berkolaborasi dalam mendukung pencapaian dan kinerja Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo,” ungkapnya.

Kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI, Menteri Budi Arie berpesan untuk menjaga soliditas sebagai kunci keberhasilan dalam setiap langkah. Menurutnya hal ini penting untuk dapat mencapai visi bersama.

“Mari bersama-sama berkolaborasi dan berinovasi, untuk menciptakan Indonesia yang makin terkoneksi,” ajaknya.

Menkominfo meresmikan pembangunan infrastruktur gedung kantor UPT Loka Tanjung Selor, Loka Mamuju dan Loka Manokwari serta renovasi fasad 16 UPT yaitu Palu, Makassar, Banda Aceh, Banjarmasin, Ternate, Batam, Palangkaraya, Pekanbaru, Pontianak, Palembang, Manado, Tangerang, Mataram, Manokwari, Jayapura, dan Pangkal Pinang.

Siaran Pers No. 83/HM/KOMINFO/02/2024, Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Menteri Budi Arie Ajak Anak Muda Makassar Promosikan Kuliner Lewat Platform Digital



Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong generasi muda untuk memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai tonggak penting dalam memajukan Indonesia.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak generasi muda Makassar untuk terus meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital.

“Semua yang serba digital ini harus kita pakai dengan baik, karena intisari dari digitalisasi adalah membuat masyarakat menjadi produktif,” ujarnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan disrupsi teknologi digital perlu dimanfaatkan generasi muda dengan optimal. Kehadiran teknologi digital memungkinkan generasi muda Makassar melakukan inovasi untuk membangun bangsa dan negara. Salah satunya dengan terus menjadikan Makassar sebagai kota makanan terenak.

“Semua makanan di Makassar ini enak, ada Es Pisang Ijo, Coto Makassar, Pisang Epe, Sup Konro Karebosi, dan masih banyak yang lainnya. Sudah banyak restoran hingga warung makan pinggir jalan dan sudah tersedia juga di berbagai layanan pesan antar *online*. Lewat internet anak-anak muda

dapat mempromosikan wisata kuliner daerah agar mendunia,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, saat ini Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelayanan pemerintahan berbasis digital itu memungkinkan semua serba cepat.

Di sisi masyarakat, Menteri Budi Arie mengharapkan generasi muda untuk mengambil bagian sebagai agen perubahan. Menurutnya, pada tahun 2045, peluang bagi generasi muda Indonesia terbuka lebar untuk menjadikan Indonesia maju.

“Di tahun 2045 mendatang, Indonesia akan menjadi negara maju. Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, peran pemuda pemudi Makassar sangat penting,” tandasnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi optimistis generasi muda Makassar akan mengambil peran dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Saya senang bisa hadir di Makassar karena anak-anak muda di sini serba optimis. Modal bangsa Indonesia maju adalah optimisme. Dan, kami optimis Indonesia akan menjadi negara di barisan terdepan dalam pemanfaatan teknologi di masa depan,” tegasnya.

Siaran Pers No. 84/HM/KOMINFO/02/2024, Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Agar Tak Jadi Korban Hoaks, Menkominfo: Gampang, Ingat BAS!



Selama rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, konten hoaks masih banyak dibuat dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Bersama penyelenggara Pemilu, Kementerian Kominfo berupaya menjalankan Kampanye Pemilu Damai 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak menjadi korban hoaks.

"Secara khusus saya ingin berbagi tips agar kita semua tidak menjadi korban dan pelaku penyebaran hoaks. Dengan ingat singkatan nama saya. Tolong di ingat-ingat ya, BAS! Yang berarti B, Baca informasi dengan hati-hati. Kedua, A itu Ayo cek dulu kebenaran informasinya, dan yang terakhir adalah S, Stop informasi bohong dan mengandung konflik SARA. Sering dulu sebelum *sharing*," jelasnya dalam Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie mencontohkan salah satu konten hoaks yang memuat informasi tidak benar telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Kominfo. Konten berupa unggahan video pada tanggal 17 Januari 2024 yang mengklaim penemuan kotak suara ganda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoaks tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Inilah salah satu contoh bagaimana temuan hoaks bisa menjadi mendelegitimasi kepercayaan masyarakat pada institusi penyelenggaraan Pemilu," ungkapnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pemantauan konten yang tersebar di internet untuk menangkal berita hoaks. Menurut Menkominfo, Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mengidentifikasi manakala ada peredaran segala jenis berita hoaks, disinformasi, misinformasi maupun malinformasi serta ujaran kebencian di media sosial.

"Jelang Pemilu ini banyak berseliweran info-info berita palsu. Namun hoaks itu tidak bertahan lama, sebab kami langsung melakukan *take down* secara adat digital dalam 1×24 jam karena kami mempunyai patroli siber dengan menggunakan mesin *crawling*," jelas Menkominfo.

Menteri Budi Arie juga mengingatkan agar masyarakat tidak membagikan informasi hoaks atau yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih sejuk dan bijak dalam bersuara menggunakan teknologi digital," ungkapnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto.

Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Andi Rian Ryacudu Djaja dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.

Siaran Pers No. 86/HM/KOMINFO/02/2024, Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Bersama Gen Z Makassar, Menteri Budi Arie Deklarasikan Pemilu Damai



Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Damai. Dalam salah satu rangkaian kampanye itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Generasi Z Kota Makassar mendeklarasikan Pemilu Damai 2024.

“Pada hari ini, kami, para pemangku kepentingan yang berkumpul di sini dengan penuh semangat dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, secara resmi mendeklarasikan komitmen bersama kami. Dengan sungguh-sungguh, kami berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan demokrasi, mengedepankan informasi fakta, menolak politik identitas dan SARA. Bertekad menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa di atas segala perbedaan,” kata Menkominfo saat memimpin deklarasi dalam acara Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).

Menteri Budi Arie membacakan deklarasi bersama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto diikuti Generasi Z Kota Makassar. Setelah itu, Menkominfo bersama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, menekan tombol layar sentuh sebagai simbol penegasan Deklarasi Pemilu Damai 2024.

Usai deklarasi, Menteri Budi Arie kominfo mengimbau masyarakat khususnya pemilih pemula untuk bijak bermedia sosial. Menurutnya, media sosial bisa menjadi pemicu kerawanan Pemilu.

Menkominfo menyatakan Pemilu sebagai proses memilih pemimpin perlu diimbangi dengan partisipasi setiap warga negara dengan menggunakan hak pilih masing-masing.

“Memilih itu hak kedaulatan rakyat jadi ayo berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing,” tandasnya.

Menteri Budi Arie juga mengajak pemilih pemula atau Generasi Z untuk menggunakan hak politik dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024 mendatang. Menkominfo menekankan menjadi golongan putih atau tidak menggunakan hak pilih bukan pilihan tepat dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

“Untuk pemilih pemula jangan golput dan tanggal 14 datang ke TPS jadi harus (ajak) ke teman-temannya! Pemilu itu kan haknya masyarakat, hak kedaulatan rakyat, karena itu ayo gunakan hak itu supaya tanggal 14 Februari 2024 berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing,” ajaknya.

Siaran Pers No. 82/HM/KOMINFO/02/2024, Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Indonesia Dorong Kolaborasi Negara ASEAN untuk Terapkan Digitalisasi Inklusif



Delegasi Republik Indonesia mendorong kolaborasi negara-negara ASEAN untuk menghadapi tantangan digitalisasi yang kompleks. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan upaya membangun ASEAN digital yang inklusif dan terpercaya akan lebih mudah dengan menindaklanjuti ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025.

“Membangun ASEAN digital yang inklusif membutuhkan daya tahan, keuletan, dan perhatian. Namun yang terpenting, kolaborasi yang teguh, saling mendukung, dan tekad untuk tidak meninggalkan siapa pun, *no one left behind*,” ujarnya dalam 4th ASEAN Digital Ministers Meeting 2024: “Building Inclusive and Trusted Digital Communities” di Shangri-La Hotel, Singapura, Kamis (01/02/2024).

Menurut Sekjen Mira Tayyiba di tengah gejolak ekonomi makro di seluruh dunia, ASEAN telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang besar. ASEAN memiliki PDB gabungan sebesar USD3,7 Triliun dan menjadi perekonomian terbesar ketiga di Asia serta perekonomian terbesar kelima secara global.

“Rekomendasi tindakan yang disajikan dalam Tinjauan Jangka Menengah ADM 2025 akan memungkinkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya tumbuh di seluruh Negara Anggota ASEAN serta berkembang di seluruh ASEAN

sebagai kawasan yang kohesif,” tandasnya.

Beberapa strategi telah dirumuskan negara ASEAN untuk mendorong pertumbuhan regional. Salah satunya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang berpotensi melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan dari USD 1 Triliun menjadi USD 2 Triliun pada tahun 2030.

“Prospek yang menjanjikan ini harus dimanfaatkan secara strategis, untuk memungkinkan percepatan pertumbuhan baik bagi ASEAN maupun negara-negara anggotanya,” ujar Sekjen Kementerian Kominfo.

4th ASEAN Digital Ministers Meeting 2024 di Singapura dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Singapura Josephine Teo dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand Prasert Jantararuangtong. Pertemuan tersebut membahas isu-isu prioritas dalam pengembangan digitalisasi di kawasan ASEAN, seperti tata kelola *Artificial Intelligence (AI)*, aliran data lintas batas, dan keamanan siber.

Lima Langkah Indonesia

Sekjen Mira Tayyiba menjelaskan beberapa langkah Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi tantangan digitalisasi. Menurutnya, Indonesia berupaya mengoptimalkan teknologi digital agar disrupsi teknologi tidak berpotensi memperburuk kesenjangan. Adapun langkah yang diambil yaitu, pertama, menyediakan konektivitas digital yang mudah diakses, terjangkau dan andal. Kedua, mengembangkan literasi dan keterampilan digital yang penting. Ketiga, menjaga ruang digital yang aman dan produktif. Keempat, membangun tata kelola data yang adil dan transparan. Dan kelima, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi.

“Indonesia berpandangan bahwa teknologi digital harus menjadi jembatan dua arah yang dapat diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, Indonesia berupaya sebaik-baiknya,” tegasnya.

Pada tahun 2023, Indonesia meluncurkan Satelit Indonesia Raya (SATRIA)-1 dengan kapasitas *high-throughput* untuk memperluas jangkauan konektivitas digital ke daerah-daerah terpencil.

Guna menumbuhkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Tahun 2022 dan Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2023 untuk mengakomodasi perlindungan *online* bagi anak-anak yang mengakses sistem elektronik.

“Dan sebulan yang lalu, Indonesia meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045, sebuah inisiatif yang mencakup strategi Indonesia menuju masa depan digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” tutur Sekjen Kementerian Kominfo.

Sekjen Mira Tayyiba menekankan perkembangan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang memiliki potensi dan tantangan besar. Beberapa tantangan itu antara lain kemungkinan hilangnya lapangan kerja akibat otomatisasi dan penyebaran misinformasi dan disinformasi produk teknologi AI dan diperkuat media sosial yang telah menyebabkan kekacauan sosial dan politik.

“Sebagai langkah awal dalam regulasi AI, Indonesia baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI sebagai pedoman bagi organisasi publik atau swasta dalam menyediakan sistem elektronik saat mengembangkan dan menggunakan AI,” tegasnya.

ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN) merupakan pertemuan tahunan bagi pimpinan tinggi bidang digital dan pemangku kepentingan di wilayah ASEAN untuk membahas perkembangan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan perekonomian serta kualitas hidup masyarakat ASEAN.

Siaran Pers No. 90/HM/KOMINFO/02/2024, Jumat, 2 Februari 2024

tentang

Indonesia Dukung Kerja Sama ASEAN - ITU untuk Pemerataan Konektivitas Digital



Pemerintah Indonesia mendukung penuh Rencana Kerja Digital ASEAN dengan International Telecommunication Union (ITU) 2024 dan Area Kerja Sama Prioritas ASEAN - ITU 2024 - 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan kerja sama itu akan menjadikan konektivitas digital di negara-negara ASEAN lebih merata.

“Dukungan ITU yang tak ternilai memainkan peran penting dalam memberikan manfaat konektivitas internet ke seluruh pelosok dunia. Saat ini, sekitar 517,2 juta orang Asia Tenggara atau 75,6% populasi Asia Tenggara terhubung dengan internet. Jadi ada 166,7 juta atau 24,4% dari kita masih belum terhubung,” tuturnya dalam The 4th ADGMIN Meeting with Dialogue and Development Partners dalam rangkaian acara 4th ASEAN Digital Minister Meeting 2024 di Shangri-La Hotel, Singapura, Jumat (02/02/2024).

Sekjen Mira Tayyiba menyatakan upaya menghadirkan konektivitas ke daerah paling terpencil dan komunitas pedesaan memerlukan dedikasi yang kuat. Menurutnya, Indonesia telah bekerja sama dengan ITU dalam melaksanakan inisiatif Desa Cerdas dan Pulau Cerdas atau Smart Village and Smart Island (SVSI).

“Sebagai sarana untuk memberikan konektivitas dan layanan digital kepada komunitas yang belum terhubung dan kurang terlayani,” jelasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menilai, pemerataan konektivitas digital menjadi kunci dalam transformasi masyarakat pedesaan dan pesisir, meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan dengan menghubungkan ke berbagai layanan yang dimungkinkan secara digital.

“Inisiatif SVSI sejalan dengan tujuan *Masterplan Digital ASEAN 2025* untuk menjembatani kesenjangan digital dan mendorong inklusi digital,” tandasnya.

Sekjen Mira Tayyiba mengapresiasi ITU karena telah menjadi mitra ASEAN yang luar biasa selama ini dalam mengembangkan akses dan konektivitas telekomunikasi.

“Kami berharap kolaborasi kita akan terus berkembang, dan bersama-sama, kita akan membangun dan menumbuhkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya di seluruh ASEAN,” ungkapnya.

Siaran Pers No. 89/HM/KOMINFO/02/2024, Jumat, 2 Februari 2024

tentang

Indonesia Dorong Kolaborasi ASEAN - Jepang Lebih Intensif



Pemerintah Republik Indonesia mendorong kolaborasi yang lebih intensif antara ASEAN dengan Jepang. Kemitraan ASEAN-Jepang telah berjalan selama 50 tahun dan menghasilkan banyak capaian positif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Mira Tayyiba menyatakan Indonesia menjunjung tinggi pernyataan visi bersama, persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang serta rencana implementasinya.

"Pemerintah Indonesia menginginkan kerjasama dan kolaborasi yang lebih intensif melalui *platform* Kemitraan Jepang-ASEAN, yang secara khusus berfokus pada membina kerja sama digital di bidang telekomunikasi," jelasnya dalam acara 4th ASEAN Digital Ministers Meetings bersama Jepang di Shangri-La Hotel Singapura, Jumat (02/02/2024).

Negara-negara anggota ASEAN dan Jepang akan berkolaborasi untuk membekali warga negara dengan keterampilan digital yang diperlukan, membina komunitas yang lebih kuat dan masa depan lebih sejahtera. Selain itu, Kemitraan ASEAN dan Jepang juga meningkatkan dukungan dan kerja sama dalam sektor pertanian, pemetaan digital, tingkat melek huruf, dan membuat program pelatihan untuk membantu petani memanfaatkan teknologi digital secara efektif.

"Saya berharap kolaborasi ini memperkuat kemitraan kita dan mendorong kita lebih dekat dengan kebersamaan visi membangun ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya di ASEAN," tandas Sekjen Mira Tayyiba.

Sekjen Kementerian Kominfo menyampaikan apresiasi kepada Jepang yang telah memberikan dukungan dalam perkembangan digitalisasi di ASEAN.

"Indonesia secara khusus memuji hasil dari KTT Peringatan 50 Tahun Kerja Sama dan Persahabatan ASEAN-Jepang baru-baru ini. Saya yakin, bersama-sama, kita dapat memanfaatkan kekuatan teknologi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran bersama di seluruh negara kita," ungkapnya.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-26 ASEAN - Jepang tanggal 6 September 2023 lalu telah disepakati peningkatan kemitraan menjadi Kemitraan Komprehensif Strategis ASEAN-Jepang. Kerja sama konkret tersebut termasuk pendanaan infrastruktur, transisi energi yang adil, transformasi digital, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok. Selanjutnya dalam KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN - Jepang di pertengahan Desember 2023, disepakati visi bersama dan rencana implementasi sebagai landasan kuat Kemitraan ASEAN - Jepang ke depan dalam mendukung Visi Komunitas ASEAN 2045.

Siaran Pers No. 85/HM/KOMINFO/02/2024, Kamis, 1 Februari 2024

tentang

Indonesia Rebut Lima Penghargaan ASEAN Digital Awards 2024



Indonesia berhasil memperoleh lima penghargaan dalam ASEAN Digital Awards (ADA) 2024. Anugerah tersebut terdiri dari dua medali emas, satu perak, dan dua perunggu untuk inisiatif startup di kategori *Digital Startup* dan *Private Sector*.

Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius Pudjianto mengapresiasi pencapaian lima perwakilan Indonesia dalam ajang pengganti ASEAN ICT Awards itu.

"Mereka berkontribusi dalam berinovasi dan juga penerapan dalam setiap sektor. Oleh karena itu kami terus mendorong dengan program pengembangan startup selanjutnya serta hilirisasi digital di sektor strategis," ujarnya usai acara Penyerahan Penghargaan ADA 2024 dalam Gala Dinner 4th ADGMIN di Gardens by the Bay, Singapura, Kamis (01/02/2024) malam.

Melalui Program 1000 Startup Digital, Kementerian Kominfo memfasilitasi untuk pengembangan entrepreneur berbasis digital. Dalam ADA 2024, Kementerian Kominfo memfasilitasi karya TIK terbaik dari Indonesia.

"Kominfo memfasilitasi lima tim finalis perwakilan Indonesia melakukan presentasi secara luring di depan 13 Final Judges ADA 2024 yang terdiri dari 10 juri dari tiap negara anggota ASEAN dan 3 orang juri undangan yang berasal dari China, Jepang dan Korea," jelas Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo.

ADA 2024 merupakan ajang kompetisi regional yang kurasi atau seleksi produk dari pesertanya dilaksanakan sepenuhnya secara daring.

"Mulai dari *submission* hingga *preliminary judging* proses kurasi seluruhnya dilaksanakan secara daring," jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, dari seluruh tim perwakilan Indonesia yang dikirimkan, sebanyak lima tim berhasil lolos menjadi finalis ADA 2024.

"Ada Crustea dan Artopologi untuk kategori Digital Startup serta Shieldtag dan Incrane untuk kategori Private Sector," jelasnya.

ADA pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 (saat itu masih bernama AICTA) di Cebu, Philippines. Pada tahun 2020, ADA sempat terhenti karena Pandemi Covid-19 melanda dunia.

"Sekitar pertengahan tahun 2023 kemudian diputuskan bahwa AICTA kembali dilaksanakan dengan Singapura sebagai *host country* atau penyelenggara yang kini bernama ASEAN Digital Awards (ADA)," jelas Direktur Bonifasius Pudjianto.

Penghargaan diberikan dalam enam kategori yaitu *Public Sector*, *Private Sector*, *Digital Content*, *Digital Startup*, *Digital Innovation* dan *Digital Inclusivity*. Dalam ADA 2024, Tim Crustea dan Tim Shieldtag merebut Penghargaan Gold Winner, sementara Artopologi merebut Penghargaan Silver Winner. Dan, penghargaan Bronze Winner direbut oleh Jaramba dan Incrane.

Siaran Pers No. 87/HM/KOMINFO/02/2024, Jumat, 2 Februari 2024

tentang

Juara Umum ADA 2024, Sekjen Kominfo: Bukti Sukses Program Startup Digital



Sekjen Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Singapura Suryo Pratomo bersama pemenang ASEAN Digital Awards 2024, dalam Gala Dinner the 4th ADGMIN di Flower Field, Gardens by The Bay, Singapura, Kamis (01/02/2024). - (Bon)

Indonesia berhasil memperoleh lima penghargaan dalam ASEAN Digital Awards (ADA) 2024. Penghargaan itu menjadikan Indonesia sebagai juara umum pencapaian inovasi digital terbaik di antara pemangku kepentingan utama di ASEAN yang sebelumnya dikenal sebagai ASEAN ICT Awards.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan keberhasilan ini merupakan bukti sukses Program *Startup Digital* di Indonesia.

"Ini menandakan bahwa program *Digital Startup* yang diampu Kominfo berjalan cukup efektif. Karena saya dengar informasinya lima besar yang *digital startup*, ya memang hanya *startup* Indonesia," ujarnya sebelum mengikuti Pertemuan Hari Kedua 4th ASEAN Digital Minister Meeting di Shangri-La Hotel Singapura, Jumat (02/02/2024).

Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo memiliki beberapa program untuk memfasilitasi perkembangan *startup* digital nasional.

"Mulai dari pengumpulan ide, sampai dengan mencari mentor, investor, dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat hasilnya salah satunya di ajang yang berlangsung di rangkaian ADGMIN ini," jelasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyoroti pemenang yang berasal dari Generasi Z dengan inisiatif layanan dan produk di sektor pertanian dan kelautan.

"Yang menggemirakan di mana pemenang tersebut bukan bisnis konvensional seperti *e-commerce*, *fintech*, tapi sudah merambah ke hal-hal yang lebih *basic* seperti pertanian dan kelautan," ungkapnya.

Sekjen Mira Tayyiba mengaku bangga dan mengapresiasi prestasi yang diraih kelima delegasi Indonesia dalam ASEAN Digital Awards 2024 tersebut.

"Jadi hal-hal mendasar yang memang kita harus paham dulu proses bisnisnya supaya kita bisa berhasil. Karena proses bisnis perdagangan atau retail sangat berbeda dengan pertanian," tandasnya.

Indonesia meraih juara umum dengan memperoleh 5 medali dalam ajang ASEAN Digital Awards (ADA) 2024. Kelima medali tersebut menjadi ganjaran untuk inovasi karya teknologi informasi dan komunikasi dalam kategori Private Sector, dan Digital Startup.

Dalam ADA 2024, Tim Crustea dan Tim Shieldtag merebut Penghargaan Gold Winner, sementara Artopologi merebut Penghargaan Silver Winner. Dan, penghargaan Bronze Winner direbut oleh Jaramba dan Incrane.

ADA 2024 merupakan proyek bersama kementerian bidang telekomunikasi di negara-negara ASEAN yang bertujuan mempromosikan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, pebisnis, dan institusi lain. Sebagai ajang kompetisi Karya TIK tertinggi di tingkat ASEAN, ADA mempertemukan enam kategori, yaitu Public Sector, Private Sector, Digital Content, Digital Startup, Digital Innovation dan Digital Inclusivity.

Siaran Pers No. 97/HM/KOMINFO/02/2024, Minggu, 4 Februari 2024

tentang

Fasilitasi TPS di 3T, BAKTI Kominfo Siapkan Kombinasi Solusi Akses Internet



Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan dukungan infrastruktur digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo memfasilitasi kebutuhan akses internet di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) untuk penyelenggara Pemilu.

“BAKTI Kominfo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun daerah juga telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum terjangkau akses internet,” ujar Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar kepada pekerja media usai Penutupan Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo 2024, di Gelanggang Olahraga Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (04/02/2024).

Menurut Dirut Fadhilah Mathar, BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.

“Sekitar 80.000 lokasi TPS yang membutuhkan akses internet. Itu data usulan dari KPU dan kami sudah melakukan pemetaan bersama,” tuturnya.

Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menjelaskan kombinasi solusi teknologi akan menjadi strategi untuk menyediakan akses internet di wilayah yang sangat kritis diperlukan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa tersedia sesuai kapasitas yang dibutuhkan.

“KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat melakukan penginputan data secara online hasil penghitungan suara di TPS. Tentu diupayakan

untuk bisa dilakukan BAKTI melalui penyediaan jaringan yang optimal dan memadai," tuturnya.

Menurut Dirut Fadhilah Mathar, tugas utama BAKTI Kementerian Kominfo memang menyelesaikan infrastruktur untuk wilayah-wilayah yang belum tercover jaringan internet. Oleh karena itu, bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi intensif untuk mengidentifikasi wilayah yang sudah memiliki akses internet atau membutuhkan infrastruktur sesuai kondisi TPS.

"Karena lokasi tersebut tidak semuanya dibangun oleh BAKTI Kominfo, sehingga kita akan membangun infrastruktur digital di daerah yang memang memerlukan bantuan dari pemerintah.

Jaringan pengiriman data melalui akses internet dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 membutuhkan kapasitas *bandwith* 3 hingga 4 Mbps.

"KPU menyampaikan kepada kami, teknologi yang dibutuhkan tidak semuanya harus *realtime*. Ada yang melalui suatu *storage* dan kemudian baru dilakukan *uploading*," ungkap Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.

Menurut Dirut Fadhilah Mathar, Kementerian Kominfo akan menggunakan kombinasi solusi teknologi agar kebutuhan akses internet penyelenggara Pemilu bisa terpenuhi. Apalagi rata-rata di wilayah 3T akses dan konektivitas sangat sulit dan juga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan terrestrial.

"Sekarang, kita sedang mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet, itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan *Base Transceiver Station* (BTS), ada juga yang *fixed broadband*. Untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya, akan menggunakan teknologi *ground segment* dari Satelit SATRIA-1," jelasnya.

Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menegaskan tidak semua lokasi menjadi wilayah layanan Pemerintah. Penetapan wilayah layanan BAKTI Kementerian Kominfo dan penyelenggara layanan telekomunikasi swasta menjadi wewenang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.

"Jadi untuk penyediaan akses internet dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kami sudah bekerjasama dengan para mitra penyedia jasa internet maupun dengan operator seluler," tandasnya.



Siaran Pers No. 94/HM/KOMINFO/02/2024, Sabtu, 3 Februari 2024

tentang

Teknologi Digital Makin Canggih, Menkominfo Yakin Pemilu 2024 Berjalan Transparan



Keberadaan teknologi digital yang makin canggih dan akses internet dan telekomunikasi yang merata menjadi salah satu faktor sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan Pemilu 2024 akan berjalan dengan baik dan transparan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan teknologi yang makin canggih.

“Saya yakin dengan kemajuan teknologi ini semuanya serba cepat, serba transparan, mau curang dari mana, pasti langsung di-video-kan dan viral kalau ada intimidasi atau kecurangan,” ujarnya dalam acara Podcast yang disiarkan melalui kanal Youtube Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (03/02/2024).

Menkominfo mencontohkan melalui pemanfaatan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Menurutnya, pasca penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih pasti akan memfoto Formulir C1 dan menyebarkan melalui media sosial.

“Sehingga tidak ada peluang bagi siapapun untuk mengubah hasil tersebut. Sistem, teknologi, sudah

lebih maju, partisipasi masyarakat tinggi, kan di TPS difotoin semua itu C1. Formulir C1 820 ribu TPS pasti akan ada semua,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta agar masyarakat tetap menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu. Selain itu, Menkominfo juga mendorong masyarakat mengawasi jalannya Pemilu serta tidak menyebarkan narasi negatif.

“Yang dirugikan adalah kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu, demokrasi kita yang rugi, sekarang ini saatnya untuk sama-sama masyarakat mengawasi,” ujarnya.

Menteri Budi Arie meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu memastikan semua pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan baik. Menkominfo juga mengajak semua pemilih untuk menggunakan hak pilih dalam Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami mengharapkan saatnya kedaulatan rakyat ini diwujudkan dengan mendatangi TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya,” imbaunya.

Siaran Pers No. 93/HM/KOMINFO/02/2024, Sabtu, 3 Februari 2024

tentang

Menteri Budi Arie: Pemerintah Tegas Berantas Judi Online



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan Pemerintah akan terus berkomitmen memberantas judi *online* karena rakyat menjadi korban janji untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat.

“Pokoknya kita terus komitmen untuk terus memberantas judi online, korbannya rakyat, rakyat kecil, karena rakyat punya mimpi kalau main judi online itu bisa kaya padahal kan itu salah sekali,” tandasnya dalam acara Podcast yang disiarkan melalui kanal Youtube Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (03/02/2024).

Menkominfo menyatakan jumlah aduan konten mengenai judi *online* sudah berkurang berkat kerja sama Kementerian Kominfo dengan penyelenggara *platform* media sosial.

Meskipun demikian, Menteri Budi Arie tidak menampik masih terdapat iklan judi *online* di beberapa *platform* media sosial. Namun,

menurutnya Kementerian Kominfo akan terus melakukan deteksi terhadap konten-konten judi *online* untuk dilakukan *takedown*.

“Ini kan semua dipakai segala cara, tapi kita *policy* kita tetap, semuanya kita *takedown*,” tegasnya.

Menkominfo menyatakan pemberantasan judi *online* membutuhkan kerja sama banyak pihak dan waktu yang lama karena para bandar judi *online* akan terus berusaha mempertahankan usahanya.

“Judi *online* memang memberantasnya harus semesta, karena dia akan terus coba *survive* kan, ya kita harus adu napas aja,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi meminta masyarakat untuk membuat aduan jika menemukan konten judi *online* di internet. “Kalau ada laporn aja, pasti kita sikat terus,” pungkasnya.

Siaran Pers No. 96/HM/KOMINFO/02/2024, Minggu, 4 Februari 2024

tentang

Hadiri Forum Global Etika AI, Wamenkominfo: Indonesia Tekankan Tiga Aspek Tata Kelola



Pemerintah Republik Indonesia menegaskan arti penting tata kelola dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (AI) di level global. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan, Pemerintah memiliki perhatian aspek keberlanjutan, tata kelola dan inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan artifisial.

“Pemerintah Indonesia sangat serius terhadap perkembangan dan pemanfaatan penggunaan AI. Hal ini sejalan dengan temuan AI Advisory Body’s mengenai masih adanya kekurangan dalam Tata Kelola AI secara global,” tandasnya dalam sesi Ministers’ Closed Consultations on the Interim Report of the UNSG’s High Level Advisory Body on AI, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Minggu (04/02/2024).

Wamenkominfo menyatakan Indonesia memberikan perhatian pada tata kelola kecerdasan artifisial dalam aspek upaya menjembatani kesenjangan digital dan pembangunan untuk mempercepat kemajuan dalam mengimplementasikan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2030.

“Di mana tidak ada seorang pun terutama negara-negara Global South atau Selatan-Selatan yang tertinggal,” tegasnya.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia meminta kepada Badan Penasihat AI mengintensifkan pekerjaannya untuk mencari lebih banyak perspektif dan minat global tentang harapan negara-negara Global South terhadap penggunaan AI.

“Hal dimaksudkan sebagai sarana untuk memungkinkan tata kelola AI internasional yang menyeimbangkan pengembangan dan penghargaan yang saat ini terkonsentrasi pada penggunaan AI, di antara sejumlah kecil pelaku sektor swasta di sejumlah negara, seperti yang dinyatakan dalam laporan sementara,” jelas Wamen Nezar Patria.

Sementara pada aspek ketiga, Wamenkominfo menekankan agar orientasi Tata Kelola AI global sebagai *platform* sumberdaya bagi negara-negara Global South.

“Orientasi tersebut guna mengidentifikasi dan mengatasi tantangan struktural yang ada, seperti mengakses teknologi baru dan teknologi yang sedang berkembang untuk menciptakan lingkungan yang inovatif,” jelasnya.

Wamen Nezar Patria menegaskan Tata Kelola AI Global harus mempertimbangkan peran untuk memberdayakan negara Selatan-Selatan agar menjadi mitra yang setara dalam pengembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya

mengubah posisi yang selama ini hanya dipandang sebagai pasar atau pengguna teknologi melalui fasilitasi transfer pengetahuan dan transfer teknologi.

Menurut Wamenkominfo, Indonesia sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh AI Advisory Body's dan siap berperan aktif mendorong penggunaan AI yang inklusif dan bertanggung jawab.

"Kami siap untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan Tata Kelola AI Global, serta menyambut baik inisiatif untuk memajukan kerja sama," tandasnya.

Rangkaian Forum Global ke-2 tentang Etika AI mengambil tema Mengubah Lanskap Tata Kelola AI. Pertemuan yang diselenggarakan Slovenia dengan dukungan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) itu akan berlangsung pada tanggal 5 dan 6 Februari 2024.

Dalam forum itu, Wamenkominfo Nezar Patria didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dan Staf Ahli Menteri Kominfo Widodo Muktiyo.

Siaran Pers No. 98/HM/KOMINFO/02/2024, Minggu, 4 Februari 2024

tentang

Wamen Nezar Patria Pamer 198 Startup dalam Forum Global Etika AI



Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan *startup* atau perusahaan rintisan yang telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Perusahaan rintisan itu memanfaatkan teknologi mesin pembelajaran, pemrosesan bahasa alami untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria memperkenalkan ada sebanyak 198 *startup* atau perusahaan rintisan asal Indonesia yang menggunakan AI.

"Saya ingin menyampaikan bahwa sebagai negara yang memiliki 198 perusahaan rintisan yang telah

menggunakan AI hingga Juni 2023," tuturnya dalam sesi *Ministers' Closed Consultations* on the Interim Report of the UNSG's High Level Advisory Body on AI, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Minggu (04/02/2024).

Kementerian Kominfo memberikan dukungan penuh bagi tumbuh kembang *startup* lokal yang inovatif dan kreatif. Salah satunya dengan pendampingan melalui Program 1000 *Startup Digital*, *Startup Studio* dan menghubungkan pengelola *startup* dengan calon investor melalui HUB.ID. Beberapa *startup digital* yang pernah dikunjungi Wamenkominfo antara lain *Feedloop AI*, *Evermos*, dan *eFishery* yang beroperasi dari Bandung, Jawa Barat.

Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi AI dan *Internet of Things* bagi calon talenta digital melalui Program Digital Talent Scholarship.

Wamen Nezar Patria menyatakan penggunaan teknologi AI di Indonesia meningkat karena optimisme masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital.

“Negara Indonesia warganya termasuk yang paling optimis dalam hal penggunaan AI,” tandasnya.

Rangkaian Forum Global ke-2 tentang Etika AI mengambil tema Mengubah Lanskap Tata Kelola AI. Pertemuan yang diselenggarakan Slovenia dengan dukungan United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) itu akan berlangsung pada tanggal 5 dan 6 Februari 2024.

Menurut Wamenkominfo, forum itu menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan Tata Kelola AI Global. Wamen Nezar Patria juga mengapresiasi Pemerintah Slovenia yang telah sukses menyelenggarakan Forum Global UNESCO tentang Etika AI.

“Saya ingin berterima kasih kepada Pemerintah Slovenia atas keramahan dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan acara ini di Slovenia yang indah,” ungkapnya.



Siaran Pers No. 121/HM/KOMINFO/02/2024, Jumat, 9 Februari 2024

tentang

Dirjen IKP Kominfo: Pers Berperan Kawal Transisi Demokrasi Lewat Pemilu



Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024 menjadi momentum bagi insan pers nasional untuk menjalankan peran fundamental sebagai pilar demokrasi.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan pers memiliki peran mengawal Pemilihan Umum 2024 supaya berlangsung secara damai, jujur, adil.

“Peran media selaras dengan peringatan Hari Pers Nasional, yaitu mengawal transisi demokrasi, kepemimpinan dan keutuhan bangsa,” jelasnya usai menghadiri Syukuran HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (09/02/2024).

Dirjen Usman Kansong menegaskan Pemilu damai, jujur, adil, dan berintegritas akan bisa menjaga keutuhan bangsa Indonesia sehingga tidak terpecah-pecah.

“Itulah peran media dalam jangka pendek. Saya kira pas sekali dengan momentum HPN, pers mengawal transisi kepemimpinan dan keutuhan bangsa. Menjadi pilar keempat demokrasi dalam men-demokratisasi-kan masyarakat lewat Pemilu, menjaga, dan merawat keutuhan bangsa,” tuturnya.

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo, pers memiliki peran nyata dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan Pemilu berlangsung damai dan aman.



“Dengan menjadi *clearing house* atau rumah penjernih dari berita hoaks yang marak dalam rangkaian Pemilu,” tandasnya.

Dirjen Usman Kansong menyatakan pers juga menjalankan peran menghasilkan transisi kepemimpinan yang damai, sah, dan diterima oleh masyarakat melalui Pemilu.

“Dengan menguatkan peran pers secara kritis dan independen, kita berharap media menjalankan prinsip *cover both side* sedapat mungkin, tampilkanlah ketiga pasangan calon pemimpin ini, capres-cawapres secara baik,” ungkapnya.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menegaskan Menkominfo Budi Arie Setiadi juga mengimbau kepada pengelola media untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Serentak 2024.

“Peran media yang paling penting adalah mengajak masyarakat mencoblos pada 14 Februari 2024 sesuai pilihan masing-masing pada Pemilu tahun ini yang tinggal menghitung hari,” tegasnya.

Dirjen Usman Kansong menilai makin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka legitimasi Pemilu makin kuat.

“Ini pekerjaan besar, kenapa? Karena di Pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi politik kita sudah tinggi. Orang yang mencoblos datang ke TPS itu 82 persen. Kita harapkan, dalam Pemilu kali ini, paling tidak seperti itu. Kalau bisa pertahankan, syukur persentasenya bisa naik,” harapnya.

Siaran Pers No. 122/HM/KOMINFO/02/2024, Sabtu, 10 Februari 2024

tentang

Kominfo Dukung Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers dalam Pemilu 2024



Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers dan Pemilihan Umum yang Damai, Jujur dan Adil.

Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan dukungan itu menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia.

“Kebebasan pers indikator yang penting, alhamdulillah selama reformasi berjalan dan setelah melewati beberapa pimpinan nasional komitmen itu cukup kuat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers serta Penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (10/02/2024) malam.

Menurut Wamen Nezar Patria, sejak reformasi Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi garis demarkasi jelas dalam demokratisasi di Indonesia.

“Saya kira ini yang menjadikan garis demarkasi antara rezim demokrasi dengan rezim otoriter,” tandasnya.

Wamenkominfo menegaskan pemimpin nasional selama ini memberikan komitmen yang kuat dalam menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

“Komitmen itu masih cukup kuat dan kita berharap akan makin lebih baik lagi ke depan,” ungkapnya.

Wamen Nezar Patria mengharapkan Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang berkualitas dan membawa seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju.

“Tentu saja melalui Pemilu 2024 ini kita sangat harapkan satu kompetisi yang jujur, kompetisi yang adil dan tentu saja Pemilu yang damai,” harapnya.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Menurutnya, kemerdekaan pers akan menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari luar.

“Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya informasi dan disinformasi maupun malinformasi. Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi,” tuturnya.

Siaran Pers No. 126/HM/KOMINFO/02/2024, Senin, 12 Februari 2024

tentang

Jamin Kebebasan Berpendapat, Menkominfo: Demokrasi Sehat Karena Kritik



Pemerintah menjamin ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi selama rangkaian tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan hal itu sejalan dengan kewajiban negara untuk menjaga dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat.

“Dalam negara yang demokratis, kritik merupakan salah satu bagian dari kebebasan berpendapat yang dapat menyetatkan demokrasi. Demokrasi ini kan menjadi sehat karena kritik, vitaminnya kan kritik, gizinya kritik,” ungkapnya usai Kunjungan ke Kompas Group di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Senin (12/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan komitmen Pemerintah tidak pernah mengekang kebebasan berpendapat. Namun, Menkominfo menekankan dalam menyampaikan pendapat, masyarakat harus mampu membedakan antara kritik, fitnah dan hoaks.

“Kalau fitnah, nggak ada datanya, nggak ada faktanya. Kalau soal berbeda pendapat, kita sudah berbeda. Lawan kita kan ada 4, hoaks, ujaran kebencian, fitnah sama merendahkan martabat orang lain,” tandasnya.

Menteri Budi Arie menyatakan Pemerintah senantiasa berupaya mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan damai. Namun, menurutnya untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024 ada syarat dan prasyarat.

“Tentu proses Pemilunya baik, hasilnya juga bisa diterima oleh semua pihak dengan baik, dan segala bentuk apa pun, kecurangan bisa diminimalisir tidak mengganggu proses Pemilu itu sendiri,” jelasnya.

Mengenai tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024, Menkominfo menyatakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2019.

“Kalau tahun 2019, 82% paling tidak di level itu lah. Tapi, saya melihat kecenderungan ini akan banyak yang ke TPS. Artinya partisipasi pemilih bisa maksimal,” tegasnya.

Menteri Budi Arie meyakini Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan jauh dari kecurangan yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Merujuk pada laporan terkini dari Kementerian Polhukam, Menkominfo menekankan sampai hari ini situasi menjelang Pemilu berjalan dengan aman.

“Laporan terakhir tadi kondisi masih terkendali. Ada beberapa daerah yang punya potensi tapi bisa dikendalikan. Jadi tingkat kerawanan, di bawah oke-oke aja. Di bawah biasa aja siap ke TPS,” tandasnya.

Namun demikian, Menteri Budi Arie mengharapkan media mengambil peran untuk mendukung Pemilu 2024 berlangsung damai. Salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih.

“Tolong minta bantuan teman-teman Kompas, atau Kompas.com, Kompas.id, Kontan, Kompas

TV untuk mengumumkan supaya masyarakat ke TPS menggunakan hak pilih,” ungkapnya.

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dan Stafsus Menteri Kominfo Sugiharto.

Siaran Pers No. 125/HM/KOMINFO/02/2024, Senin, 12 Februari 2024

tentang

Jaga Situasi Kondusif, Menteri Budi Arie Ingatkan Masyarakat Tak Sebar Hoaks



Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memantau perkembangan penyebaran konten hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak 2024.

Menjelang Pemungutan Suara dalam rangkaian Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat menjaga situasi selama Pemilu 2024 tetap kondusif dengan tidak menyebarkan konten hoaks, ujaran kebencian bahkan konten yang merendahkan martabat manusia.

“Kami dari Kementerian Kominfo menghimbau masyarakat untuk tidak menyebar hoaks, ujaran kebencian, fitnah dan konten-konten yang merendahkan martabat kemanusiaan,” ujarnya di Kantor Pusat Tribun News, Jakarta Pusat, Senin (12/02/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan suasana yang kondusif akan dapat menjadikan Pemilu 2024 bisa berjalan damai.

“Kami mengharapkan dalam dua hari yang tersisa ini suasana tetap kondusif, dan kita bisa mewujudkan Pemilu Damai 2024,” ujarnya.

Menkominfo menekankan agar semua elemen bangsa mengambil peran untuk menjadikan Pemilu berlangsung secara damai jujur dan adil tanpa intimidasi.

“Supaya kita menghormati Pemilu ini dan kita wujudkan Pemilu yang damai jujur, adil tanpa intimidasi, tanpa kecurangan, dan juga Pemilu yang *legitimate* yang bisa diterima oleh semua pihak apapun hasilnya,” tandasnya.

Menteri Budi Arie Setiadi juga mengajak masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara pada 14 Februari untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan aspirasi kehendak pribadi.

“Kita juga mengharapkan kepada seluruh warga bangsa untuk datang ke TPS, tanggal 14 Februari 2024 untuk menentukan pilihan sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat,” ungkapnya.

Siaran Pers No. 123/HM/KOMINFO/02/2024, Senin, 12 Februari 2024

tentang

Tingkatkan Partisipasi, Menkominfo Dorong Masyarakat Gunakan Hak Pilih



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda untuk menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Serentak 2024 yang akan digelar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

“Anak muda, khususnya Gen Z atau pemilih pemula yang baru punya pengalaman memilih di Pemilu 2024 ini, Ayo ke TPS! Gunakan hak pilih sebaik-baiknya! Jangan golput! Jangan begadang khusus besok malam, supaya hari Rabu bisa datang ke TPS pagi-pagi,” ungkapnya usai Rapat Redaksi Nasional bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta Pusat, Senin (12/02/2024).

Menteri Budi Arie mengharapkan partisipasi pemilih meningkat melalui penyebaran informasi berupa ajakan dan sosialisasi melalui lembaga penyiaran publik.

“Rapat Redaksi Nasional merupakan upaya menyebarluaskan informasi agar mendorong masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih,” ujarnya.

Menkominfo mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap sebaran informasi hoaks

dan berita bohong yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Jauhi dan hindari hoaks. Kita ingin Pemilu ini bisa berlangsung dengan baik, tanpa hoaks, tanpa fitnah, tanpa kebencian, dan tidak merendahkan martabat orang lain,” tandasnya.

Menteri Budi Arie mengharapkan masyarakat Indonesia dapat turut serta membantu penyelenggaraan pemilu agar berlangsung jujur dan adil.

“Mengimbau seluruh warga bangsa agar sama-sama membantu pemerintah, KPU, penyelenggara pemilu, dengan mengecek kertas suara dan juga melaporkan apabila ada hal-hal yang janggal dan merugikan.

Menkominfo menegaskan pelaksanaan Pemilu harus lugas, jujur, dan adil, tanpa ada kecurangan.

“Kita bangun bersama-sama dan kita wujudkan Pemilu 2024 ini sebagai pemilu yang bisa menyatukan seluruh potensi anak negeri,” tegasnya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong memaparkan beberapa strategi komunikasi untuk

meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024.

“Kita sudah share video dan animasi untuk mengajak masyarakat memilih dan mewujudkan Pemilu Damai. Ini sudah kita viralkan sejak pagi tadi, dibantu teman-teman Redaksi Nasional juga. Kedua, kita melakukan beberapa kontra narasi terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat,” jelasnya.

Menurut Dirjen Usman Kansong, Pemerintah menyiapkan strategi komunikasi publik Pasca Pemilu dengan sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media massa.

“Sudah disiapkan beberapa ILM yang bisa kita tayangkan setelah 14 Februari, baik untuk radio maupun televisi. Selain itu gagasan teman-teman RRI untuk membuat dialog secara serentak saya kira bisa di masa setelah Pemilu,” tuturnya.

Siaran Pers No. 124/HM/KOMINFO/02/2024, Senin, 12 Februari 2024

tentang

Tingkatkan Partisipasi Pemilu, Wamen Nezar Patria: Pemerintah Maksimalkan Kanal Komunikasi



Pemerintah bersama Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara memaksimalkan seluruh saluran komunikasi yang dimiliki untuk terus menyebarkan himbuan Pemilu Damai 2024.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan hal itu dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024.

“Semua saluran komunikasi yang kita miliki kita arahkan ke sana, untuk Pemilu Damai, dan ajakan untuk berpartisipasi, kita tebalkan di semua *channel* yang dimiliki pemerintah,” tuturnya usai Rapat Redaksi Nasional bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga

Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta Pusat, Senin (12/02/2024).

Wamen Nezar Patria menekankan informasi tersebut perlu disampaikan kepada pemilih pemula agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 meningkat.

“Ajakan atau himbuan agar partisipasi pemilu lebih besar, khususnya gen Z, penting sekali dalam waktu 48 jam ini,” ujarnya.

Wamenkominfo menjelaskan informasi mengenai tata cara pemberian suara dalam Pemilu 2024 dan

mekanisme penghitungan suara sah menjadi salah satu topik menarik untuk dikomunikasikan kepada masyarakat.

“Saya khawatir banyak yang tidak tahu, saya lihat agak kurang ekspos soal ini. Tolong TVRI, RRI, Antara, cek lagi ke KPU, diintensifkan tentang bagaimana mekanisme pencoblosan, mana suara sah mana suara tidak sah,” tandasnya.

Selain itu, Wamen Nezar Patria juga menekankan arti penting penjelasan mengenai perbedaan tahapan dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Menurutnya, hal itu diperlukan agar dapat menjadikan pelaksanaan Pemilu damai.

“Jangan sampai terjadi keributan di TPS karena ada perbedaan persepsi. Ambil informasi resmi ke KPU dan tolong ini digelorakan mulai hari ini lewat tulisan-tulisan, infografis, untuk nanti disebar ke media-media,” jelasnya.

Siaran Pers No. 128/HM/KOMINFO/02/2024, Rabu, 14 Februari 2024

tentang

Usai Gunakan Hak Pilih, Menkominfo Imbau Masyarakat Segera ke TPS



Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan suara dalam Pemilihan Umum 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Usai memberikan suara, Menteri Budi Arie mengajak seluruh Warga Negara Indonesia yang belum memilih untuk menggunakan hak suara dengan mendatangi TPS.

“Saya dan keluarga sudah menggunakan hak pilih. Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk segera ke TPS masing-masing untuk menggunakan haknya,” ungkapnya di Kompleks Widya Chandra Senayan Jakarta Selatan, Rabu (14/02/2024).

Menkominfo juga mengajak seluruh masyarakat bersuka cita menyambut pesta demokrasi lima tahunan. Pemungutan suara yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang ini, menurutnya juga dimeriahkan dengan pesta diskon oleh *merchant* dan pusat perbelanjaan maupun *e-commerce* bagi

pemilih yang telah memberikan suara.

“Masyarakat antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Apalagi hari ini banyak diskon belanja bagi pemilih,” tuturnya.

Menteri Budi Arie mengharapkan agar hasil Pemilu 2024 dapat menjadikan seluruh masyarakat Indonesia bersatu di tengah kedamaian.

“Siapa pun presiden terpilih nantinya, merupakan presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga nanti sore kita sudah melihat hasilnya, dan Pemilu Damai untuk menyatukan bangsa dapat kita wujudkan,” harapnya.

Menkominfo bersama keluarga mendatangi TPS 001 yang berada tidak jauh dari rumah dinas di Jalan Widya Chandra V Nomor 27, Jakarta Selatan. Didampingi sang istri, Zara Murzandina dan kedua anak mereka, Menteri Budi Arie tiba di TPS 01 dengan berjalan kaki sekitar pukul 09.30 WIB.



Balmon Bengkulu Sosialisasikan Dukungan Komunikasi Radio Kebencanaan bagi Mitra



Bengkulu (SDPPI) – Sebagai upaya memudahkan penyebarluasan informasi saat terjadinya bencana, Balai Monitor SFR Kelas II Bengkulu melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Dukungan Komunikasi Radio Kebencanaan”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (20/02/2024) bertempat di Hotel Golden Rich 88, Curup Kab. Rejang Lebong yang diikuti oleh instansi/lembaga maupun organisasi diantaranya BNPB Daerah/BNPB Provinsi, RAPI dan ORARI se Provinsi Bengkulu, dengan jumlah peserta 50 orang.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Rejang Lebong yang diwakili oleh Dodi Sahdani, Kepala Dinas Kominfo Kab. Rejang Lebong. Dodi Sahdani menyampaikan pentingnya dukungan komunikasi dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi bencana alam. “Dengan penyampaian informasi yang tepat dan cepat, dampak dari bencana bisa segera diatasi,” ujar Dodi.

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Hadirkan Kegiatan Ecosystem Mixer sebagai Wadah Jejaring dan Kolaborasi



Jakarta, 22 Februari 2024 – Sebagai platform untuk mengundang mitra penggerak ekosistem startup digital, Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* menghadirkan kegiatan *Ecosystem Mixer*. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama dengan mitra penggerak ekosistem startup digital, sesuai dengan objektif 1000 Startup pada tahun 2024.

Penyelenggaraan *Ecosystem Mixer* by Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* pada tanggal 22 Februari 2024 di MARKAS Jakarta, Midpoint Place, Jakarta Pusat, dibuka oleh Wakil Menteri Bapak Nezar Patria. Beliau menyampaikan tentang perkembangan dan tren startup global, regional, dan nasional.



Balmon Banda Aceh Latih Nelayan Aceh Jaya Gunakan Perangkat Komunikasi Radio

Banda Aceh (SDPPI) – Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh memberikan bimbingan teknis (bimtek) sertifikasi *Long Range Certificate* (LRC) dan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) kepada nelayan di Aceh Jaya, Jumat (2/2/2024). Bimbingan teknis ini diselenggarakan di Balai Musyawarah Gampong Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya.

Bimtek itu diikuti oleh 28 peserta yang merupakan nakhoda dan awal kapal perikanan di kawasan tersebut. Para nelayan tersebut selama ini bersandar di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Rigaih.

“Dengan pelaksanaan bimtek ini diharapkan agar nelayan dapat memahami bagaimana menggunakan frekuensi dan perangkat komunikasi radio saat melaut, sesuai izin dari pemerintah agar tidak mengganggu frekuensi penerbangan,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Jaya, Teuku Ridwan.

BPSDMP Kominfo Manado Jajaki Kerja Sama DTS dengan Pemda Maluku Utara

Ternate, 7 Februari 2024 – Perdana dilakukan, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Manado mengadakan Rapat Kerjasama dan Persamaan Persepsi Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) Tahun Anggaran 2024 dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara berpusat di Hotel Bela Ternate.

Rapat diawali dengan sambutan oleh Plt. Kepala BPSDMP Kominfo Manado, Bapak Arsyad S.Kom., M.IKom yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan membuka acara secara resmi oleh Kepala BPSDMP Provinsi Maluku Utara Bapak Muhammad Miftah Baay. “Kami menyambut baik program ini dan sangat berterima kasih kepada BPSDMP Kominfo Manado. Program pengembangan kompetensi SDM sangat jarang dilakukan di Maluku Utara, semoga melalui program ini dapat meningkatkan keterampilan SDM ASN maupun masyarakat umum khususnya di bidang digital” ujar beliau dalam sambutannya.





Tingkatkan *Soft Skill* SDM, Ditjen SDPPI Siap Hadapi Transformasi Digital

Bandung (SDPPI) – Selesaikan masa orientasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) jadi investasi masa depan untuk hadapi transformasi digital.

“Kegiatan orientasi yang dilaksanakan ini sebagai bentuk investasi masa depan dan sasaran utama dalam pelatihan ini adalah

mengembangkan *mindset* serta *soft skill* untuk menciptakan komitmen dalam mengidentifikasi tantangan yang ada di lingkungan masing-masing satuan kerja,” ucap Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Syaharuddin, Sabtu (3/2/2024).

Kepala BBPPT merasa pelatihan dua minggu ini tidaklah cukup untuk pengembangan diri, maka dari itu ia menyarankan untuk tetap belajar dimanapun dan kapanpun ada kesempatan. “Harapan yang sangat besar untuk para peserta agar tetap terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk bangsa dan negara ini” imbuhnya.



Ditjen Aptika Kemkominfo Dukung Pengembangan Ekosistem Blockchain di Indonesia

Jakarta, 21 Februari 2024 – Untuk mendorong penciptaan ekonomi digital yang terus maju dan inklusif, Kominfo secara terstruktur menyediakan berbagai kebijakan dalam penciptaan dan peningkatan kemajuan ekosistem digital. Untuk itu, Ditjen Aptika Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan sinergi dengan para pelaku

industri melalui penandatanganan kerjasama (PKS) pada tanggal 17 Januari 2024 bersama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) guna pengembangan industri *Blockchain* yang diwujudkan dengan penyusunan peta ekosistem industri *Blockchain* di Indonesia. Untuk mendukung ekosistem ekonomi digital, pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan A-B-I “At the Table – Blockchain Frontier: Navigating Challenges, Reinforcing Regulation” sebagai bentuk tindak lanjut dari penyusunan kajian tersebut.

Ditjen SDPPI Siapkan ASN Untuk MTQ VII KORPRI 2024

Tangerang (SDPPI) – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengadakan acara pembekalan kepada calon peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VII KORPRI 2024.

Acara pembekalan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Manajemen SDM, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Siti Chadidjah. Ia mengungkapkan bahwa perlu adanya pembekalan dan meningkatkan bakat para peserta. "Saya sangat mendukung peserta yang memiliki bakat pada perlombaan ini dan dapat meningkatkan motivasi dengan adanya



pembekalan ini, dan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal" ujarnya dalam sambutan, Rabu (21/02/2024).

DJPPI Kominfo Gelar Simulasi dan *Launching* Layanan 112 di Kota Banjarmasin

Banjarmasin, 01/02/2024. Direktorat Pengembangan Pitalabar DJPPI Kominfo, melaksanakan Uji Coba dan *Launching* Layanan Panggilan Darurat 112, dalam rangka mempermudah masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat. Acara ini dilaksanakan di Aula Kayuh, Balaikota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh PIC Layanan Panggilan Darurat 112 Kominfo Agung Setio Utomo, Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, Kapolres Kombes Pol. Sabana Atmojo, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Kadis Kominfo TIK, Kepala Dinas terkait, dan PT Jasnita.

Kota Banjarmasin merupakan Pemda ke-125 yang telah menyelenggarakan Layanan Panggilan Darurat (*Call Center*) 112. Layanan ini menjadi salah satu pendukung *Smart City* di Banjarmasin. Agung Setio Utomo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah menyelenggarakan *Call Center* 112 sebagai layanan darurat dan juga sebagai pusat informasi layanan lainnya yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis, dan melayani selama 24 jam.



Sertijab Pejabat Administrator di Lingkungan UPT BPSDM Kominfo

Bandung (21/02/2024) – Menindaklanjuti pelantikan enam pejabat administrator di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo) pada Kamis (15/02) lalu, keenam pejabat yang telah dilantik tersebut melakukan serah terima jabatan (sertijab). Sertijab ini berlangsung di aula BPSDMP Kominfo Bandung pada Rabu (21/02).



Seusai prosesi sertijab, Plt. Sekretaris Badan Litbang SDM, Hendra Fatadona menyampaikan arahan agar para pejabat yang baru dapat langsung merealisasikan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala BPSDM Kominfo. Hendra mengingatkan bahwa untuk mencapai target yang telah disepakati secara optimal, perlu ada sinergi dan kerja sama internal maupun eksternal.

DJPPI Kominfo Menggelar Simulasi dan Launching Layanan 112 di Kabupaten Sijunjung



Sumatera Barat, 18/02/2024. Direktorat Pengembangan Pitalebar DJPPI Kominfo, melaksanakan Uji Coba dan Launching Layanan Panggilan Darurat 112 pada peringatan Hari Jadi Kabupaten (HJK) Sijunjung ke 75 Tahun di Ruang Sidang Gedung DPRD Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan ini dihadiri oleh PIC Layanan Panggilan Darurat 112 Kominfo Agung Setio Utomo, Bupati Kabupaten Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung H. Iraddatillah, Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri Dr. Drs. La Ode Ahmad P.Bolombo, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten 1 Bidang Perekonomian Ary Yuswandi, Ketua DPRD Sijunjung H. Bambang Surya Irwan, Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah dan Jajarannya, serta PT. Digital Sandi Informasi.

Kabupaten Sijunjung merupakan Pemda ke-130 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menyelenggarakan Layanan 112. Penanggulangan situasi darurat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment

Gong Xi Fa Cai Selamat Tahun Baru IMLEK 2024

10 Februari 2024

**Semoga banyak
berkat menyertai kita**

Budi Arie Setiadi
Menteri Komunikasi dan Informatika

